

HUBUNGAN MUTUALISTIK ANTARA PEMERINTAH DAERAH, PENGELOLA OBJEK WISATA DAN MASYARAKAT SEKITAR DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA

(Studi pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Ngawi, PT. Candi Loka dan Masyarakat Desa Girikerto Kecamatan Sine
Kabupaten Ngawi)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Oleh:

ARCHANUDIANSYAH RIZAL AFIEF
NIM. 125030100111102



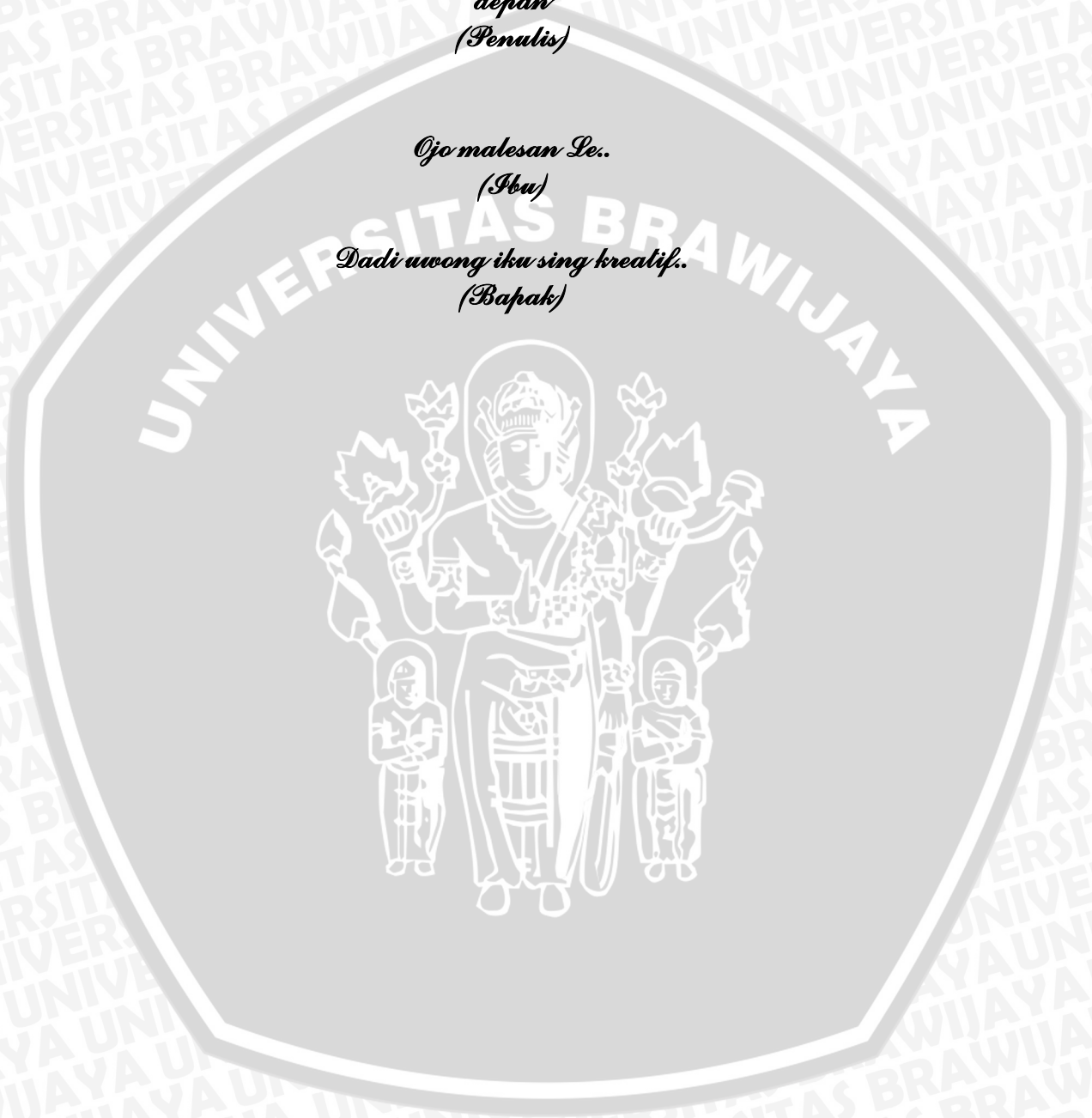
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2016**

MOTTO

*Belajarlah dari pengalaman masa lalu untuk menjadi lebih baik di masa
depan
(Penulis)*

*Ojo malesan Le..
(Ibu)*

*Dadi uwong iku sing kreatif..
(Bapak)*





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
<http://fia.ub.ac.id> E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Hubungan Mutualistik antara Pemerintah Daerah, Pengelola
Obyek Wisata dan Masyarakat Sekitar dalam Pengembangan
Pariwisata (Studi pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Ngawi, PT. Candi Loka dan
Masyarakat Desa Girikerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi)

Disusun oleh : Archanudiansyah Rizal Afief

NIM : 125030100111102

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Administrasi Publik

Malang, 28 Juni 2016

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Wike, S.Sos., M.Si., DPA
NIP. 19701126 200212 2 005

Anggota Komisi Pembimbing

Ainul Hayat, S.Pd., M.Si
NIP. 19730713 200604 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Pada :

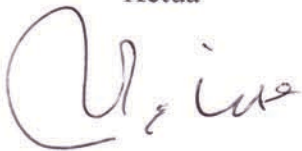
Hari : Kamis
Tanggal : 11 Agustus 2016
Jam : 11.00-12.00
Skripsi atas nama : Archanudiansyah Rizal Afief
Judul : Hubungan Mutualistik antara Pemerintah Daerah, Pengelola Obyek Wisata dan Masyarakat Sekitar dalam Pengembangan Pariwisata (Studi pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi, PT. Candi Loka dan Masyarakat Desa Girikerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Malang, 11 Agustus 2016

Ketua



Wike, S.Sos., M.Si., DPA
NIP. 19701126 200212 2 005

Anggota



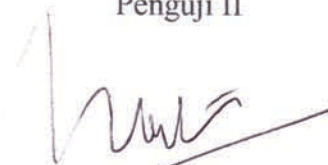
Ainul Hayat, S.Pd., M.Si
NIP. 19730713 200604 1 001

Penguji I



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

Penguji II



Drs. Sukanto, MS
NIP. 19591227 198601 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Agustus 2016



Nama : Archanudiansyah Rizal Afief
NIM : 125030100111102

**Kupersembahkan karyaku untuk keluarga tercinta dan
orang-orang terkasih :**

Ibu Tercinta

Ayah Terhebat

Adik Tersayang

Si Dia Tercinta

Sahabat-Sahabat Tercinta



RINGKASAN

Archanudiansyah Rizal Afief, 2016, **Hubungan Mutualistik Antara Pemerintah Daerah, Pengelola Obyek Wisata dan Masyarakat Sekitar dalam Pengembangan Pariwisata (Studi pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi, PT.Candi Loka, dan Masyarakat Desa Girikerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi)**, Wike, S.Sos, M.Si, DPA, Ainul Hayat, S.Pd, M.Si 215 Hal.+xvii

Penelitian ini didasari pada pengembangan pariwisata di Perkebunan Teh Jamus yang belum menerapkan bentuk kemitraan yang saling menguntungkan (*Mutualism Partnership*). Oleh karena itu, perlu upaya pembentukan hubungan yang mutualistik antar aktor terkait agar tercipta pengembangan pariwisata yang saling menguntungkan untuk semua pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk hubungan, dampak hubungan, serta faktor pendukung dan penghambat hubungan antara Pemerintah Daerah, pengelola obyek wisata dan masyarakat sekitar dalam Pengembangan Pariwisata di Perkebunan Teh Jamus Kabupaten Ngawi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi selama ini adalah *Pseudo Partnership* (Kemitraan Semu), adanya dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari aktifitas pengembangan pariwisata baik dari segi kondisi fisik, sosial-budaya dan ekonomi serta adanya faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhinya. Hubungan mutualistik antar aktor tersebut dalam pengembangan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus belum bisa diwujudkan karena mengalami beberapa kendala. Saran yang bisa diberikan dalam pengembangan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus adalah perlunya inisiatif dari pihak pemerintah untuk melakukan negosiasi, membentuk borang dan surat keterangan pemindahan hak guna usaha, pembentukan unit khusus yang menangani Agrowisata Perkebunan Teh Jamus, menggandeng pihak lain dalam upaya penanganan pengembangan, perlunya lembaga penengah yang bersifat netral dari pemerintah pusat dan perlunya aktor terkait untuk membuka diri dan melihat akan pentingnya kemitraan yang bersifat mutualistik.

Kata Kunci : Hubungan Mutualistik, Pengembangan, Pariwisata, Ngawi

SUMMARY

Archanudiansyah Rizal Afief, 2016, **Mutualistic Relationship between Local Government, Tourism Manager and Local Community in Tourism Development (Study in Youth, Sports, Culture and Tourism Department of Ngawi Regency, PT. Candi Loka and Society of Girikerto Village Sine District Ngawi Regency)**, Advisor: Wike, S.Sos, M.Si, DPA, Ainul Hayat, S.Pd, M.Si 215 pages+ xvii

This research is based on the development of tourism in Jamus Tea Plantation yet to adopt the form of a mutually beneficial partnership (Mutualism Partnership). Therefore, it is necessary efforts to establish a mutualistic relationship between the relevant actors in order to create tourism development that is mutually beneficial to all parties. The purpose of this study was to determine the form of the relationship, the impact of the relationship, as well as enabling and inhibiting factors relationship between local government, tourism managers and local communities in tourism development in Tea Plantation Jamus Ngawi.

This research use descriptive research with a qualitative approach. The research method used is observation, interview and documentation. Analysis of the data used is the analysis interactive model of Miles, Huberman and Saldana.

The results of this study indicate that the relationship over the years is Pseudo Partnership (Partnership Moot), their positive and negative impacts arising from the activities of tourism development both in terms of physical condition, socio-cultural and economic as well as the enabling and inhibiting factors that influence it. Mutualistic relationship between the actors in the development of Agro Jamus Tea Plantation can not be realized due to several constraints. The advice can be given in the development of Agro Plantation Tea Jamus is a need for an initiative from the government to negotiate, establish accreditation forms and certificate of transfer of rights to the business, the formation of a special unit that handles Agro Tea Plantation Jamus, cooperating with other parties in efforts to address the development, the need for institutions neutral arbiter of the central government and relevant actors need to open up and see the importance of the partnership that is a mutualistic.

Keywords : Mutualistic Relationship, Development, Tourism, Ngawi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat, anugerah serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Hubungan Mutualistik antara Pemerintah Daerah, Pengelola Obyek Wisata, dan Masyarakat Sekitar dalam Pengembangan Pariwisata** (Studi pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi, PT. Candi Loka dan Masyarakat Desa Girikerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi). Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Ibu Wike, S.Sos., M.Si., DPA selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan dorongan moril serta saran selama mengajar dan membimbing saya;

4. Bapak Ainul Hayat, S.Pd, M.Si selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, banyak dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini serta selalu sabar menghadapi saya;
5. Bapak Warsito selaku Kasi Promosi Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi yang telah meluangkan waktunya ditengan kesibukan untuk memberikan informasi yang sangat berharga untuk skripsi saya;
6. Ibu Ninuk selaku Kasi Pembinaan Usaha Sarana Prasarana Pariwisata yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian skripsi saya;
7. Bapak Purbo selaku Kepala Tata Usaha PT. Candi Loka yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta bersabar untuk selalu saya repoti dalam penelitian ini;
8. Bapak Haryanto selaku Kepala Divisi Agrowisata PT. Candi Loka yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang sangat berharga guna penyempurnaan skripsi ini;
9. Bapak Slamet selaku Kepala Desa Girikerto yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam penyusunan skripsi saya;
10. Masyarakat sekitar dan Pengunjung Agrowisata Perkebunan Teh Jamus yang telah bersedia saya wawancarai sehingga saya memperoleh informasi guna penyusunan dan penyempurnaan skripsi saya;

11. Orang tua saya yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan suntikan moril untuk penyelesaian skripsi saya;

12. Sahabat-sahabat saya jurusan Ilmu Administrasi Publik 2012, teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi saya.

Demi penyempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Agustus 2016

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kontribusi Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	15
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 18
A. Administrasi Pembangunan	18
1. Pengertian Pembangunan	19
2. Administrasi Pembangunan	21
B. <i>Good Governance</i>	23
1. Konsep <i>Good Governance</i>	23
2. Hubungan Antar Unsur-Unsur <i>Good Governance</i>	25
3. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	27
4. Pilar-Pilar <i>Good Governance</i>	30
C. Kemitraan.....	31
1. Konsep Kemitraan.....	33
2. Model Kemitraan	37
D. Hubungan Mutualistik.....	40
E. Pengembangan Pariwisata.....	43
1. Pengertian Pariwisata	43
2. Pengembangan Pariwisata.....	45
3. Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat	53
4. Kemitraan dalam Pengembangan Pariwisata	57
5. Strategi Kemitraan Pengembangan Pariwisata	60

BAB III	METODE PENELITIAN	63
A.	Jenis Penelitian.....	63
B.	Fokus Penelitian.....	64
C.	Lokasi dan Situs Penelitian.....	66
D.	Sumber Data.....	68
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	69
F.	Instrumen Penelitian.....	72
G.	Analisis Data	75
H.	Keabsahan Data.....	80
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	82
A.	Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	82
1.	Gambaran Umum Kabupaten Ngawi.....	82
2.	Daya Tarik Wisata Kabupaten Ngawi.....	92
3.	Gambaran Umum Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi	97
4.	Gambaran Umum Situs Perkebunan Teh Jamus.....	107
B.	Penyajian Data	123
1.	Hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, Pengelola Obyek Wisata Perkebunan Teh Jamus Kabupaten Ngawi dan Masyarakat Sekitar dalam Pengembangan Pariwisata selama ini ditinjau dari segi potensi wisata, bentuk hubungan dan infrastruktur	123
2.	Dampak dari Hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, Pengelola Objek Wisata Perkebunan Teh Jamus Kabupaten Ngawi dan Masyarakat Sekitar dalam Pengembangan Pariwisata selama ini.....	137
a.	Hubungan yang Berdampak pada Kondisi Fisik....	137
b.	Hubungan yang Berdampak pada Sosial-Budaya..	143
c.	Hubungan yang Berdampak pada Ekonomi.....	150
3.	Faktor Pendukung dan Penghambat Hubungan Mutualistik Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, Pengelola Obyek Wisata Perkebunan Teh Jamus dan Masyarakat Sekitar Perkebunan Teh Jamus di Desa Girikerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.....	161
a.	Faktor Pendukung	161
b.	Faktor Penghambat.....	165
C.	Pembahasan.....	171
1.	Hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, Pengelola Obyek Wisata Perkebunan Teh Jamus Kabupaten Ngawi dan Masyarakat Sekitar dalam Pengembangan Pariwisata selama ini ditinjau dari segi potensi wisata, bentuk hubungan	

dan infrastruktur.....	171
2. Dampak dari Hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, Pengelola Objek Wisata Perkebunan Teh Jamus Kabupaten Ngawi dan Masyarakat Sekitar dalam Pengembangan Pariwisata selama ini.....	180
a. Hubungan yang Berdampak pada Kondisi Fisik....	183
b. Hubungan yang Berdampak pada Sosial-Budaya..	187
c. Hubungan yang Berdampak pada Ekonomi.....	193
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Hubungan Mutualistik Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, Pengelola Obyek Wisata Perkebunan Teh Jamus dan Masyarakat Sekitar Perkebunan Teh Jamus di Desa Girikerto Kecamatan Sine.....	199
a. Faktor Pendukung	200
b. Faktor Penghambat.....	203
BAB V PENUTUP.....	207
A. Kesimpulan	207
B. Saran.....	210
DAFTAR PUSTAKA.....	213
LAMPIRAN.....	218

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penerimaan Devisa Pariwisata dibandingkan dengan Komoditi Ekspor Lainnya Tahun 2011-2014.....	2
Tabel 2	Perbandingan Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Ngawi Tahun 2012-2015	9
Tabel 3	Penduduk Akhir Tahun Kabupaten Ngawi Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2014	91
Tabel 4	Temuan Dampak Pengembangan Pariwisata Model Mill.....	159
Tabel 5	Temuan Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Pariwisata.....	170



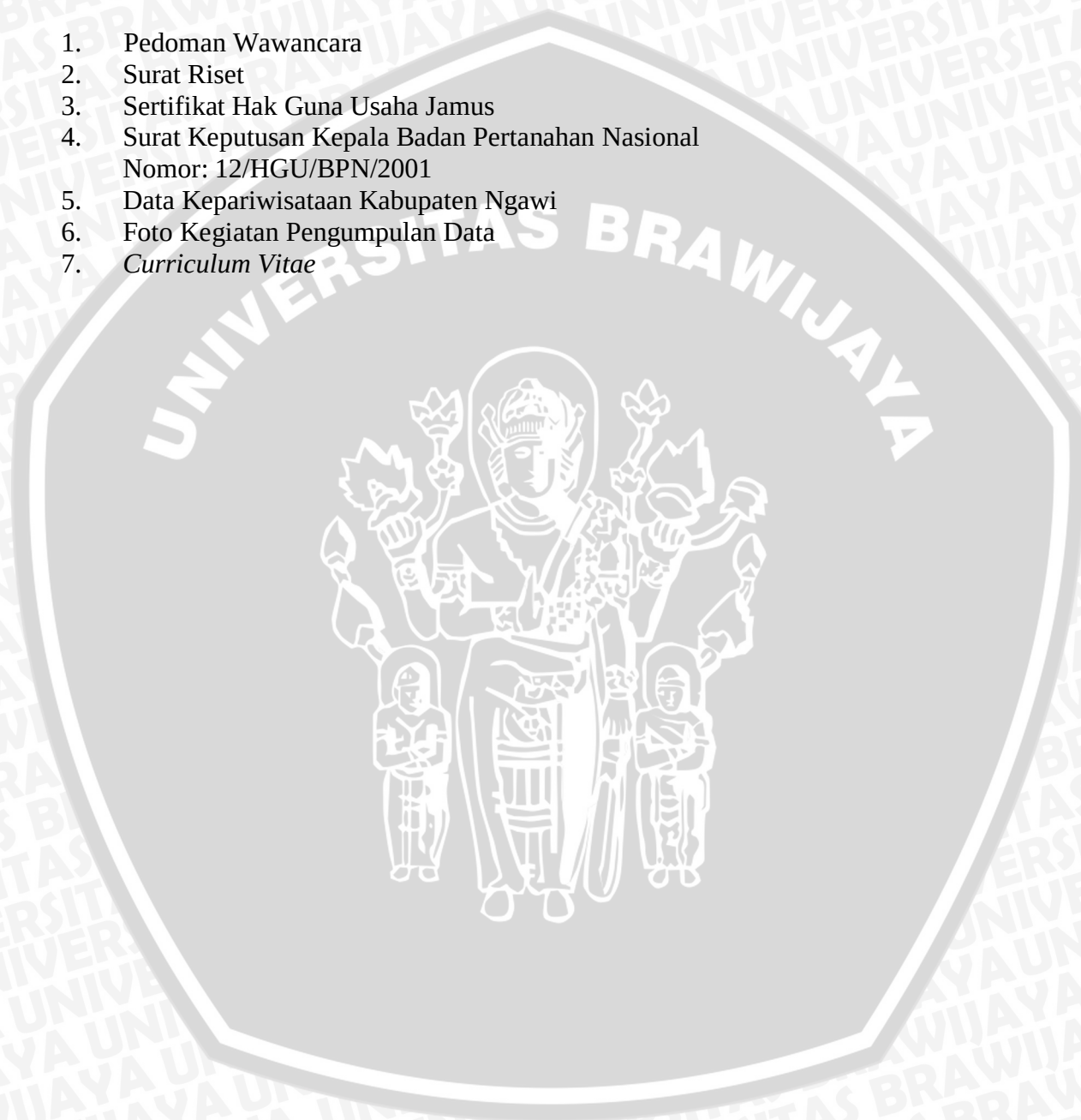
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Sektor Pariwisata dalam 3 (tiga) Pilar Utama	11
Gambar 2	Hubungan Antar Sektor dalam <i>Governance</i>	25
Gambar 3	Pola Kelembagaan Kemitraan Antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta	59
Gambar 4	Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	75
Gambar 5	Peta Administrasi Kabupaten Ngawi	88
Gambar 6	Peta Pariwisata Kabupaten Ngawi	96
Gambar 7	Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Ngawi	106
Gambar 8	Peta Akses Perkebunan Teh Jamus	110
Gambar 9	Panorama Perkebunan Teh Jamus.....	113
Gambar 10	Grojokan Songo Tuk Pakel	114
Gambar 11	Grojokan Kedung Putri	115
Gambar 12	Bumi Perkemahan “Kantil Idaman”	115
Gambar 13	Panorama Gardupolo.....	116
Gambar 14	Borobudur’s Hill	117
Gambar 15	Makam Pendiri Kebun Teh Jamus “Van Der Rappart”	117
Gambar 16	Museum Listrik “Van Der Rappart”	118
Gambar 17	Kolam Renang Anak-anak “Sumber Lanang”	119
Gambar 18	Pabrik Pengolahan Teh Jamus	120
Gambar 19	Kondisi <i>Flying Fox</i> Dulu dan Sekarang.....	120
Gambar 20	Logo PT. Candi Loka	121
Gambar 21	Rencana Pengembangan Kawasan Perkebunan Teh Jamus I ..	131
Gambar 22	Rencana Pengembangan Kawasan Perkebunan Teh Jamus II.	131

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Riset
3. Sertifikat Hak Guna Usaha Jamus
4. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor: 12/HGU/BPN/2001
5. Data Kepariwisata Kabupaten Ngawi
6. Foto Kegiatan Pengumpulan Data
7. *Curriculum Vitae*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Prioritas utama bangsa Indonesia sebagai negara berkembang adalah pembangunan, dengan tidak mengesampingkan prioritas-prioritas lain dalam usaha pembangunan bangsa. Seperti yang dikatakan Siagian (dalam Suryono, 2004: 21), pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilakukan meliputi pembangunan di semua sektor, termasuk juga sektor pariwisata. Dewasa ini, sektor pariwisata menjadi sektor strategis dalam sistem perekonomian nasional yang memberikan dampak cukup besar dalam peningkatan pendapatan nasional.

Tabel 1 menunjukkan kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa Indonesia. Sektor pariwisata mempunyai andil yang cukup positif terhadap peningkatan devisa negara Indonesia dari tahun ke tahun. Walaupun sektor pariwisata tidak berada di urutan pertama dalam ranking penerimaan devisa tersebut, akan tetapi sektor pariwisata juga menjadi andalan pemerintah Indonesia sebagai penyumbang devisa negara. Selain itu, sektor pariwisata merupakan suatu kekayaan potensi Indonesia yang masih bisa diperbarui terus menerus serta di eksplorasi sesuai kebutuhan. Ini berbeda dengan sektor lainnya seperti misalnya sektor minyak dan gas bumi yang jumlah sumbernya terbatas.

Tabel 1. Penerimaan Devisa Pariwisata dibandingkan dengan Komoditi Ekspor Lainnya Tahun 2011-2014

No	2011		2012		2013		2014	
	Jenis Komoditi	Nilai Juta US\$	Jenis Komoditi	Nilai Juta US\$	Jenis Komoditi	Nilai Juta US\$	Jenis Komoditi	Nilai Juta US\$
1	Minyak dan Gas Bumi	41.477,10	Minyak dan Gas Bumi	36.977,00	Minyak dan Gas Bumi	32.633,2	Minyak dan Gas Bumi	23.402,2
2	Batu Bara	27.221,80	Batu Bara	26.166,30	Batu Bara	24.501,4	Batu Bara	16.011,9
3	Minyak Kelapa Sawit	17.261,30	Minyak Kelapa Sawit	18.845,00	Minyak Kelapa Sawit	15.839,1	Minyak Kelapa Sawit	12.756,8
4	Karet Olahan	14.258,20	Karet Olahan	10.394,50	Pariwisata	10.054,1	Pariwisata	8.221,3
5	Pariwisata	8.554,40	Pariwisata	9.120,85	Karet Olahan	9.316,6	Pakaian Jadi	5.660,3
6	Pakaian Jadi	7.801,50	Pakaian Jadi	7.304,70	Pakaian Jadi	7.501,0	Karet Olahan	5.538,8
7	Alat Listrik	7.364,30	Alat Listrik	6.481,90	Alat Listrik	6.418,6	Makanan Olahan	4.755,3
8	Tekstil	5.563,30	Tekstil	5.278,10	Makanan Olahan	5.434,8	Alat Listrik	4.744,3
9	Makanan Olahan	4.802,10	Makanan Olahan	5.135,60	Tekstil	5.293,6	Tekstil	4.031,0
10	Bahan Kimia	4.630,00	Kertas dan Barang dari Kertas	3.972,00	Kertas dan Barang dari Kertas	3.802,2	Bahan Kimia	3.071,0
11	Kertas dan Barang dari Kertas	4.214,40	Bahan Kimia	3.636,30	Kayu Olahan	3.514,5	Kayu Olahan	2.930,5
12	Kayu Olahan	3.288,90	Kayu Olahan	3.337,70	Bahan Kimia	3.501,6	Kertas dan Barang dari Kertas	2.870,7

Sumber : Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2014

Menurut Titin Soekarya, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Iptek Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mengatakan sektor kepariwisataan saat ini menjadi salah satu andalan pemerintah sebagai sumber penerimaan devisa negara terbesar:

"Sektor pariwisata dijadikan andalan sumber devisa negara oleh pemerintah, karena tidak mengeksploitasi sumber daya alam, sektor pariwisata bisa mendatangkan devisa negara dalam jumlah besar hanya dengan menjual keindahan alam atau keanekaragaman budaya kepada para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, tanpa mengambil sesuatu dari alam." (Wibisono, 2010)

Sebagai salah satu sektor strategis nasional, pariwisata memang menjadi sektor yang mempunyai kelebihan ganda yang ditimbulkan dari aktifitas pariwisata. Baik yang sifatnya langsung seperti penyerapan tenaga kerja, maupun yang tidak langsung berupa berkembangnya kegiatan ekonomi pendukung pariwisata seperti penginapan, rumah makan, penjual aneka souvenir khas daerah tujuan wisata, transportasi, dan jasa pelayanan publik lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Yoeti (2008: 3), pengaruh pariwisata pada negara-negara berkembang terlihat jelas seperti misalnya :

- 1) Tumbuh dan berkembangnya usaha makanan, restoran, kafe dan minuman yang bersifat lokal yang banyak diminati wisatawan.
- 2) Tumbuh dan berkembangnya industri kecil seperti produk cinderamata khas daerah.
- 3) Tumbuh dan berkembangnya usaha agen perjalanan untuk melayani wisatawan sampai di daerah tujuan wisata.
- 4) Banyaknya usaha penginapan yang bermunculan seperti losmen, bungalow, hotel, dan juga villa.

Banyaknya manfaat sektor pariwisata terhadap peningkatan perekonomian terutama juga masyarakat sekitar, menjadikan pariwisata harus memperoleh perhatian khusus dari pemerintah dalam pengembangannya. Utama (2013) dalam jurnalnya mengatakan bahwa pariwisata adalah salah satu mesin penggerak perekonomian dunia yang terbukti mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran sebuah negara. Alasan utama pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata baik secara lokal, regional, atau lingkup nasional

pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah.

Melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis sumberdaya maka dapat meningkatkan pengembangan pariwisata. Peningkatan tersebut bisa melalui ekonomi, potensi, manfaat pada masyarakat agar lebih produktif. Sehingga dalam pengembangan pariwisata bisa menjadi tumpuan yang kuat dan kokoh dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan ekonomi lokal. Hal tersebut dikarenakan pengembangan pariwisata akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat secara luas (Yoeti, 1997: 33).

Pengembangan pariwisata mampu menarik minat pelaku bisnis untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi suatu negara. Namun, sumber daya alam di sektor pariwisata yang ada di Indonesia ini belum dikembangkan secara maksimal. Dengan keindahan alamnya, keanekaragaman budaya serta kekayaan peninggalan sejarah yang dimilikinya merupakan sebuah modal yang besar untuk pembangunan perekonomian negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Bidang pariwisata memiliki peranan yang penting dalam perekonomian negara, baik sebagai devisa negara maupun pendapatan untuk masyarakat sekitar. Untuk lebih memantapkan pertumbuhan sektor pariwisata, perlu diupayakan pengembangan produk-produk yang mempunyai keterkaitan dengan sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata

berkaitan erat dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya bangsa, dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam Indonesia.

Pemanfaatan disini bukan berarti merubah secara total, tetapi lebih kepada pengelolaan, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi satu daya tarik wisata. Usaha mengembangkan dunia pariwisata ini didukung dengan UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyebutkan bahwa keberadaan obyek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk peningkatan PAD salah satunya adalah di sektor pariwisata.

Salah satu bentuk pengusahaan pariwisata adalah wisata yang berkonsep agrowisata. Melalui sektor agrowisata, pemerintah daerah berupaya untuk mencapai tujuan sesuai yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 dengan melibatkan masyarakat untuk bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah, karena disamping sebagai potensi lokal atau wilayah, peranan dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan daerah didorong dan ditumbuhkan agar hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sektor agrowisata sangat cocok untuk dikembangkan di negara Indonesia dengan kondisi iklimnya, seperti pengembangan komoditas tropis dan sebagian sub tropis pada ketinggian antara nol sampai ribuan meter di atas permukaan laut.

Komoditas pertanian, mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan dengan keragaman dan keunikannya yang bernilai tinggi serta diperkuat oleh kekayaan kultural yang sangat beragam, mempunyai daya tarik kuat sebagai agrowisata. Dan keseluruhannya sangat berpeluang besar menjadi andalan dalam perekonomian Indonesia.

Agrowisata merupakan bagian dari objek wisata yang memanfaatkan usaha pertanian sebagai objek wisata. Tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha dibidang pertanian. Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan, pendapatan petani dapat meningkat bersamaan dengan upaya melestarikan sumberdaya lahan, serta memelihara budaya maupun teknologi lokal (*indigenous knowledge*) yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan alaminya. (Sastrayuda, 2010: 1)

Penggalan potensi ekonomi dengan pengembangan kawasan agrowisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat, maka kebijakan yang digunakan harus berorientasi pada pembangunan ekonomi lokal (*local economic development*). Pembangunan ekonomi lokal bukan hanya retorika baru tetapi mewakili suatu perubahan fundamental pada aktor dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan ekonomi.

Mewujudkan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata merupakan sektor penting dalam upaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar lokasi wisata yang cukup potensial. Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan juga mengurangi kemiskinan. Sektor pariwisata memiliki perkembangan yang sangat pesat. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc dalam sambutannya:

“Sektor ini telah memberi kontribusi sebesar 9,5% pada PDB global. Kinerja kepariwisataan nasional, secara akumulatif sampai bulan Juli 2015 kunjungan wisman sebanyak 5.472.050 wisman atau tumbuh 2,69% dibandingkan periode yang sama (Januari-Juli) 2014 sebanyak 5.328.732 wisman. Penerimaan devisa diperkirakan mencapai US\$ 5,5 miliar dengan perkiraan pengeluaran wisman per kunjungan sebesar US\$ 1.187,88”. (Yahya, 2015).

Penanganan pengembangan sektor pariwisata memang memerlukan strategi yang tepat. Banyaknya sumber daya alam, manusia, dan budaya yang melimpah yang dimiliki Indonesia serta tersebar luas di berbagai daerah, ini menjadikan sektor pariwisata Indonesia memiliki potensi yang sangat cerah. Agar potensi ini dapat dioptimalkan, diperlukan suatu usaha yang sungguh-sungguh serta kerjasama yang erat diantara para pemangku kepentingan pariwisata, seperti pemerintah, wisatawan, pelaku bisnis pariwisata, dan masyarakat. Untuk itu, pembangunan pariwisata memang harus segera ditangani secara optimal.

Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang kegiatannya berhubungan dengan wisata, pengusaha, objek, dan daya tarik wisata, serta usaha terkait lainnya. Pengembangan kepariwisataan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan secara logis dan realistis. Mengingat Indonesia memiliki banyak potensi-potensi yang diunggulkan untuk pembangunan itu sendiri. Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam baik itu dari hasil pertanian/ perkebunan, pertambangan, dan perikanan.

Kekayaan sumber daya Indonesia bisa kita lihat mulai dari pesisir pantai sampai dengan pegunungan yang semuanya banyak menyimpan potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Terutama dengan diterapkannya otonomi daerah, banyak urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke pemerintah daerah, termasuk juga urusan pengembangan pariwisata. Melalui otonomi daerah ini, daerah-daerah

dituntut berperan aktif dalam pengembangan pariwisata daerahnya. Kabupaten Ngawi yang terletak di sebelah barat Provinsi Jawa Timur, menyikapi pengembangan pariwisatanya dengan menggandeng sektor swasta dalam pengelolaannya. Dan salah satu yang pengelolaannya dilimpahkan ke swasta adalah agrowisata Perkebunan Teh Jamus yang berada di Desa Girikerto, Kecamatan Sine. Dari Kota Ngawi sekitar 42 kilometer di sebelah barat daya. Kebun Teh Jamus ini berada di ketinggian 1200 meter dari permukaan air laut. (Admin, 2011)

Agrowisata ini merupakan bagian dari objek wisata yang memanfaatkan usaha perkebunan (agro) sebagai objek wisata. Tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha dibidang perkebunan. Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan, kita bisa meningkatkan pendapatan petani sambil melestarikan sumber daya lahan, serta memelihara budaya maupun teknologi lokal (*indigenous knowledge*) yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan alaminya. Pengelolaan yang tepat akan memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat sekitar sekaligus menambah pendapatan daerah.

Perkebunan Teh Jamus ini merupakan sektor pariwisata dengan jumlah kunjungan terbanyak di Kabupaten Ngawi, seperti yang ditunjukkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Ngawi Tahun 2012-2015

No	Objek Wisata	Jumlah Pengunjung			
		2012	2013	2014	2015
1	Waduk Pondok	28.650	24.958	49.916	27.091
2	Taman Rekreasi Tawun	14.200	21.603	27.474	26.552
3	Museum Trinil	5.200	6.139	12.638	10.994
4	Perkebunan Teh Jamus	-	141.266	213.546	149.524
5	Benteng Van Den Bosch	-	31.519	42.792	34.762

Sumber : Ngawi dalam Angka 2012-2015

Banyaknya jumlah wisatawan tentunya membuat sejumlah aktor terkait harus benar-benar lebih meningkatkan kualitas sarana-prasarana penunjang wisatawan seperti jalan, sarana kebersihan, lahan parkir, tempat penginapan, cinderamata, dan lain sebagainya. Ini berarti perlu ada hubungan yang baik antara pengelola kebun teh dengan masyarakat sekitar kawasan wisata. Adanya hubungan yang baik dari pihak pengelola wisata kebun Teh Jamus dalam hal ini PT. Candi Loka dan masyarakat diharapkan pengembangan wisata ini mampu menunjukkan perkembangan yang optimal. Langkah menuju arah pembangunan yang seperti itu, masyarakat perlu diberikan andil dalam upaya pengembangan pariwisata di Perkebunan Teh Jamus ini. Masyarakat dituntut menjadi subjek yang selalu aktif dalam memberikan aspirasi atau masukan yang sifatnya positif terutama dalam upaya pengembangan wisata Perkebunan Teh Jamus.

Pengelolaan Perkebunan Teh Jamus ini diperlukan suatu hubungan yang baik antara pihak pengelola dengan masyarakat sekitar. Pada umumnya, hubungan yang terjadi antara pihak swasta dengan masyarakat cenderung tidak harmonis dan menjadikan masyarakat sebagai penerima dampak yang cenderung negatif

dari aktivitas yang dilakukan swasta. Misalnya dalam hal kurang dilibatkannya masyarakat dalam upaya pengembangan pariwisata tersebut. Walaupun dari adanya PT. Candi Loka ini, perekonomian masyarakat sekitar mulai ada kenaikan seperti penyerapan tenaga kerja sektor perkebunan, tenaga keamanan, pendirian lapak-lapak untuk berjualan, warung-warung, dan lain sebagainya.

Seperti yang penulis kutip dari perkataan Bapak Prb kepala Tata Usaha PT. Candi Loka :

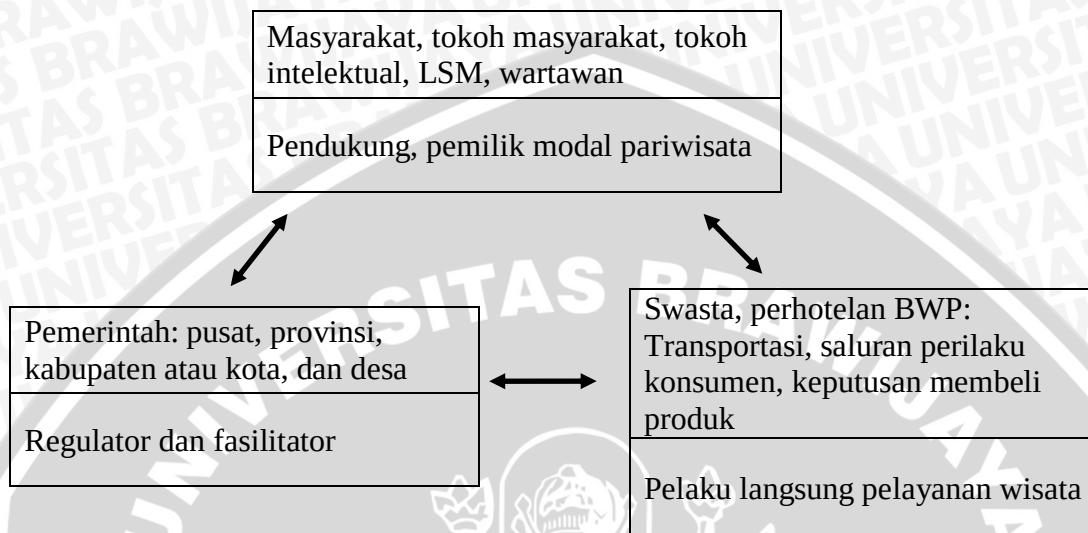
“Semenjak PT ini mengelola Kebun Teh Jamus, perekonomian masyarakat sekitar mulai meningkat, serta mengurangi pengangguran di daerah ini. Seperti dengan menjadi pekerja di sektor perkebunan, ada yang menjadi tenaga keamanan, mereka juga banyak yang berjualan disini. Mendirikan lapak-lapak, warung, maupun pedagang keliling bebas keluar masuk wilayah ini” (wawancara pada tanggal 21 Maret 2016)

Melalui adanya suatu hubungan mutualistik diharapkan aktor-aktor terkait yaitu pemerintah, pihak pengelola dan masyarakat akan mendapatkan keuntungan. Hubungan mutualistik atau mutualisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan hal ini dapat diartikan pihak yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain saling diuntungkan, dan memperoleh keuntungan yang positif dalam kehidupannya (Ritonga, 2001: 61-62). Ini mengandung artian bahwa dalam hubungan mutualistik tidak ada pihak yang saling dirugikan.

Seharusnya dalam pengembangan wisata ini, perlu pelibatan dari 3 (tiga) aktor penting yang dapat menggerakkan sistem pariwisata, yakni masyarakat, swasta dan juga pemerintah. Semua komponen tersebut harus berjalan beriringan dengan menciptakan kondisi yang bagus dalam mengembangkan sektor pariwisata. Ketika salah satu komponen bergerak sendirian, maka hasil yang

didapat tidak optimal dan sesuai target yang diinginkan (Pitana dan Gayatri, 2005:

96). Berikut bagan dari 3 (tiga) komponen tersebut:



Gambar 1. Sektor Pariwisata dalam 3 (tiga) Pilar Utama

Sumber: Pitana dan Gayatri, 2005: 96

Berdasarkan gambar diatas, sudah seharusnya perlu pelibatan dari banyak aktor dalam upaya pengembangan pariwisata. Namun, pola hubungan yang terjadi di kawasan wisata Perkebunan Teh Jamus ini belum menunjukkan hubungan yang demikian. Perlu adanya pelibatan peran masyarakat yang lebih besar untuk menciptakan hubungan yang baik antara kedua aktor (PT. Candi Loka dan masyarakat) begitu juga pemerintah. Permasalahan yang ada dalam hubungan antar aktor tersebut yaitu belum adanya peran dari masyarakat sekitar wisata dalam upaya pengembangan wisata Perkebunan Teh Jamus. Dengan adanya pemberian kewenangan kepada masyarakat seperti misal dengan pengelolaan tempat penginapan, penyediaan wahana wisata penunjang lain diharapkan kawasan wisata ini akan lebih mempunyai variasi wisata dan tentu saja semakin menambah minat pengunjung untuk mengunjunginya.

Masyarakat belum mempunyai inisiatif untuk memulai langkah melakukan kerjasama dengan pengelola Perkebunan Teh Jamus. Padahal dengan adanya pengelolaan yang bagus dari masyarakat serta swasta maka wisata ini akan semakin lebih menarik pengunjung. Apalagi dengan didukung banyaknya jumlah pengunjung wisata Perkebunan Teh Jamus seperti data yang ditunjukkan diatas, seharusnya bisa menjadi peluang yang bagus untuk menggandeng masyarakat sekitar kawasan dalam penyediaan fasilitas maupun sarana prasarana pendukung lain.

Dilain hal, pemerintah juga harus memberikan kontribusinya terhadap upaya pengembangan Perkebunan Teh Jamus ini dengan menerapkan kerjasama serta membuat aturan-aturan penunjang lainnya. Pemerintah harus menjadi fasilitator adanya hubungan yang baik antara pengelola objek wisata dengan masyarakat sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap upaya pengentasan kemiskinan melalui pemerataan pendapatan dengan perantara sektor pariwisata.

Pelibatan aktor terkait dalam penyediaan fasilitas maupun sarana dan prasarana sangat dibutuhkan demi megembangkan potensi wisata. Aktor-aktor tersebut harus mampu berjalan beriringan untuk mencapai misi pengembangan lokasi wisata ini. Sehingga kawasan wisata Perkebunan Teh Jamus akan memiliki prospek perkembangan yang baik dalam menyikapi persaingan dengan wisata lain.

Dengan banyaknya kekurangan dalam pengembangan kawasan wisata ini, menyebabkan arah pengembangan wisata seperti hanya jalan ditempat. Perlu adanya inovasi-inovasi yang bagus dalam upaya pengembangan pariwisata di

Perkebunan Teh Jamus ini. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti **“Hubungan Mutualistik antara Pemerintah Daerah, Pengelola Obyek Wisata dan Masyarakat Sekitar dalam Pengembangan Pariwisata (Studi pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi, PT. Candi Loka dan Masyarakat Desa Girikerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi).** Dengan judul ini diharapkan bisa memberikan rancangan sebuah hubungan yang baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, PT. Candi Loka dan juga Masyarakat sekitar.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di latar belakang maka rumusan masalah yang penulis ambil adalah :

1. Bagaimanakah hubungan antara pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, pengelola obyek wisata Perkebunan Teh Jamus dan masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata selama ini ditinjau dari segi potensi wisata, bentuk hubungan dan infrastruktur?
2. Bagaimanakah dampak hubungan antara pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, pengelola obyek wisata Perkebunan Teh Jamus dan masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata selama ini?
3. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi hubungan mutualistik antara pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, pengelola obyek wisata Perkebunan Teh Jamus dan masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata selama ini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ada dasarnya adalah memecahkan masalah yang telah dirumuskan (Moleong, 2004: 98). Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, pengelola obyek wisata Perkebunan Teh Jamus dan masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata selama ini ditinjau dari segi potensi wisata, bentuk hubungan dan infrastruktur.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dampak dari hubungan antara pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, pengelola obyek wisata Perkebunan Teh Jamus dan masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata selama ini.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi hubungan mutualistik antara pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, pengelola obyek wisata Perkebunan Teh Jamus dan masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata selama ini.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Publik, serta dapat dijadikan sebagai informasi pembanding bagi penelitian-penelitian yang lalu dan

sebagai bahan referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan judul dan topik sejenis.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Ngawi khususnya pada dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi, PT. Candi Loka selaku pengelola Perkebunan Teh Jamus Kabupaten Ngawi serta masyarakat sekitar Perkebunan Teh Jamus.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang merupakan rangkaian antara bab yang satu dengan lainnya. Adapun penulisan sistematika ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi diadakannya penelitian ini. Rumusan masalah dibuat dengan tujuan agar penelitian lebih berfokus pada masalah yang dibuat dan tidak melebar pada permasalahan lainnya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan landasan teori yang nantinya akan membantu peneliti dalam proses pengolahan atau analisis data. Dalam bab ini diuraikan tentang administrasi pembangunan,

good governance, simbiosis mutualistik, kemitraan, Hubungan Mutualistik dan pariwisata. Teori yang digunakan merupakan kutipan dari pendapat ahli baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan serta langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian diperoleh. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, *instrument* penelitian, keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dituangkan dalam bab I. oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bab IV merupakan langkah selanjutnya demi menganalisis topik atau fenomena yang diteliti berdasarkan teori yang telah dipaparkan dalam bab II serta metodologi penelitian dalam bab III. Bab IV berisi analisis mengenai hubungan mutualistik antara pemerintah daerah, pengelola obyek wisata dan masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata dan analisis mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam hubungan antara pemerintah daerah, pengelola obyek wisata dan masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang ditarik berdasarkan permasalahan, teori, metodologi penelitian, serta analisis topik terkait serta fakta-fakta yang berhasil ditemukan oleh penulis.

Sementara itu, saran ditulis berdasarkan adanya ketidaksesuaian antara teori serta realitas yang ada.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

Dewasa ini kita mengenal arti pembangunan dengan beragam makna. Secara umum makna pembangunan adalah adanya suatu perubahan kearah yang lebih baik untuk pencapaian tujuan yang telah terencana sebelumnya. Dasar dari administrasi yang menjadikan makna pembangunan menjadi dua hal yang saling terkait karena dalam hal ini administrasi juga merupakan suatu hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi pembangunan muncul sebagai bagian dari lahirnya konsep administrasi publik yang menghendaki adanya keteraturan dalam suatu komunitas masyarakat tertentu ataupun organisasi.

Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi. Menurut Siagian dalam Syafiie (2003), administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pelaksanaan dari administrasi memang berdasar pada hubungan antara seseorang yang saling berinteraksi. Administrasi publik muncul sebagai bagian dari perkembangan dari ilmu administrasi yang dalam perkembangannya telah banyak mengalami perubahan paradigma. Seperti adanya pergeseran paradigma

administrasi publik menjadi administrasi publik yang akhirnya dikenal sampai sekarang. Dalam masa paradigma ini, administrasi publik lebih menitikberatkan fokusnya pada paradigma pembangunan. Seperti pendapat dari Miftah Thoha (Leba, 2014) bahwa periode ini disebut sebagai paradigma pembangunan. Hal ini karena Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1970 menyatakan bahwa periode ini sebagai awal dari masa pembangunan. Dalam hal ini administrasi publik menitikberatkan fokusnya pada administrasi pembangunan.

1. Pengertian Pembangunan

Sudah akrab di telinga kita mengenai istilah pembangunan yang juga menjadi suatu fenomena pada negara-negara di dunia baik itu negara yang sedang berkembang maupun negara yang telah maju sekalipun. Tapi pada dasarnya, istilah pembangunan selalu dihubungkan dengan negara dunia ketiga yang memang sedang dalam masa-masa untuk berkembang. Secara umum, kata pembangunan adalah suatu proses perubahan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat menuju kearah perubahan yang lebih baik secara berencana dan berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat (Huraerah, 2008: 12). Bryant dan White dalam Ndraha (1990: 15-16) mengungkapkan pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama definisi tersebut :

- a. pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok (*capacity*).
- b. pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan (*equity*).
- c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang

sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).

- d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
- e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*).

Dalam melaksanakan suatu pembangunan, tidak bisa langsung dilakukan begitu saja. Dalam pembangunan membutuhkan suatu perencanaan yang matang agar dalam penerapannya bisa terarah dan memudahkan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Dalam pembangunan terdapat beberapa pendekatan yang mendasari pembangunan dilaksanakan. Neil dalam Huraerah (2008: 12-20) mengemukakan beberapa pendekatan pembangunan, yaitu:

- a. Pendekatan Kebutuhan Dasar (*Basic Needs Approach*)
Pendekatan kebutuhan dasar adalah sebagai kebijakan pembangunan, baik dalam setiap negara khususnya dan dunia pada umumnya seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh penduduknya. Terdapat 3 jenis kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap negara, yaitu: (1) konsumsi bahan-bahan pokok tertentu seperti sandang, pangan, papan; (2) pelayanan pokok seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dll; (3) hak untuk berpartisipasi dalam membuat dan melaksanakan program yang berpengaruh terhadap pengembangan pribadi.
- b. Pendekatan Pembangunan Nasional (*Social Development Approach*)
Pembangunan nasional tidak terkait dengan individu, melainkan memfokuskan pada komunitas atau pada masyarakat serta pada proses dan struktur sosial secara luas. Oleh karena itu, pembangunan sosial bersifat komprehensif dan universal. Pembangunan sosial bersifat dinamis, yakni mendorong dan meningkatkan proses pertumbuhan dan perubahan.
- c. Pendekatan Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare Approach*)
Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan manusia yang baik atau sejahtera yang wujudnya apabila masalah-masalah sosial terkendali, apabila kebutuhan-kebutuhan manusia terpenuhi, apabila kesempatan-kesempatan sosial dimaksimalkan. Jika ketiga hal tersebut telah dicapai oleh individu, keluarga atau masyarakat, maka mereka telah mencapai yang dinamakan tingkat kesejahteraan.

Konsep pembangunan akan terlaksana dengan baik apabila mempunyai aturan dan tata pelaksanaan yang sudah terencana dan matang. Diperlukan suatu aturan yang sudah disepakati bersama sebagai jalan diterapkannya suatu pembangunan pada daerah tertentu. Maka konsep administrasi dirasa cocok diterapkan pada kaidah pembangunan dewasa ini.

2. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan yang dikembangkan berasal dari disiplin ilmu yang mendahuluinya yaitu administrasi negara (Tjokroamidjojo, 1995: 1). Menurut Siagian (dalam Badri, 1988: 43) administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa, dalam pelbagai aspek kehidupan bangsa tersebut, dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam proses pembangunan, semua aspek termasuk masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Adanya suatu hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat menyebabkan pembangunan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia dimana akan terciptanya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara spesifik administrasi pembangunan mempunyai fungsi untuk perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan (kearah modernisasi pembangunan bangsa atau pembangunan sosial ekonomi) dan pelaksanaannya secara efektif (Tjokroamidjojo dalam Badri, 1988: 43). Sehingga pembangunan suatu negara akan mempunyai perencanaan yang baik dengan adanya administrasi pembangunan yang memang berfungsi untuk merumuskan

kebijaksanaan-kebijaksanaan. Pembangunan pun akan mampu di analisa terlebih dahulu demi terwujudnya pembangunan yang tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang tetapi juga generasi selanjutnya.

Menurut Tjokroamidjojo (1995), ciri-ciri administrasi pembangunan sebagai berikut :

- a. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara baru berkembang.
- b. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan (*committed*) terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaan yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, ekonomi dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik.
- c. Justru berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (*inovasi*) ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk usaha masyarakat di masa depan. Berorientasi ke masa depan.
- d. Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (*development function*) dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaan yang efektif seperti telah disebutkan terdahulu. Yang terakhir juga dapat disebutkan sebagai kemampuan dan pengendalian instrument-instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangun lebih bersikap sebagai "*development agent*".
- e. Administrasi pembangunan harus mengkaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan diberbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Dengan perkataan lain administrasi dari kebijaksanaan dan isi program-program pembangunan.
- f. Dalam administrasi pembangunan administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*change agents*).
- g. Lebih berpendekatan lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

Administrasi pembangunan seyogyanya bisa menjadi acuan dalam meningkatkan pembangunan disuatu daerah tertentu dengan berpedoman pada

aturan yang ada dan sudah disepakati sebelumnya. Untuk mencapai itu semua diperlukan konsep yang matang dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan agar tercipta kondisi pembangunan yang solid dan tetap berpedoman pada nilai-nilai dasar pembangunan. Pada dasarnya untuk mewujudkan itu diperlukan tata pelaksanaan yang baik dan bertanggung jawab sesuai pada konsep yang terkandung dalam *Good Governance*.

B. Good Governance

1. Konsep Good Governance

Menurut Bank Dunia (World Bank) yang merupakan pemrakarsa istilah *Good Governance*, definisi *good governance* adalah :

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha”. (Sukma, 2013)

Kata *good* yang berarti “baik” menurut Ananto Basuki dan Shofwan (2006: 15) dalam istilah pemerintahan mengandung dua pemahaman yaitu :

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
2. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik mengandung makna yang tinggi dalam pencapaian tujuan suatu negara, meningkatkan kemandirian bangsa, menambah efektif dan efisiennya proses pemerintahan serta dapat menjadi jalan dalam munculnya suatu

peluang usaha. Ananto Basuki dan Shofwan (2006: 15) mengatakan *Good governance* merupakan upaya untuk merubah watak pemerintahan (*government*) yang semula cenderung bekerja sendiri tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, menjadi pemerintah yang aspiratif. Sehingga masyarakat tidak lagi dianggap sebagai obyek penerima kebijaksanaan dari pemerintah saja. Akan tetapi, masyarakat juga dituntut menjadi subjek yang selalu aktif dalam memberikan aspirasi atau masukan yang sifatnya positif dalam mewarnai program-program pemerintah.

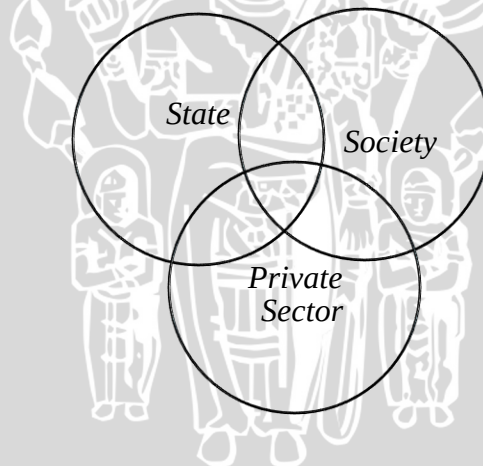
Prinsip-prinsip yang ada dalam *good governance* menjadikan negara menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis sebagai jalan bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya. Negara yang membuka peluang bagi masyarakat untuk mengeluarkan aspirasinya berarti negara tersebut adalah negara dengan sistem demokrasi. Selain itu aktor yang tidak kalah pentingnya lagi dalam konsep ini yaitu sektor swasta. Seperti yang dikatakan Hertifah (2003: 3) bahwa salah satu unsure stakeholder lain yang penting dan perlu disorot peran sertanya dalam mewujudkan *good governance* adalah sektor swasta. Menurut Hertifah dalam *good governance*, sektor swasta adalah kelompok yang sama pentingnya dengan pemerintah maupun *civil society*.

Berbicara mengenai masyarakat, Ananto Basuki dan Shofwan (2006: 16) mengungkapkan istilah “masyarakat madani” merupakan salah satu terjemahan dari istilah *civil society* (masyarakat sipil). Menurut Selo Soemardjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dimana menghasilkan kebudayaan (Ali, 2015). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan

kesatuan sosial yang mempunyai aturan tertentu dan mempunyai pola interaksi diantaranya serta adanya norma dan nilai-nilai yang berlaku demi terwujudnya suatu kerukunan hidup dan kesejahteraan sosial.

2. Hubungan Antar Unsur-Unsur *Good Governance*

Hetifah (2003: 5) mengungkapkan bahwa dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Dalam konsep *governance* terdiri dari tiga domain utama, berarti bukan hanya pemerintah saja yang ada dalam konsep tersebut, yaitu pemerintah bersama-sama dengan sektor swasta dan masyarakat. Sedarmayanti (2004: 5-6) mencoba menggambarkan hubungan antar sektor dalam *governance*.



Gambar. 2 Hubungan Antar Sektor dalam Governance

Negara, sebagai suatu unsur *governance* didalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan swasta yang bergerak diberbagai sektor informal lain di pasar. Ada suatu anggapan bahwa sektor swasta merupakan bagian dari masyarakat. Perbedaan sektor swasta dengan masyarakat yaitu sektor swasta mempunyai

pengaruh terhadap kewajiban sosial, politik dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan itu sendiri. Sedangkan masyarakat (*society*) terdiri dari individual maupun kelompok (baik yang terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. Menurut Sedarmayanti (dalam Ismawati, 2012) *Society* meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain.

Melihat perbedaan pengertian antara sektor swasta dan masyarakat diatas, dimana sektor swasta mempunyai kewajiban juga dalam hal peningkatan ekonomi. Dalam hal ini bisa berupa dalam peningkatan ekonomi melalui kerjasama dengan pemerintah seperti misalnya dalam hal pariwisata. Dalam Bab III Inpres Nomor 9 tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Kepariwisata Nasional dijelaskan mengenai Pengembangan Pariwisata. Dalam pasal 8 dicantumkan mengenai peranan swasta dalam rangka pengembangan pariwisata adalah : “Ruang lingkup peranan swasta ditujukan kepada usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan perusahaan dalam bidang kepariwisataan seperti usaha-usaha transportasi, akomodasi, intertainment dan pelayanan pada para wisatawan”.

Kemudian dalam pasal 9 yang membahas Peranan Pemerintahan Dalam Hubungan Dengan Swasta dijelaskan bahwa:

- a. Peranan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam bidang kegiatan tersebut pada pasal 8 Instruksi ini terbatas pada pembinaan dan pengarahannya, dengan cara menyediakan fasilitas-fasilitas secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Dalam hal pihak swasta tidak atau belum mampu untuk melakukan kegiatan tersebut pada pasal 8 Instruksi ini Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing, mengadakan usaha-usaha yang dianggap perlu memungkinkan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sedangkan Peran Serta Masyarakat dalam kemitraan untuk pengembangan pariwisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata pasal 30 yaitu:

1. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
2. Dalam rangka proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan.
3. Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. Prinsip-Prinsip Good Governance

Prinsip-prinsip *good governance* menjadikan kita lebih memahami apa saja yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan *good governance* dan agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan dalam isi dari *good governance*. Menurut Tjokroamidjojo (2006:48), bahwa pemahaman konsepsi pengelolaan pemerintahan yang amanah dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas (*Accountability*)
Adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak meminta pertanggungjawaban.
- b. Transparansi (*Transparency*)
Dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan mengenai kebijaksanaan pemerintah dan organisasi badan usaha.
- c. Keterbukaan (*Openness*)
Pemberian informasi secara terbuka, terhadap saran dan kritik yang dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk perbaikan.
- d. Berdasarkan hukum (*Rule of law*)
Keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut kepentingan publik dilakukan berdasarkan hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku). Jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik

yang ditempuh. Conflict resolution (penyelesaian konflik) berdasarkan hukum.

- e. Jaminan *fairness, a level playing field* (perlakuan yang adil/ perlakuan kesetaraan). Ini berlaku bagi pemerintah kepada masyarakat dalam pelayanan publik, perusahaan kepada pelanggan dan sebagainya.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut tergambar jelas bahwa sangat idealnya jika pemerintah mampu menerapkan prinsip tersebut. Penerapan *good governance* menjadikan tanda bahwa masyarakat sudah semakin pintar dalam menyoroti segala bentuk kegiatan pemerintahan. Keterbukaan informasi terutama menjadi bahan yang harus didapat oleh masyarakat untuk melihat sejauh mana pemerintah memerankan fungsinya demi kesejahteraan masyarakat.

Menyoroti tentang bergulirnya konsep *good governance*, banyak sekali pendapat baik dari ahli, badan usaha maupun yang lainnya memberikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip dari *good governance* ini seperti yang dijelaskan di www.transparansi.or.id dalam Ismawati (2012: 31-31) bahwa prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan dan pemberian kebebasan untuk mengungkapkan pendapat serta berpartisipasi secara kondusif dalam pembangunan.
- b. Tegaknya supremasi hukum
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu.
- c. Transparansi
Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas sehingga seluruh proses pemerintahan dapat dipantau.
- d. Peduli pada stakeholder
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan
- e. Kesetaraan
Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
- f. Efektifitas dan efisiensi
Proses pemerintahan yang dapat memenuhi segala kepentingan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

- g. Akuntabilitas
Keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- h. Visi strategis
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik.

Dalam pengelolaan sektor pariwisata dibutuhkan sinergisitas antara aktor-aktor terkait supaya terjadi pengembangan pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai hubungan yang baik antar para aktor tersebut. Menurut Sunaryo (2013: 82-84) dalam konsepsi penyelenggaraan pemerintah yang baik, masing-masing pemangku kepentingan juga harus memiliki paling tidak sembilan butir sifat maupun wawasan (visi) sebagai berikut:

1. Partisipatif; dalam arti semua anggota/ warga masyarakat mampu memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan, baik langsung ataupun melalui lembaga perantara yang diakui mewakili kepentingannya. Partisipasi yang luas dibangun atas kebebasan berorganisasi dan penyampaian pendapat secara konstruktif.
2. Penegakan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan; dalam arti hukum harus ditegakkan atas dasar keadilan tanpa memandang golongan dan perbedaan apapun.
3. Transparansi; dalam arti adanya aliran informasi yang bebas, serta adanya kelembagaan dan informasi yang langsung dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Disamping itu, informasi juga harus cukup tersedia untuk dimengerti dan dipantau oleh semua pihak yang berkepentingan.
4. Daya tanggap (*responsiveness*); dalam arti adanya kemampuan kelembagaan dari pemerintah untuk memproses dan melayani keluhan dan pendapat semua anggota masyarakat.
5. Orientasi pada konsensus; disini pemerintahan yang baik dituntut harus dapat menjembatani perbedaan kepentingan antarwarga masyarakat untuk mencapai konsensus yang luas dan mampu mengakomodasi kepentingan kelompok serta mencari kemungkinan dalam penentuan kebijakan dan prosedur yang dapat diterima.
6. Bersikap adil; dalam arti harus diupayakan bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan memelihara kesejahteraannya.
7. Efektivitas dan efisiensi; disini berarti setiap kinerja kelembagaan yang ada dan prosesnya harus mampu membuahkan hasil yang dapat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana (*best use*).

8. Akuntabilitas dan pertanggungjawaban; harus selalu diupayakan bahwa pengambilan keputusan pada institusi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dan segenap *stakeholders*. Kadar dan takaran akuntabilitas ini memang berbeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain serta tergantung juga pada apakah kebijakan itu diambil untuk keperluan internal atau eksternal.
9. Visi strategik; disini berarti bahwa pemimpin dan publik harus sama-sama memiliki perspektif yang luas dan jangkauan jauh ke depan tentang pemerintahan yang baik, pengembangan manusia dan kebersamaan serta mempunyai kepekaan atas apa yang diperlukan untuk pembangunan dan perkembangan bersama.

4. Pilar-Pilar *Good Governance*

Suatu bangunan tidak akan berdiri tanpa adanya suatu tiang yang kokoh, begitu juga *good governance* yang membutuhkan pilar penyangga dalam penerapannya. *Good governance* pun akan bermakna apabila keberadaannya ditopang oleh suatu lembaga yang menyangkut kepentingan publik. Dalam hal ini United Nations Development Program (UNDP) dalam Sinambela (2006: 48) merumuskan setidaknya ada tiga pihak yang berperan sebagai pelaku dalam *good governance* yaitu:

1. Negara atau Pemerintah
 - a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil;
 - b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan;
 - c. Menyediakan public service yang efektif dan accountable;
 - d. Menegakkan hak asasi manusia;
 - e. Melindungi lingkungan hidup;
 - f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik.
2. Sektor swasta
 - a. Menjalankan industri;
 - b. Menciptakan lapangan kerja;
 - c. Menyediakan insentif bagi karyawan;
 - d. Meningkatkan standart hidup karyawan;
 - e. Memelihara lingkungan hidup;
 - f. Menaati peraturan;
 - g. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat;
 - h. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM.

3. *Civil Society* atau masyarakat madani
 - a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi;
 - b. Mempengaruhi kebijakan publik;
 - c. Sebagai sarana check and balance pemerintah;
 - d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah;
 - e. Mengembangkan sumber daya manusia;
 - f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.

Ketiga pilar tersebut harus mampu menerapkan peran masing-masing sesuai dengan apa yang telah menjadi fungsi ketiganya. Ketiga pilar penopang *good governance* tersebut harus mempunyai sinergisitas ataupun kerjasama yang baik dalam meningkatkan sistem pemerintahan yang berjalan sesuai dengan kehendak/ tujuan dari bangsa ini. Termasuk juga dalam pembangunan kepariwisataan sesuai dengan yang penulis kaji dalam skripsi ini.

C. Kemitraan

Kemitraan pada dasarnya yaitu hubungan antara dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi dan saling bersepakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dari sini terlihat adanya unsur-unsur pokok kemitraan yaitu adanya dua pihak atau lebih, adanya interaksi, adanya kesepakatan, serta adanya tujuan bersama. Dari pokok-pokok itu mengindikasikan bahwa harus adanya suatu konsep yang terpola sehingga akan dapat menghasilkan suatu kesepahaman antara pihak terkait. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada atau tidak terpenuhi maka suatu kerjasama tidak akan bisa berjalan dengan semestinya.

Adanya interaksi antara dua pihak atau lebih mengindikasikan adanya suatu kepentingan-kepentingan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga timbul interaksi untuk mewujudkan kepentingan bersama. Apabila suatu interaksi tersebut tidak menyebabkan tercapainya suatu tujuan bersama maka itupun juga bukan merupakan suatu kemitraan. Ini berarti suatu interaksi tidak

semuanya merupakan suatu kemitraan. Begitu juga suatu interaksi yang hanya menyebabkan tercapainya tujuan salah satu pihak saja juga bukan merupakan suatu bentuk kemitraan. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi itu pada posisi yang seimbang, serasi, dan selaras (Pamudji, 1985: 12).

Kemitraan juga sama artinya dengan kerjasama, dimana kemitraan dapat dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari kata *partner*. Partner dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004:129).

Kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut (Sulistiyani, 2004:129):

1. Ada dua pihak atau lebih
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
3. Ada kesepakatan
4. Saling membutuhkan

Tujuan dari adanya kemitraan yaitu untuk pencapaian suatu hasil yang lebih baik dan dapat memberikan kebermanfaatan kepada pihak yang bermitra. Sehingga kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak yang

bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan ataupun merugikan salah satu pihak. Untuk menghasilkan sebuah kemitraan yang baik maka harus adanya hubungan yang harmonis antara pihak yang bermitra serta komitmen yang harus dipegang teguh berdasarkan konsep-konsep dari kemitraan tersebut.

1. Konsep Kemitraan

Kemitraan infrastruktur antara pemerintah dan pihak swasta memiliki beberapa konsep yang dimulai dari *fully public* (pemerintah secara penuh) sampai *fully private* (swasta secara penuh) diantaranya adalah:

1) *Government Department* (Dinas Pemerintah)

Merupakan metode lama dari pelayanan penyediaan infrastruktur yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah adalah pemilik fasilitas, yang bertanggung jawab untuk merancang, membiayai, membangun, dan mengoperasikan. Di Indonesia, misalnya pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Tambang Minyak Negara (Pertamina).

2) *Public Authority* (Otoritas Publik/ Pemerintah)

Didalam negara yang sedang berkembang pada umumnya otoritas pemerintah adalah untuk pelayanan publik seperti pelayanan rekening air, listrik, transportasi, dan telekomunikasi. Dalam menuju otoritas yang optimal, saat ini dilakukan komersialisasi baik melalui segi manajerial, otonomi biaya maupun pemisahan anggaran pemakaian biaya. Keinginan untuk melakukan perubahan ini bertujuan untuk mencapai efisiensi, tanggung jawab, dan untuk melakukan kesatuan tindakan/ kerjasama layaknya sebuah bisnis dari pada sebuah

kepentingan politis. Agar tujuan tersebut berhasil, otoritas pemerintah harus memiliki:

- a. Stabilitas dan manajerial yang handal dalam *mid-management* dan *professional positions*;
- b. Penyandang dana, sesuai dengan tarif yang mencakup biaya-biaya yang dibutuhkan;
- c. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan; serta
- d. Menggunakan tenaga ahli dan modal dari pihak swasta, menjalankan sistem keuangan dengan benar, member gambaran dengan jelas peran pemerintah khususnya direktur dan manajemen.

3) *Service Contract* (Kontrak Layanan)

Beberapa kontrak pelayanan infrastruktur saat ini telah banyak dilakukan antara pemerintah dengan pihak swasta, misalnya berupa pembangunan jalan, jembatan, tata kota, dan fasilitas umum. Lembaga pemerintah bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengoperasian sistem, kecuali kontrak pelayanan tertentu yang dianggap merugikan. Kompensasi kepada kontraktor biasanya berdasarkan waktu, keseluruhan biaya, dan pembayaran yang telah ditetapkan. Kontrak pelayanan umumnya dilakukan dalam periode kurang dari lima tahun.

4) *Operations and Maintenance Contract or Lease* (Pemeliharaan dan Pengoperasian Kontrak atau Sewa)

Suatu mitra usaha diharuskan mengoperasikan dan memelihara fasilitas yang dimiliki dibawah manajemen dengan mendukung pemerintah sebagai pemilik fasilitas. Pengaturan ini serupa dengan kontrak pelayanan tetapi mitra swasta harus mempunyai tanggung jawab secara penuh untuk memelihara dan mengoperasikan sistem (atau disebut juga dengan kontrak O&M) dan membuat keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Sasaran dari semua ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.

5) *Cooperative*

Responsibilitas suatu pelayanan adalah sesuatu yang tidak mencari keuntungan, sukarela, dan dapat bekerjasama. Contoh nyata dari wujud *Cooperative*, misalnya pada koperasi seperti di negara Amerika Serikat, Kanada, dan Finlandia yang telah berhasil memperluas sistem jaringan telekomunikasi sampai di daerah terpencil. Selain itu, Kenya, India, dan China yang berada diantara negara-negara sedang berkembang telah melakukan sistem manajemen pengairan/ irigasi diberbagai tempat, dan mengajak para pengguna air untuk lebih aktif melakukan irigasi disetiap wilayahnya.

6) *Lease-Build-Operate (LBO)*

Pihak pemerintah menyewakan suatu fasilitas (publik) yang dimilikinya kepada pihak swasta dalam jangka waktu tertentu, dan ketika berakhir masa kesepakatannya fasilitas tersebut dikembalikan lagi kepada pemerintah. Dalam hal ini, pihak swasta diperkenankan untuk mengambil keuntungan yang tentunya melalui proses kesepakatan dengan pemerintah.

7) *Build-Transfer-Operate (BTO)*

Pihak swasta sebagai penyandang dana dan pembangun fasilitas melakukan pergantian kepemilikan dari fasilitas milik pemerintah. Pihak swasta menyewa fasilitas untuk melakukan pengembangan dalam jangka waktu tertentu, selama mereka dapat mengoperasikan fasilitas dan bertujuan untuk memulihkan investasinya sehingga akan mendapat keuntungan dari pengguna fasilitas.

8) *Build-Operate-Transfer* (BOT)

Pihak swasta diberi kewenangan untuk membangun, mengoperasikan, dan memperoleh pendapatan dari suatu fasilitas selama jangka waktu tertentu yang disepakati dan setelah masa operasionalnya berakhir maka fasilitas tersebut diserahkan kepada pemerintah. Konsep ini tidak jauh berbeda dengan *joint venture* pada pola kompensasi.

9) *Wraparound Addition* (Penambahan Prasarana)

Pihak swasta sebagai perancang konstruksi dan penyanggah dana memperoleh fasilitas publik yang kemudian dioperasikan dalam jangka waktu tertentu atau sampai mereka mendapatkan keuntungan dan hasil yang memuaskan sesuai dengan modal yang telah diinvestasikan.

10) *Buy-Build-Operate* (BBO)

Untuk menghasilkan pendapatan dari fasilitas publik adalah dengan menjualnya ke mitra swasta dalam suatu waralaba yang bertujuan untuk merenovasi atau memperluas dan mengoperasikannya. Dalam proses penjualan dapat dilakukan negosiasi terlebih dahulu, selama negosiasi pemerintah dapat membuat perjanjian waralaba yang digunakan untuk pengendalian harga, akses, keamanan, kualitas, dan perluasan kapasitas.

11) *Build-Own-Operate* (BOO)

Pihak swasta sebagai penyanggah dana, pembangun, penyediaan, dan pengoperasi suatu fasilitas, mereka menjadi aktor pengatur biaya dan pengoperasiannya. Pihak swasta juga sebagai pemilik fasilitas dalam jangka

waktu tertentu yang memberikan biaya insentif dengan menanamkan modalnya dalam suatu fasilitas yang telah diberikan (Savas, 2000: 241).

2. Model Kemitraan

Sesuai dengan model-model yang ada, kemitraan dapat dibedakan sebagai berikut (Sulistiyani, 2004: 130) :

1. *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu
2. *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik
3. *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.

Kemitraan semu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa (Sulistiyani, 2004: 130-131).

Kemitraan yang semacam ini pernah menjadi pedoman pada pembangunan pada masa orde baru dimana pembangunan pada waktu itu mempunyai sebuah slogan yaitu “pembangunan dari dan oleh pemerintah untuk rakyat”. Rakyat sebagai penerima kebijakan dan menjadi mitra kerja pemerintah sesungguhnya tidak mengetahui apa makna dari slogan tersebut dan bagaimana penerapannya.

Kemitraan mutualistik adalah persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal. Kemitraan semacam ini menjadi dambaan setiap pihak yang melakukan kerjasama. Terutama karena kedua belah pihak akan sama-sama mendapatkan keuntungan maupun tujuan yang diinginkan. Kemitraan seperti ini juga diadopsi dari perilaku hewan dalam simbiosis mutualisme seperti perilaku kerbau dan juga burung.

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogi dari kehidupan “*paramecium*”. Dua *paramecium* melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok, atau perorangan yang memiliki kelemahan didalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing (Sulistiyani, 2004: 131).

Model kemitraan yang lain dikembangkan berdasar atas azas kehidupan organisasi pada umumnya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan atas fenomena-fenomena hubungan kerjasama antar organisasi adalah mencakup (Sulistiyani, 2004: 131) :

1. *Subordinate union of partnership*
2. *Linear union of partnership*
3. *Linear collaborative of partnership*

Kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif atau kemudian disebut subordinate *union of partnership*. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat lemah. Oleh karena kondisi demikian mengakibatkan tidak ada *sharing* dan peran atau fungsi yang seimbang.

Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus, selanjutnya disebut dengan *linear union of partnership*. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kerjasama tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/ volume usaha atau organisasi, status atau legalitas.

Kemitraan dengan melakukan kerjasama secara *linear* selanjutnya disebut dengan *linear collaborative of partnership*. Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/ legalitas, kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara *linear*, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi (Sulistiyani, 2004: 131-132).

Untuk menjalankan kerjasama memang tidak mudah, karena dalam kerjasama perlu penyatuan dua unsur atau lebih sifat suatu organisasi atau orang menjadi satu pandangan menuju cita-cita dan tujuan yang akan disepakati nanti.

Hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara aktor-aktor yang bekerjasama menjadi suatu tuntutan yang harus dilakukan sebagai jalan terciptanya kondisi kerjasama yang solid dan mampu bertahan secara kontinyu. Sehingga dalam hubungan kerjasama ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena semua aktor terlibat harus sama-sama mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut.

D. Hubungan Mutualistik

Hubungan mutualistik atau juga bisa disebut sebagai simbiosis mutualistik/ mutualisme merupakan gabungan kata yang terdiri dari simbiosis yang berasal dari bahasa Yunani 'sym' yang berarti dengan dan 'biosis' yang berarti kehidupan. Simbiosis merupakan interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Simbiosis merupakan pola interaksi yang sangat erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis (id.wikipedia.org). makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut simbion.

Kehidupan semua makhluk hidup dapat berlangsung karena adanya dukungan dari lingkungan sekitarnya. Hubungan tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan khas antar makhluk hidup seperti ini disebut simbiosis. Simbiosis dapat diartikan sebagai cara hidup bersama antara dua jenis makhluk hidup yang bersifat langsung dan erat (Saktiyono, 2006: 77).

Dalam ilmu eksakta terdapat beberapa simbiosis yang terjadi didalam hubungan antara makhluk hidup yang ada, simbiosis tersebut antara lain: simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme dan mutualisme. Simbiosis-simbiosis tersebut digunakan untuk menggambarkan hubungan antar makhluk

hidup yang mana menguntungkan ataupun merugikan bagi makhluk hidup tersebut (Arisworo, dkk, 2006: 227). Salah satu yang menjadi acuan bagi penulis adalah tentang simbiosis mutualisme atau dalam kata lain hubungan mutualistik yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terkait.

Menurut Arisworo, dkk (2006: 227) simbiosis mutualisme dapat diartikan sebagai hubungan yang saling menguntungkan antarorganisme atau antarmakhluk hidup, sedangkan menurut Saktiyono (2006: 77) simbiosis mutualisme dapat diartikan sebagai cara hidup bersama antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan.

Hubungan mutualistik atau mutualisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan hal ini dapat diartikan pihak yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain saling diuntungkan, dan memperoleh keuntungan yang positif dalam kehidupannya (Ritonga, 2001: 61-62). Menurut ilmu sosiologi, hubungan simbiosis mutualisme adalah bentuk kerja sama antar kelompok masyarakat yang bersifat saling menguntungkan. Itu artinya sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri melainkan perlu adanya interaksi maupun bantuan dengan orang lain.

Simbiosis atau simbiotik menurut Saptina, dkk (2009: 36) merupakan proses hidup secara berdampingan. Simbiosis dapat dibedakan menjadi tiga yakni:

1. Mutualistik
2. Komensalistik
3. Parasitistik

Menurut Moesa (2007: 313) simbiotik merupakan hubungan timbal balik yang saling memerlukan. Sebagai contoh pada simbiosis mutualisme adalah tindakan baik seseorang kepada orang lain maka juga akan menimbulkan kebaikan pula pada diri sendiri maupun orang lain tersebut. Hal ini perlu menjadi teladan bahwasanya manusia yang baik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain bukannya yang menimbulkan suatu kerugian.

Simbiosis mutualisme atau mutualistik adalah hubungan yang saling menguntungkan antara dua orang atau lebih. Dalam kaitannya dengan judul penelitian maka adanya hubungan yang baik antara masyarakat dan swasta dalam pengelolaan maupun pengembangan pariwisata sehingga akan berimplikasi yang baik pula pada pariwisata tersebut. Dalam simbiosis mutualistik ini, aktor-aktor yang terlibat harus saling hidup berdampingan dan mendukung satu sama lain untuk tujuan yang telah disepakati bersama sehingga terjadi sinergisitas diantaranya.

Hubungan yang baik antar aktor terkait dalam pengembangan pariwisata ini menjadi hal yang *urgent* karena dengan terjalinnya hubungan itu maka dapat berimplikasi pada meningkatnya kawasan wisata tersebut baik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan juga pendapatan pengelola wisata tersebut. Apalagi hubungan yang baik ini juga didukung oleh pemerintah, maka akan semakin memperkuat peran ketiganya dalam tujuan peningkatan perkembangan kawasan wisata.

Adanya hubungan yang baik antar aktor-aktor yang berkepentingan, dengan adanya pengadaan yang mengedepankan *transparency and competition*,

manfaat yang akan dapat diraih dalam proses pembangunan kepariwisataan menurut Sunaryo (2013: 91-92) adalah:

- a. Terjamin adanya harga pasar produk wisata yang terendah (*lowest market prices*);
- b. Meningkatkan penerimaan publik terhadap proyek kepariwisataan;
- c. Mendorong kesanggupan lembaga keuangan untuk menyediakan pembiayaan pembangunan kepariwisataan tanpa *sovereign guarantees*;
- d. Mengurangi risiko kegagalan proyek pembangunan kepariwisataan;
- e. Dapat membantu tertariknya *bidders* yang sangat berpengalaman dan berkualitas tinggi dalam lelang proyek kepariwisataan;
- f. Mencegah aparat pemerintah dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme; mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan melalui pengalangan dana swasta dalam pembangunan kepariwisataan;
- g. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat dalam tata kelola kepariwisataan;
- h. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan infrastruktur; dan
- i. Mendorong dipakainya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan daya beli pengguna jasa kepariwisataan.

Hubungan mutualistik yang terjadi dalam pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan memberikan dampak yang besar terhadap sektor-sektor lain seperti ekonomi, sosial-budaya, maupun lingkungan. Sinergisitas antara ketiga aktor utama harus selalu terjaga demi mewujudkan pengembangan kepariwisataan yang mempunyai visi yang baik kedepannya.

E. Pengembangan Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

McIntosh dalam Pendit (2002: 34) mengungkapkan “Pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya. Sedangkan pengertian pariwisata menurut WTO dalam Pitana (2009: 45): “*The activities of*

persons traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes”

(aktivitas dari orang-orang untuk bepergian dan tinggal di tempat diluar lingkungan mereka biasanya tidak lebih daripada beberapa bulan secara berurutan dalam satu tahun yang berulang-ulang, bisnis dan tujuan lainnya).

Jika mengikuti pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan pariwisata sebagai berikut :

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Secara umum, pariwisata berarti suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang baik kelompok ataupun tidak dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk tujuan menikmati keindahan tempat tersebut, pendidikan dan mendapatkan pengalaman tertentu untuk sementara waktu dan bukan menetap untuk waktu yang lama.

2. Pengembangan Parwisata

Didalam suatu kepariwisataan terdapat banyak unsur yang saling terkait satu sama lain. Dimana salah satu unsur didalam pariwisata yang mengalami perubahan maka unsur yang lain pun akan mengalami perubahan juga. Karena didalam kepariwisataan terdapat banyak usaha dan kepentingan yang satu dengan lain juga saling terkait. Pengertian pengembangan sendiri menurut Ndraha (1990: 184) berasal dari kata kembang, berarti meningkatkan atau menambah sesuatu yang sudah ada, baik kualitatif maupun kuantitatif, jadi ada sesuatu yang bertambah. Pertambahan itu sendiri adalah pembangunan.

Sedangkan Munasef (1995: 1) menurutnya pengembangan pariwisata adalah segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana dan prasarana, barang dan jasa fasilitas yang diperlukan, guna melayani kebutuhan wisatawan. Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan pariwisata adalah suatu kegiatan yang sudah terpolo dan terkoordinasi dengan baik dengan tujuan untuk menambah nilai daripada lokasi wisata demi menarik minat wisatawan dengan cara penyediaan segala bentuk fasilitas, sarana dan prasarana baik yang berbentuk jasa maupun non jasa.

Upaya pengembangan industri pariwisata daerah-daerah berkaitan erat dengan berbagai faktor. Adapun faktor-faktor tersebut menurut Hasan dalam Ismawati (2012: 43-44) antara lain :

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu kunci sukses pariwisata di Indonesia adalah *human resources development* diberbagai subsistem pariwisata tersebut. Ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan industri pariwisata terutama ketika pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan otonomi daerah. Profesionalisme sumber daya manusia merupakan suatu tuntutan dalam menghadapi persaingan global dimana sumber daya manusia yang berkualitas dalam mempunyai gagasan, inovasi dan etos kerja professional.

b. Promosi Kepariwisataaan

Upaya-upaya pengenalan potensi-potensi budaya dan alam di daerah-daerah Indonesia dilakukan dengan jalan melakukan promosi kepariwistaan. Dalam hal ini aspek kepariwisataan merupakan salah satu faktor penentu pengembangan sektor pariwisata khususnya di daerah-daerah Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa promosi memainkan peran kunci dalam kinerja masa mendatang industri pariwisata Indonesia.

c. Sarana dan Prasarana Kepariwisataaan

Motivasi yang mendorong orang untuk mengadakan perjalanan akan menimbulkan permintaan-permintaan yang sama mengenai prasarana dan sarana kepariwisataan seperti jaringan telekomunikasi, akomodasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini kesiapan prasarana dan sarana

kepariwisataan merupakan salah satu faktor penentu pengembangan industri pariwisata daerah. Terlebih ketika program otonomi daerah ditetapkan, maka masing-masing daerah dituntun untuk lebih memberikan perhatiannya pada penyediaan sarana dan prasarana kepariwisataan yang memadai dan paling tidak sesuai dengan standart internasional.

Dari penjabaran diatas, salah satu faktor yang juga penting adalah promosi kepariwisataan. Promosi sangat begitu membantu untuk menginformasikan adanya aktivitas pariwisata yang ada di suatu daerah. Dengan strategi promosi yang bagus maka minat wisatawan yang datang juga akan meningkat. Berkaitan dengan ini, langkah-langkah penting yang perlu dilakukan untuk mengembangkan strategi promosi suatu daerah yaitu :

- a. Menentukan target pasar yang akan dipengaruhi oleh kegiatan promosi yang akan dilakukan, untuk memudahkan melakukan pemilihan terhadap media promosi, bahasa yang dipakai, dan waktu-waktu wisatawan melakukan perjalanan wisata.
- b. Menetapkan kelayakan promosi yang akan dilakukan seperti jenis dan macam produksi serta anggaran yang akan digunakan.
- c. Perencanaan pembuatan promotion materials, seperti iklan dan brosur.
- d. Penentuan rencana dan jadwal promosi agar wisatawan dapat melihat langsung produk-produk pada suatu daerah tujuan wisata (Yoeti, 2006: 174).

Suatu promosi yang terencana sangat memberikan keuntungan terhadap peningkatan taraf kunjungan wisatawan. Dalam pengembangan pariwisata, diperlukan suatu perencanaan yang benar-benar matang sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Perencanaan pengembangan pariwisata menurut Hadinoto (1996: 100-101) meliputi lima maksud dasar, yaitu :

- a. Identifikasi pendekatan alternatif dari pemasaran, pengembangan, organisasi industri wisata, pelayanan pendukung, dan aktivitas.

- b. Penyesuaian terhadap yang tak tersangka yaitu mengenai kondisi ekonomi umum, situasi *supply/ demand* energi, nilai-nilai, dan pola hidup, keuntungan besar industri tersebut.
- c. Mempertahankan keunikan, yaitu: ciri khas alam dan sumber daya, kebudayaan lokal dan kehidupan tradisional, arsitektur lokal, monumen sejarah, peristiwa dan aktivitas lokal, taman dan kawasan olahraga diluar gedung, dan ciri khas destinasi yang lain.
- d. Mengkreasikan keinginan seperti: meningkatkan kesadaran akan keuntungan wisata, menciptakan citra yang jelas dan positif dari kawasan destinasi, organisasi industri pariwisata yang efektif, meningkatkan kerjasama dengan para operator individual, program efektif pemasaran, isyarat dan informasi wisata, serta maksud-maksud lain.
- e. Mencegah yang tidak diinginkan, seperti: pertentangan dan persaingan antar para operator, sikap permusuhan yang tidak ramah dari penduduk lokal terhadap pengunjung, kerusakan atau perubahan permanen yang tidak diinginkan dari ciri khas alam dan sumberdaya sejarah, kehilangan identitas budaya, pemberhentian peristiwa dan aktivitas lokal, kepadatan, kongesti dan masalah lalu lintas, polusi udara, visual, kemusiman tinggi dan faktor-faktor lain.

Pemerintah sangat berperan penting dalam penentuan suatu perencanaan pengembangan pariwisata. Pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya mampu menentukan arah pelaksanaan pengembangan ke depan. Oleh karena itu pemerintah dituntut harus mampu membuat perencanaan yang matang untuk tujuan jangka pendek maupun jangka panjang dari pengembangan pariwisata.

Selain itu masyarakat juga dituntut berperan aktif dalam pengembangan pariwisata. Karena bagaimanapun juga pengembangan pariwisata juga bergantung pada peran aktor terkait dalam mengelolanya. Apabila pengelolaannya dilakukan dengan baik dan benar, maka dampak yang ditimbulkan adalah dampak positif, tetapi apabila pengelolaannya tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang, maka dampak yang ditimbulkan adalah dampak negatif.

Secara keseluruhan, Mill (dalam Widana, 2015) membedakan dampak pariwisata sebagai berikut :

1. Dampak kondisi fisik

Dampak ini lebih melihat kondisi lingkungan fisik akibat adanya pengembangan pariwisata. Dampak yang ditimbulkan dari pengembangan pariwisata terhadap kondisi fisik, yaitu sebagai berikut:

a. Dampak positif

Secara teori, dampak pariwisata terhadap kondisi fisik adalah terpeliharanya kebersihan alam lingkungan untuk menarik datangnya wisatawan dan terjaganya keistimewaan lingkungan, seperti hutan-hutan, pantai serta pemandangan alam.

b. Dampak negatif

Adapun dampak negatif pariwisata terhadap kondisi fisik adalah lingkungan yang rusak, seperti meningkatnya kadar polusi baik air, udara, suara dan kemacetan lalu lintas, pembukaan hutan untuk ladang luas, lokasi perumahan, jalan, parkir, dan hilangnya suasana alam karena hilangnya area hutan, kehidupan satwa liar, dan kesejukan udara.

2. Dampak sosial budaya

Dampak ini seringkali disoroti sebagai dampak negatif dari perkembangan pariwisata, padahal sebenarnya pariwisata juga membawa dampak positif dalam segi sosial dan budaya. Adapun dampak positif dan negatif, yaitu sebagai berikut:

a. Dampak positif

Dampak positif pariwisata terhadap sosial budaya adalah terpeliharanya bangunan-bangunan yang menyimpan nilai-nilai budaya dan tempat-tempat yang bersejarah, terpeliharanya kebudayaan tradisional, seni, tarian, adat-istiadat dan cara berpakaian.

b. Dampak negatif

Adapun dampak negatif pariwisata terhadap sosial budaya adalah rusaknya kebudayaan dan tempat-tempat bersejarah karena ulah manusia, komersialisasi budaya, meningkatnya kriminalitas, konsumerisme masyarakat lokal, dan prostitusi, terkikisnya nilai-nilai budaya dan norma-norma masyarakat karena interaksi dengan masyarakat asing.

3. Dampak ekonomi

Secara ringkas, kegiatan pariwisata dapat memberikan dampak di bidang ekonomi khususnya mengenai seperti di bawah ini:

a. Dampak positif

Dampak positif pariwisata terhadap ekonomi seperti terbukanya lapangan pekerjaan baru, meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat, meningkatkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing, membantu menanggung beban pembangunan sarana dan prasarana setempat, dan meningkatkan kemampuan

manajerial dan keterampilan masyarakat yang memacu kegiatan ekonomi lainnya.

b. Dampak negatif

Selain dampak positif, dampak negatif pariwisata terhadap ekonomi seperti meningkatkan biaya pembangunan sarana dan prasarana, meningkatkan harga barang-barang lokal dan bahan pokok, peningkatan yang sangat tinggi tetapi hanya musiman, sehingga pendapatan masyarakat naik dan turun, dan mengalirnya uang keluar negeri karena konsumen menuntut barang-barang impor untuk bahan konsumsi tertentu.

Melalui perencanaan yang matang dan kesiapan dari aktor terkait diharapkan pengelolaan wisata akan menimbulkan dampak yang baik bagi perekonomian, sosial-budaya maupun lingkungannya. Untuk mencapai itu semua, pihak pengelola wisata yaitu sektor swasta juga harus bisa saling berdampingan dengan masyarakat sekitar dan juga aktor lain dalam pengembangan pariwisata supaya terciptanya kondisi yang bagus demi tercapainya kawasan wisata yang menarik.

Lebih jauh, Mill juga menjelaskan aktifitas pengembangan pariwisata juga berdampak pada tingkat perekonomian. Menurut Robert Cristie Mill dalam Karlengie (2015: 14-15), kegiatan pariwisata dapat memberikan dampak positif ataupun negatif di bidang ekonomi.

a. Dampak positif :

- 1) Terbukanya lapangan pekerjaan baru

- 2) Meningkatnya taraf hidup dan pendapatan masyarakat
- 3) Meningkatnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing
- 4) Membantu menanggung beban pembangunan sarana dan prasarana setempat
- 5) Meningkatkan kemampuan manajerial dan keterampilan masyarakat yang memacu kegiatan ekonomi lainnya

b. Dampak Negatif :

- 1) Meningkatkan biaya pembangunan sarana dan prasarana
- 2) Meningkatkan harga barang-barang lokal dan bahan-bahan pokok
- 3) Peningkatan yang sangat tinggi tetapi hanya musiman, sehingga pendapatan masyarakat naik turun
- 4) Mengalirnya uang keluar negeri karena konsumen menuntut barang-barang impor untuk bahan konsumsi tertentu

Dampak yang ditimbulkan dari aktifitas pengembangan pariwisata diharapkan mampu menjadi cara bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat, terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan juga. Dampak dari aktifitas pengembangan pariwisata juga timbul pada masalah sosial dan budaya. Dampak sosial menurut Cooper dalam Karlengie (2015: 12) muncul karena industri pariwisata melibatkan tiga hal, yaitu wisatawan, masyarakat setempat, dan hubungan wisatawan dan masyarakat. Dampak sosial budaya muncul apabila terjadi interaksi antara wisatawan dan masyarakat ketika :

- a) Wisatawan membutuhkan produk dan membelinya dari masyarakat disertai tuntutan-tuntutan sesuai dengan keinginannya.
- b) Pariwisata membawa hubungan yang informal dan pengusaha pariwisata mengubah sikap spontanitas masyarakat menjadi transaksi komersial
- c) Wisatawan dan masyarakat bertatap muka dan bertukar informasi atau ide, menyebabkan munculnya ide-ide baru.

3. Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Salah satu konsep pengembangan pariwisata adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*). Secara konseptual prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai seorang pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga kebermanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Sasaran utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (setempat). Konsep *Community Based Development* lazimnya digunakan oleh para perancang pembangunan pariwisata, strategi untuk memobilisasi komunitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sebagai partner industri pariwisata. Tujuan yang ingin diraih adalah pemberdayaan sosial ekonomi komunitas itu sendiri dan meletakkan nilai lebih dalam berpariwisata, khususnya kepada para wisatawan. Trend dunia global saat ini pengembangan *community based development* telah dibakukan sebagai alat dan strategi pembangunan tidak hanya terbatas di bidang pariwisata, melainkan dalam konteks pembangunan Negara,

dengan membuka kesempatan dan akses komunitas untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Community Based Development adalah konsep yang menekankan kepada pemberdayaan komunitas untuk menjadi lebih memahami nilai-nilai dan aset yang mereka miliki, seperti kebudayaan, adat istiadat, masakan kuliner, gaya hidup. Dalam konteks pembangunan wisata, komunitas tersebut haruslah secara mandiri melakukan mobilisasi aset dan nilai tersebut menjadi daya tarik utama bagi pengalaman berwisata wisatawan. Melalui konsep *Community Based Tourism*, setiap individu dalam komunitas diarahkan untuk menjadi bagian dalam rantai ekonomi pariwisata, untuk itu para individu diberi keterampilan untuk mengembangkan *small business*.

Menurut Suansri (2003) ada beberapa prinsip dari *community based tourism* yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Mengenali, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat dalam pariwisata.
2. Melibatkan anggota masyarakat dari setiap tahap pengembangan pariwisata dalam berbagai aspeknya.
3. Mempromosikan kebanggaan terhadap komunitas bersangkutan.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan.
5. Menjamin keberlanjutan lingkungan.
6. Melindungi ciri khas (keunikan) dan budaya masyarakat lokal.
7. Mengembangkan pembelajaran lintas budaya.
8. Menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia.
9. Mendistribusikan keuntungan dan manfaat yang diperoleh secara proporsional kepada anggota masyarakat.
10. Memberikan kontribusi dengan presentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh untuk proyek pengembangan masyarakat.
11. Menonjolkan keaslian hubungan masyarakat dengan lingkungannya.

Dari penjelasan diatas terlihat sekali adanya suatu perbedaan antara konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dengan pengembangan pariwisata biasa. Dimana dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lebih

menekankan pada pelibatan aktif masyarakat terhadap pengembangan pariwisata. Masyarakat menjadi aktor utama penerapan konsep ini. Dalam *community based tourism* (CBT), yang terpenting adalah pemberdayaan masyarakat lokal dalam proses pembangunan obyek dan daya tarik wisata, yang juga sebagai strategi dalam pembangunan komunitas yang berkelanjutan.

Adapun definisi CBT adalah pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat untuk masyarakat, guna membantu para wisatawan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal (*local way of life*). Dengan demikian, CBT sangat berbeda dengan pariwisata massa (*mass tourism*). Pinel dalam Utomo (2012), CBT merupakan model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal. CBT bukanlah bisnis wisata yang bertujuan untuk memaksimalkan profil bagi para investor. CBT lebih terkait dengan dampak pariwisata bagi masyarakat dan sumber daya lingkungan (*environmental resources*). CBT lahir dari strategi pengembangan masyarakat dengan menggunakan pariwisata sebagai alat untuk memperkuat kemampuan organisasi masyarakat rural/lokal.

Konsep CBT dalam Utomo (2012) mempunyai prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai *tool of community development* bagi masyarakat lokal, yakni:

1. Mengakui, mendukung dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat,

2. Melibatkan anggota masyarakat sejak awal pada setiap aspek,
3. Mempromosikan kebanggaan masyarakat,
4. Meningkatkan kualitas hidup,
5. Menjamin sustainability lingkungan,
6. Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik,
7. Membantu mengembangkan *cross-cultural learning*,
8. Menghormati perbedaan-perbedaan kultural dan kehormatan manusia,
9. Mendistribusikan keuntungan secara adil di antara anggota masyarakat,
10. Menyumbang prosentase yang ditentukan bagi income proyek masyarakat.

Meskipun menuntut banyak prasyarat dan prakondisi, pergulatan untuk menjadikan perkembangan pariwisata dunia berkelanjutan (*sustainable*) bagi negara-negara Dunia III melalui pembangunan pariwisata berbasis komunitas bukan hanya merupakan sebuah harapan melainkan sebuah peluang. Nasikum dalam Utomo (2012) memperoleh rasionalnya di dalam properti dan ciri-ciri unik yang dimilikinya, yang antara lain dan terutama meliputi paling sedikit empat hal berikut :

Pertama, oleh karena karakternya yang lebih mudah diorganisasi di dalam skala yang kecil, jenis pariwisata ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pariwisata yang bersahabat dengan lingkungan, secara ekologis aman, dan tidak menimbulkan banyak dampak negatif seperti yang dihasilkan oleh jenis pariwisata konvensional yang berskala massif.

Kedua, pariwisata berbasis komunitas memiliki peluang lebih mampu mengembangkan obyek-obyek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil, dan oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-pengusaha lokal, menimbulkan dampak sosial-kultural yang minimal, dan dengan demikian memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima oleh masyarakat.

Ketiga, berkaitan sangat erat dan sebagai konsekuensi dari keduanya, lebih dari pariwisata konvensional yang bersifat massif pariwisata alternatif yang berbasis komunitas memberikan peluang yang lebih besar bagi partisipasi komunitas lokal untuk melibatkan diri di dalam proses pengambilan keputusan dan di dalam menikmati keuntungan perkembangan industri pariwisata, dan oleh karena itu lebih memberdayakan masyarakat.

Keempat, "last but not least", pariwisata alternatif yang berbasis komunitas tidak hanya memberikan tekanan pada pentingnya "keberlanjutan kultural" (*cultural sustainability*), akan tetapi secara aktif

bahkan berupaya membangkitkan penghormatan para wisatawan pada kebudayaan lokal, antara lain melalui pendidikan dan pengembangan organisasi wisatawan.

Pembangunan pariwisata berbasis komunitas, yang terpenting adalah bagaimana memaksimalkan peran serta masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan pariwisata itu sendiri. Masyarakat diposisikan sebagai penentu, serta keterlibatan maksimal masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai kepada pelaksanaannya. Masyarakat berhak menolak jika ternyata pengembangan yang dilakukan tidaklah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Tidaklah berlebihan pariwisata berbasis masyarakat dijadikan sebagai salah satu bentuk paradigma baru pembangunan pariwisata yang mengusung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) demi pencapaian pendistribusian kesejahteraan rakyat secara lebih merata.

4. Kemitraan dalam Pengembangan Pariwisata

Kemitraan dalam pembangunan pada dasarnya mengandung hakekat keadilan dalam perolehan keuntungan dan manfaat, pembebanan biaya dan penanggungan resiko yang timbul dalam kegiatan usaha tersebut. Kemitraan, terutama kemitraan dalam pembangunan mempunyai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Kemitraan yang dikembangkan adalah kemitraan yang setara antara para pelaku sesuai dengan kemampuan kontribusinya. Kemitraan yang setara memerlukan pula pemahaman yang kuat terhadap hak dan tanggung jawab serta peranan masing-masing pelaku (Kartasasmita, 1996: 2). Dan

pelaku kemitraan dapat berasal dari pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Berbicara mengenai kemitraan, peran semua sektor sangatlah penting, tetapi peran dari pemerintah tetap sangat diperlukan. Peran pemerintah dalam kemitraan adalah :

- a. Mengembangkan kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang jelas, yang tercermin baik pada tujuan, arahan maupun indikator-indikator kebijaksanaan (*policy indicators*).
- b. Menetapkan prioritas pembangunan yang realistis dan diikuti oleh semua pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu perlu kesepakatan diantara berbagai pelaku pembangunan ini, dan karena itu perlu ada dialog-dialog.
- c. Memantapkan mekanisme komunikasi yang lancar dan transparan. Transparansi erat kaitannya dengan tingkat partisipasi dan oleh karena itu, sejak pada tahap awal mekanisme kemitraan yang transparan harus dikembangkan dan dimantapkan.
- d. Mengembangkan pilihan-pilihan atas pola-pola kemitraan yang dapat mencakup kepentingan-kepentingan yang ada diberbagai lapisan dan golongan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperan serta seluas-luasnya dalam kemitraan pembangunan.
- e. Menyiapkan rencana pengembangan kemitraan yang mencakup rencana investasi pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai bagiandari pembangunan nasional.
- f. Menyiapkan kerangka peraturan dan arahan serta pedoman yang dapat menjadi acuan terutama bagi swasta dan masyarakat dan juga menjamin kepastian usaha (Kartasmita, 1996: 2)

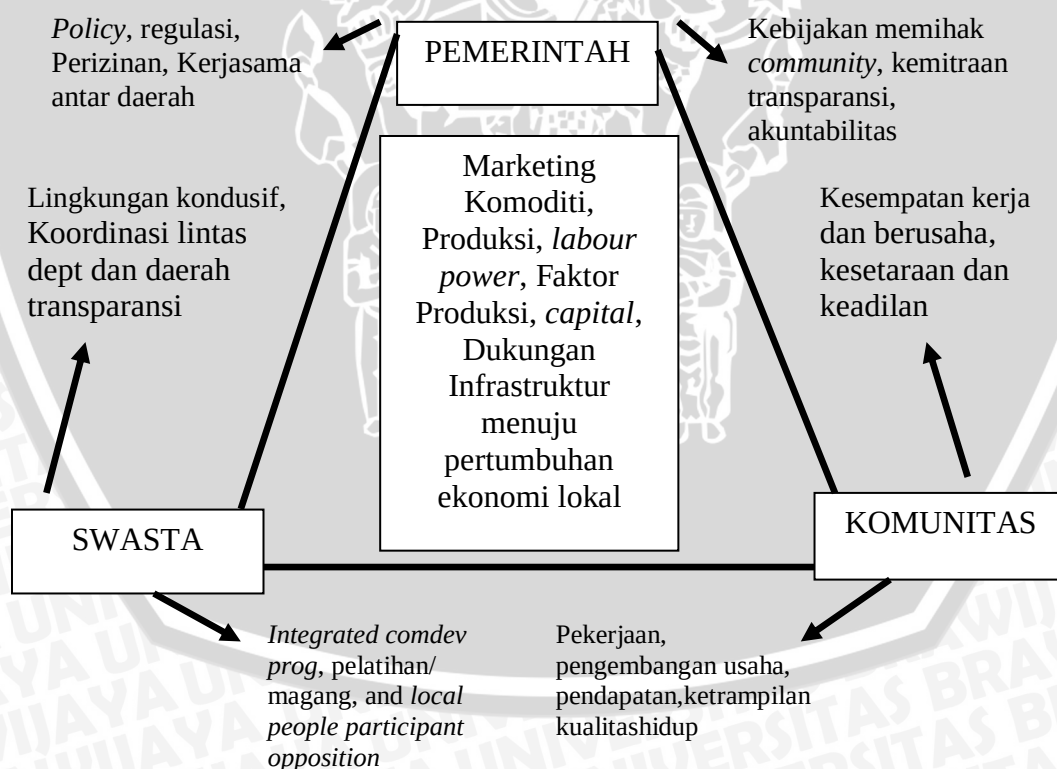
Kemitraan merupakan langkah yang harus dilaksanakan karena tidak ada pihak yang sangat berkuasa dan memiliki segalanya. Seperti yang diungkap oleh Rohmad (2009: 3) :

Pemerintah dengan segala keterbatasannya tidak dapat melakukan sendiri dalam pengembangan industri pariwisata karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pemerintah baik itu dalam bidang modal atau modal, sumber daya manusia (SDM) ataupun bidang manajemennya. Dengan demikian pemerintah harus melakukan kerjasama atau bermitra dengan aktor lain yaitu sektor privat (swasta) maupun masyarakat. Masyarakat akan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pengembangan kepariwisataan, serta dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab sebagai dan penentu pengembangan kepariwisataan

utamanya dalam skala lokal begitupun dengan sektor privat (swasta). Kebutuhan kemitraan dengan melibatkan negara, swasta dan lembaga sosial kemasyarakatan baik ditingkat lokal dan internasional menjadi kebutuhan yang *urgen* bagi pemerintah. Dalam posisi seperti ini, kebijakan negara sangat bermakna, tidak saja sebagai fungsi regulatif dalam negeri tetapi juga fungsi strategis dalam hubungan internasional. Dengan demikian, maka kebijakan pengembangan pariwisata di satu negara tidak dapat dianalisis tanpa mengkaitkan dengan kepentingan kemitraan antar pemerintah, bisnis dan masyarakat. Kebijakan kelembagaan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta, merupakan satu sistem yang saling berinteraksi dengan batasan-batasan dan aturan-aturan yang telah disepakati antar berbagai pihak yang bermitra. Dan kemitraan ini dikembangkan dalam kerangka kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak yang bermitra ini.

Pengembangan pariwisata memerlukan peranan dari semua pihak.

Hubungan kemitraan dalam pengembangan pariwisata dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3. Pola Kelembagaan Kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta

Sumber : Syahrir dalam Rohmad (2009: 3)

Berdasarkan pola kelembagaan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta diatas menunjukkan bahwa kemitraan tersebut terjalin karena masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan dan sam-sama tidak ada yang dirugikan. Serta juga relasi antara ketiga aktor tersebut juga akan memberikan kebermanfaatan bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dalam kotak di tengah, Syahrir menunjukkan adanya manfaat bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang dihasilkan dari kemitraan pemerintah, swasta, dan komunitas (masyarakat). Dalam hubungan kemitraan tersebut, masing-masing pihak memiliki peran dan manfaat sendiri-sendiri :

- b. Dalam hubungan kemitraan pemerintah dan swasta maka pemerintah berperan menyusun kebijakan dan aturan main serta menyediakan pelayanan perizinan, dan pengembangan kerjasama antara daerah dimana memungkinkan pelaku bisnis di daerah masing-masing bisa saling mengembangkan investasi. Sedangkan dari pihak swasta, kemitraan akan mendorong peran swasta untuk memberikan lingkungan kondusif daerah sebagai daerah tujuan investasi, pelatihan departemen terkait (industri, tenaga kerja, dan sebagainya), serta kebutuhan untuk transparansi dalam hubungan perizinan dan nilai tambah yang dapat diperoleh dari kegiatan ekonomi lokal.
- c. Dalam hubungan kemitraan pemerintah dan komunitas (masyarakat) maka pemerintah berperan menyusun kebijakan yang memihak kepada kepentingan masyarakat, serta melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Sedangkan bagi masyarakat sendiri kemitraan menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan usaha, dan memperoleh ruang untuk melakukan negosiasi kepada pemerintah dalam memperoleh keadilan dan kesetaraan (Rohmad, 2009: 4-5).

5. Strategi Kemitraan Pengembangan Pariwisata

Dalam suatu kemitraan diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terencana. Apabila kemitraan tersebut tidak ada perencanaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang, dikhawatirkan kemitraan tersebut tidak mampu memberikan keuntungan yang optimal sesuai dengan apa yang menjadi

kesepakatan awal. Selain itu perlunya strategi-strategi seperti yang diungkapkan oleh Hafsah (2000: 169-170) :

Upaya untuk memacu dan mengembangkan kemitraan yang tangguh dan modern sebagai antisipasi era persaingan bebas diperlukan strategi unggulan. Konsep operasional dari strategi selayaknya dapat dilakukan secara simultan oleh semua pelaku kemitraan termasuk lembaga pemerintah sebagai pembina. Terdapat beberapa strategi yang perlu dilaksanakan agar kebijaksanaan dalam kemitraan dapat diwujudkan.

Strategi yang sudah ada perlu dilaksanakan dengan pengawasan yang hati-hati dan penuh tanggung jawab. Hafsah (2000: 170-179) menjabarkan strategi-strategi yang perlu dilakukan agar kemitraan usaha dapat terwujud dan poin-poinnya sebagai berikut :

- a. Membangun Usaha Kecil dan Koperasi yang Mandiri dan Kuat.
- b. Memacu Penerapan Undang-Undang tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah tentang Kemitraan.
- c. Memantapkan kelembagaan kemitraan.
- d. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia.
- e. Menerapkan teknologi, standarisasi dan akreditasi.
- f. Membangun akses pasar dan informasi pasar.
- g. Mendorong pengembangan investasi dan permodalan.
- h. Memantapkan birokrasi pemerintah dengan lembaga pelayanan.

Berdasarkan strategi tersebut, perlunya peran pemerintah memang sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata disamping sektor swasta. Terlebih peran pemerintah dalam pengembangan SDM sebagai pengelolaan pariwisata nantinya. Peningkatan skil SDM menjadi penentu utama berjalannya suatu kemitraan dalam pariwisata. Peran pemerintah juga dibutuhkan dalam pembentukan aturan-aturan mengenai kemitraan, yang dapat menjadi landasan diberlakukannya kemitraan ke depannya.

Suatu kemitraan perlu adanya suatu kelembagaan yang mampu menaungi kemitraan-kemitraan tersebut. Dengan adanya kelembagaan yang jelas maka kemitraan itu akan mempunyai wadah untuk bernaung dan lembaga tersebut juga bisa menjadi sarana pemasaran. Pembangunan akses-akses dan sarana prasarana juga harus ditingkatkan demi kelancaran kemitraan dalam pengelolaan tempat pariwisata. Karena hal ini akan memudahkan para pengunjung untuk mengakses lokasi wisata tersebut. Strategi pemasaran yang handal juga diperlukan sebagai bahan promosi maupun pengenalan tempat wisata, dan sekaligus diharapkan akan mampu menarik investor untuk menginvestasikan modalnya pada pembangunan dan pengembangan wisata.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Hillway dalam Nazir (2005:12), penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh suatu pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Whitney dalam Nazir (2005:12) menyatakan bahwa disamping untuk memperoleh kebenaran, kerja menyelidik harus pula dilakukan secara sungguh-sungguh dalam waktu yang lama.

Penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Moleong (2006:5) mendefinisikan bahwa:

“Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila dihadapkan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi”.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Pengertian penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2009:1): “Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi". Sugiyono (2009:3) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Dari beberapa uraian diatas maka alasan penggunaan jenis penelitian ini adalah bahwa penelitian akan menggambarkan tentang hubungan mutualistik antara pengelola obyek wisata dengan masyarakat sekitar dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Ngawi khususnya pada wisata Perkebunan Teh Jamus secara sistematis dan faktual sesuai dengan keadaan di lapangan serta kecenderungan proses kerjasama dalam meningkatkan potensi wisata kebun teh tersebut.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2006:62), terdapat dua maksud tertentu yang ingin dicapai peneliti dengan menetapkan fokus penelitian, yaitu:

1. Penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus dapat membatasi bidang inkuiri. Misalnya, jika kita membatasi diri pada upaya menemukan teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak dimanfaatkan lagi.
2. Penetapan fokus untuk memenuhi kriteria inklusi atau memasukkan dan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Dari penjabaran diatas, maka fokus penelitian merupakan pokok awal yang ditetapkan dan menjadi pedoman bagi peneliti. Penetapan fokus penelitian akan lebih mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data dan dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan tempat lokasi penelitian. Berkaitan dengan

hal tersebut, maka dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menetapkan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, pengelola obyek wisata Perkebunan Teh Jamus Kabupaten Ngawi dan masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata selama ini ditinjau dari segi potensi wisata, bentuk hubungan dan infrastruktur.
2. Dampak dari hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, pengelola obyek wisata Perkebunan Teh Jamus Kabupaten Ngawi dan masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata selama ini. Dampak yang terjadi antara aktor tersebut bisa dilihat dari beberapa dampak baik positif maupun negatif. Seperti yang diungkapkan oleh Mill (dalam Widana, 2015., lihat halaman 49) adalah :
 - a. Hubungan yang berdampak pada kondisi fisik
 - 1) Dampak Positif
 - 2) Dampak Negatif
 - b. Hubungan yang berdampak pada sosial-budaya
 - 1) Dampak Positif
 - 2) Dampak Negatif
 - c. Hubungan yang berdampak pada ekonomi
 - 1) Dampak Positif
 - 2) Dampak Negatif
3. Faktor pendukung dan penghambat hubungan mutualistik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, pengelola obyek wisata Perkebunan

Teh Jamus dan masyarakat sekitar Perkebunan Teh Jamus di Desa Girikerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi

a. Faktor pendukung

- 1) Agrowisata Perkebunan Teh Jamus Masuk dalam Peta Wisata Kabupaten Ngawi
- 2) Adanya Dukungan dari Aktor terkait (Pemerintah, PT. Candi Loka, dan Masyarakat Desa Girikerto)
- 3) Adanya Pihak Penengah Kemitraan
- 4) Adanya Sifat Saling Membutuhkan antar Ketiga Aktor (Pemerintah, PT. Candi Loka, dan Masyarakat)
- 5) Potensi dan Daya Tarik wisata yang ada di Perkebunan Teh Jamus

b. Faktor penghambat

- 1) Lahan masih Menjadi Milik Pribadi (Swasta)
- 2) Status Pengelolaan Perkebunan Teh Jamus bukan untuk kawasan wisata
- 3) Belum adanya Titik Temu dalam Perencanaan Pengembangan
- 4) Mahalnya Harga Tanah di Kawasan Jamus
- 5) Sulitnya Mendapatkan Ijin untuk Pengelolaan Kawasan Jamus
- 6) Adanya Sifat Egoisme dari Pihak Swasta (PT. Candi Loka)

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian berhubungan dengan keseluruhan wilayah atau daerah dimana fenomena atau peristiwa dapat ditangkap. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ngawi. Dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Ngawi sedang

gencar-gencarnya menyuarakan Tahun Kunjungan Ngawi 2012 (*Visit Ngawi 2012*) dan juga akan menjadi dasar dalam *grand design* menuju *Visit Ngawi 2017*. Tetapi, pemerintah daerah kabupaten Ngawi kurang mempunyai andil dalam pengembangan pariwisatanya, padahal obyek wisata perkebunan Teh Jamus ini merupakan obyek wisata dengan jumlah kunjungan terbanyak di kabupaten Ngawi. Selain itu, karena peneliti berasal dari Ngawi maka diharapkan peneliti bisa mendapatkan data yang lebih akurat karena lebih mengetahui situasi dan kondisi yang ada di daerah tersebut serta mengetahui apa saja yang diperlukan daerahnya.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti akan menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti guna memperoleh data. Situs penelitian ini dilakukan di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi, PT. Candi Loka selaku pengelola Perkebunan Teh Jamus Kabupaten Ngawi dan masyarakat sekitar Perkebunan Teh Jamus yang dalam hal ini adalah Desa Girikerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi. Alasan yang menjadi pertimbangan pemilihan situs penelitian ini adalah karena Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi sebagai pihak yang menangani urusan kepariwisataan Kabupaten Ngawi, PT. Candi Loka merupakan pihak pengelola perkebunan Teh Jamus sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri No. SK-GG/HGU/DA/76 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2001 yang kemudian PT. Candi Loka memperoleh perpanjangan Hak Guna Usaha atas pengelolaan tanah Perkebunan Jamus dengan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 12/HGU/BPN/2001 yang berlaku sampai dengan 31 Desember

2026. Dan masyarakat Desa Girikerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi sebagai bagian dari pengembangan pariwisata belum mendapatkan andil atau memberikan pengaruh yang berarti pada pengembangan pariwisata Perkebunan Teh Jamus.

D. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2009:82), data adalah keterangan-keterangan suatu fakta mengenai suatu hal yang digambarkan melalui angka, simbol, kode, dan lain sebagainya. Berdasarkan sumber pengambilannya, maka data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (narasumber) baik dari individu atau perseorangan yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian maupun permasalahan yang ada. Dalam hal ini berupa hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini meliputi pengamatan dan wawancara dengan pihak Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi, PT. Candi Loka selaku pengelola Perkebunan Teh Jamus Kabupaten Ngawi serta masyarakat sekitar Perkebunan Teh Jamus. Diantaranya yang menjadi sumber data primer adalah :
 - a) Kasi Promosi Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi
 - b) Kasi Pembinaan Usaha Sarana Prasarana Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi

- c) Kepala Tata Usaha PT. Candi Loka
 - d) Kepala Divisi Agrowisata PT. Candi Loka
 - e) Kepala Desa Girikerto
 - f) Masyarakat Sekitar Perkebunan Teh Jamus
 - g) Pengunjung Objek Wisata Perkebunan Teh Jamus
2. Data Sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti dimana data tersebut merupakan hasil kegiatan orang lain, hal ini berarti peneliti tidak mengusahakan sendiri pengumpulannya secara langsung. Sumber data ini antara lain berupa Undang-Undang atau peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan serta arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian terkait. Sumber-sumber data sekunder antara lain berasal dari dinas terkait maupun dari pengelola perkebunan teh Jamus serta dokumen-dokumen dari perangkat desa terkait. Selain itu juga didapat dari studi kepustakaan (*library research*) dengan membaca dan mempelajari buku-buku, surat kabar, majalah ataupun media internet, serta memperbandingkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena data yang dihasilkan ini diusahakan dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi atau pengamatan

Suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang sedang diteliti agar memperoleh data yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data/informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada para narasumber. Hal ini peneliti bepedoman pada *interview guide* dengan sumber data primer untuk saling bertukar informasi dan pendapat melalui tanya jawab secara terstruktur untuk memperoleh kejelasan yang rinci.

Pengamatan dilakukan pada lokasi penelitian dengan melakukan pengambilan gambar melalui kamera handphone, peneliti juga melakukan pengamatan dengan panca indera sendiri sehingga peneliti akan mampu mengamati dan merasakan keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian. Peneliti juga menggunakan alat tulis menulis untuk membuat catatan-catatan terhadap setiap informasi yang dianggap penting. Peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber yang dalam hal ini terdiri dari pihak Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi, PT. Candi Loka, Masyarakat Desa Girikerto dan pengunjung Agrowisata Perkebunan Teh Jamus dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian ini. Pada saat

wawancara, peneliti dibantu dengan alat tulis menulis berupa pena dan buku, *interview guide* dan juga alat perekam suara serta kamera handphone.

2. Wawancara atau *interview*

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan, dengan maksud untuk memperoleh data berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi, PT. Candi Loka selaku pengelola, masyarakat sekitar Perkebunan Teh Jamus dan juga pengunjung obyek wisata Perkebunan Teh Jamus. Wawancara dengan narasumber diperlukan untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan fokus serta tujuan penelitian. Pada saat wawancara, peneliti menggunakan alat tulis menulis berupa pena dan buku, *interview guide* dan alat perekam suara serta kamera handphone yang berfungsi untuk membuat dokumentasi terkait proses wawancara yang berlangsung dengan para narasumber.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk mengetahui segala peristiwa yang terjadi dalam lokasi penelitian. Dokumentasi merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan informasi dan memperoleh data sekunder daerah penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari atau menggunakan laporan-laporan dan dokumen-

dokumen yang sesuai dengan obyek penelitian, guna mendukung data yang ada.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan alat-alat tertentu untuk melakukan dokumentasi dan perekaman terhadap segala apa yang terjadi selama melakukan penelitian di lokasi penelitian. Hal ini berguna untuk merekam setiap aktifitas yang peneliti lakukan dalam pengumpulan data di lapangan dan untuk memperoleh gambaran lokasi yang sebenarnya pada saat itu. Alat-alat yang penulis gunakan yaitu seperti alat tulis menulis berupa pena dan buku untuk mencatat segala informasi yang dianggap penting, peneliti juga menggunakan alat perekam suara dengan menggunakan handphone dan juga kamera ponsel tersebut yang berfungsi untuk mengabadikan setiap momen-momen yang penulis anggap penting. Peneliti juga memperoleh data-data dari pihak narasumber seperti dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti surat keputusan pengelolaan Perkebunan Teh Jamus, data pariwisata Kabupaten Ngawi, dan arah pengembangan Perkebunan teh Jamus kedepannya.

F. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan instrumen penelitian dimana instrumen penelitian adalah alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh penulis dalam proses data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti cermat dan lengkap serta sistematis sehingga mudah diolah (Arikunto, 2000:150). Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan oleh peneliti :

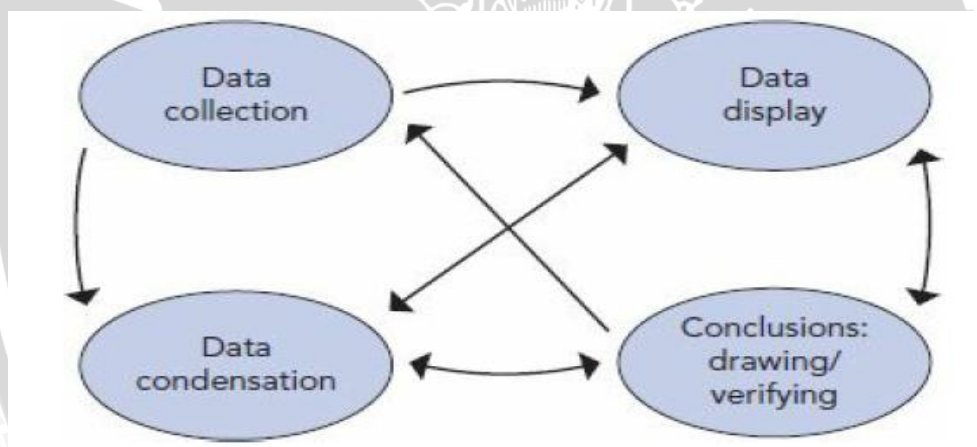
1. Peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indera untuk melaksanakan observasi/ pengamatan, wawancara pada sumber data dan obyek yang diteliti serta untuk memperoleh data dari dokumentasi. Peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi Agrowisata Perkebunan Teh Jamus dengan seksama dengan waktu yang lebih lama. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber terkait untuk memperoleh data yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Wawancara dilakukan kepada pihak Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi, PT. Candi Loka dan Masyarakat Desa Girikerto untuk memperoleh data sesuai dengan fokus yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Daftar pertanyaan (*interview guide*), daftar pertanyaan perlu dibuat supaya dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bisa tetap terarah dan menjaga relevansi terhadap masalah dalam penelitian. Daftar pertanyaan peneliti buat untuk mempermudah peneliti dalam melakukan wawancara dengan narasumber sehingga wawancara yang dilakukan akan lebih terarah sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti membedakan daftar pertanyaan untuk pihak Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi, PT. Candi Loka, Masyarakat Desa Girikerto, dan pengunjung Agrowisata Perkebunan Teh Jamus supaya mempermudah dalam pengumpulan data. Namun, daftar pertanyaan yang peneliti buat bersifat kondisional yang artinya pertanyaan yang diajukan tidak semuanya terdapat pada daftar

pertanyaan tersebut, akan tetapi terdapat pertanyaan-pertanyaan yang secara kondisional mengikuti alur perbincangan pada saat wawancara dengan narasumber dengan tujuan lebih memperluas data yang didapatkan dalam wawancara.

3. Catatan lapangan (*field note*), merupakan catatan kecil selama berada di lapangan untuk mencatat semua informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian ini. Catatan-catatan yang penulis buat selama melakukan penelitian berfungsi untuk menambah informasi yang didapatkan dan agar tidak ada data yang tertinggal selama melakukan penelitian. Peneliti menggunakan sebuah buku untuk menulis hal-hal yang di rasa penting pada saat melakukan observasi maupun wawancara kepada pihak-pihak terkait. Catatan lapangan berfungsi untuk melengkapi data yang akan dimasukkan ke dalam penyajian data yang ada di bab 4 sehingga peneliti akan mudah untuk menyusunnya.
4. Alat tulis menulis untuk membantu dalam pencatatan hal-hal penting di lapangan. Dalam melakukan pencatatan hal-hal yang dianggap penting, peneliti menggunakan sebuah buku dan pena untuk melakukan pencatatan terhadap informasi yang ada selama melakukan observasi dan wawancara. Alat-alat ini sangat membantu peneliti dalam mencatat hasil-hasil wawancara dengan narasumber sehingga semua data mampu terekam dalam catatan-catatan yang nantinya diperlukan dalam penyajian data dan pembahasan di bab 4.

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif model Miles, Huberman dan Saldana (2014). Aktivitas dalam analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian tuntas. Penelitian ini menggunakan beberapa langkah yaitu data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, memilih, selanjutnya penyajian data serta menyimpulkan data. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar 4. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman dan Saldana, 2014: 10

Komponen-komponen analisis data model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014:12) dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang valid dan akurat sesuai dengan apa yang menjadi fokus penelitian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi dan dokumentasi dilakukan untuk menunjang data yang didapat dari hasil wawancara.

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data terkait permasalahan yang ada yaitu dimulai dari pengamatan mendalam terkait semua kegiatan dan keseharian yang ada di area Perkebunan Teh Jamus. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak pengelola Perkebunan Teh Jamus. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan terhadap keseharian masyarakat di sekitar kawasan Perkebunan Teh Jamus dan juga melakukan wawancara kepada kepala desa dan masyarakat setempat. Wawancara juga dilakukan kepada pihak Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi karena sesuai dengan judul yang penulis ambil dan memiliki keterkaitan dengan Perkebunan Teh Jamus.

Adapun teknik dokumentasi dipakai untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis berupa hasil wawancara dengan pihak terkait dan kondisi di kawasan Perkebunan Teh Jamus. Selain itu peneliti juga mencari data yang berhubungan dengan profil lokasi penelitian. Teknik ini dilaksanakan dalam rangka mendapatkan data yang akurat. Berikut dokumen, arsip, catatan dan foto dalam penelitian ini : DED (*Detail Engineering Design*) dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi, RPJPD, peraturan-peraturan terkait pariwisata, Inpres Nomor 9 tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Kepariwisata Nasional, Laporan Kinerja

Kementerian Pariwisata Tahun 2014, Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Sertifikat Hak Guna Usaha Jamus, 4. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 12/HGU/BPN/2001, Data Kepariwisata Kabupaten Ngawi, catatan terkait hasil wawancara dengan narasumber, dan foto terkait kondisi Perkebunan Teh Jamus.

2. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung terus-menerus selama penelitian bahkan sebenarnya kondensasi data dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh. Kondensasi data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan rinci. Laporan lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau

polanya. Hal ini dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian dan pada tahap analisis data yang lain yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam hal ini peneliti melakukan penyederhanaan dan pengklasifikasian data terpenting dari hasil dokumen-dokumen penelitian. Dengan data yang terkumpul selama melakukan penelitian di lokasi penelitian, peneliti mengabstrakkan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan melihat penyajian-penyajian data, maka dapat diketahui dan dipahami apa yang sedang terjadi dan dapat mengambil langkah selanjutnya untuk melakukan analisis berdasarkan penyajian-penyajian data tersebut. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini berupa teks uraian.

Dalam penyajian data, peneliti menyajikan data-data yang terkumpul terkait fokus penelitian yang dilakukan di kawasan Perkebunan Teh Jamus, dan pihak-pihak terkait dalam pengembangan wisata tersebut. Disini setelah peneliti menyajikan data yang terkumpul baik melalui pengamatan, wawancara, maupun observasi, peneliti menyajikan secara menyeluruh dan terperinci untuk kemudian dianalisis dengan

teori yang relevan terkait upaya pihak-pihak terkait dalam melakukan pengembangan di Perkebunan Teh Jamus.

4. *Conclusion: Drawing/Verifying* (Menarik Kesimpulan/Verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan verifikasi data yang dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan penelitian dilakukan. Verifikasi dilakukan sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data guna mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang terjadi dalam penelitian dan selanjutnya data-data yang diperoleh harus ditinjau ulang untuk mendapatkan data yang valid.

Didalam hal ini, setelah menyajikan dan menganalisis hasil penelitian yang dilakukan dari pengelola Perkebunan Teh Jamus, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi, kepala desa Girikerto, masyarakat sekitar Perkebunan Teh Jamus dan pengunjung yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan Perkebunan Teh Jamus. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan terkait semua permasalahan yang ada dalam pengembangan kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus. Mulai dari bentuk hubungan yang terjadi selama ini, dampak yang ditimbulkan dari pengembangan wisata, serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi terbentuknya hubungan mutualistik.

Dari uraian diatas, maka dalam penyajian data dan analisa nantinya peneliti akan merujuk pada poin-poin diatas. Sehingga diharapkan skripsi yang dibuat akan lebih terarah dalam pembatasannya,

H. Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, maka perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Uji keabsahan data berguna dalam memperoleh data hasil penelitian yang valid dan tepat, salah satu uji keabsahan data adalah uji kredibilitas. Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi diskusi dengan teman sejawat (Sugiyono: 2014;270).

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengklarifikasian data dari berbagai sumber dengan teknik yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber adalah pengujian data yang di peroleh dari berbagai informan yang kemudian di kategorisasikan mana yang memiliki pandangan yang sama maupun pandangan yang berbeda sehingga di peroleh kesimpulan jenuh;
2. Triangulasi teknik, peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh dari sumber yang sama ketika melakukan wawancara selanjutnya dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui teknik observasi;
3. Triangulasi waktu, peneliti melakukan wawancara saat pagi hari, sedangkan observasi dilakukan saat sore hari untuk

memperoleh data yang valid pada kondisi atau waktu yang berbeda.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

Gambaran umum lokasi dan situs penelitian ini berisi tentang penjelasan kondisi lokasi dan situs penelitian yang penulis teliti dalam skripsi ini. Hal ini berfungsi untuk menjelaskan keadaan pada lokasi penelitian sebagai tempat dimana penelitian itu dilakukan. Adanya gambaran kondisi lokasi penelitian diharapkan bisa memberikan gambaran keadaan sebenarnya pada lokasi tersebut. Gambaran umum lokasi dan situs penelitian ini terdiri dari gambaran umum Kabupaten Ngawi, daya tarik wisata Kabupaten Ngawi, gambaran umum Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi, dan gambaran umum situs Perkebunan Teh Jamus yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Gambaran Umum Kabupaten Ngawi

a. Sejarah Kabupaten Ngawi

Nama Ngawi berasal dari kata “awi” atau “bambu” yang selanjutnya mendapat tambahan huruf sengau “ng” sehingga menjadi “ngawi”. Apabila kita perhatikan, nama-nama daerah di pulau Jawa khususnya banyak sekali nama-nama daerah yang diambil dari istilah-istilah hewan, tumbuhan, seperti : Ciawi, Waringin Pitu, Pelem, Pakis, Manggis dan lain-lain. Begitu halnya dengan Ngawi itu sendiri yang berasal dari kata “awi” yang mana disekitar pinggir Bengawan Solo dan Bengawan Madiun yang banyak tumbuh pohon “awi”. Tumbuhan “awi” atau “bambu” mempunyai arti yang sangat bernilai, yaitu :

- a) Dalam kehidupan sehari-hari bambu bagi masyarakat desa mempunyai peranan penting apalagi dalam masa pembangunan ini.
- b) Dalam agama Budha, hutan bambu merupakan tempat suci :
 - 1) Raja Ajatasatru setelah memeluk agama Budha, ia menghadiahkan sebuah “hutan yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan bambu” kepada sang Budha Gautama.
 - 2) Candi Ngawen dan Candi Mendut yang disebut sebagai Wenu Wana Mandira atau Candi Hutan Bambu (*Temple of The Bamboo Grove*), keduanya merupakan bangunan suci agama Budha.
 - 3) Pohon Bambu dalam Karya Sastra yang indah juga mampu menimbulkan inspirasi pengandaian yang menggetarkan jiwa.
 Dalam Kkawin Siwara Trikalpa karya Pujangga Majapahit “Empu Tanakung” disebut pada canto (nyayian) 6 bait 1 dan 2, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, lebih kurang mempunyai arti sebagai berikut :
 - a. Kemudian menjadi siang dan matahari menghalau kabut, semua kayu-kayuan yang indah gemulai mulai terbuka, burung-burung gembira diatas dahan saling bersahut-sahutan bagaikan pertemuan ahli kebatinan (*Esteric Truth*) saling berdebat.
 - b. Saling bercinta bagaikan kayu-kayuan yang sedang berbunga, pohon bambu membuka kainnya dan tanaman Jangga saling berpelukan serta menghisap sari bunga Rara Malayu, bergerak-

gerak mendesah, pohon Bambu saling berciuman dengan mesranya.

- 4) “Awi” atau “Bambu” dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia mempunyai nilai sejarah, yaitu dalam bentuk “bambu runcing” yang menjadi salah satu senjata untuk melawan dan mengusir penjajah yang ternyata senjata dari bambu ini ditakuti dari pihak lawan (digambarkan yang “terkena” akan menderita sakit cukup lama dan ngeri). Pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini ada juga “bambu runcing” yang dikenal dan disebut dengan “Geranggang Parakan”. Dengan demikian jelaslah bahwa “ngawi” berasal dari “awi” atau “bambu”, sekaligus menunjukkan lokasi Ngawi sebagai “desa” di pinggir Bengawan Solo dan Bengawan Madiun.

b. Hari jadi Kabupaten Ngawi

Berdasarkan penelitian benda-benda kuno, menunjukkan bahwa di Ngawi telah berlangsung suatu aktifitas keagamaan sejak pemerintahan Airlangga dan rupanya masih tetap bertahan hingga masa akhir Pemerintahan Raja Majapahit. Fragmen-fragmen percampuran menunjukkan sifat kesiwaan yang erat hubungannya dengan pemujaan Gunung Lawu (Girindra), namun dalam perjalanan selanjutnya terjadi pergeseran oleh pengaruh masuknya agama Islam serta kebudayaan yang dibawa Bangsa Eropa khususnya Belanda yang cukup lama menguasai pemerintahan di Indonesia, disamping itu Ngawi sejak jaman prasejarah

mempunyai peranan penting dalam lalu lintas (memiliki posisi Geostrategis yang sangat penting).

Dari 44 desa penambangan yang mampu berkembang terus dan berhasil meningkatkan statusnya menjadi Kabupaten Ngawi sampai dengan sekarang. Penelitian terhadap peninggalan benda-benda kuno dan dokumen sejarah menunjukkan beberapa status Ngawi dalam perjalanan sejarahnya :

- 1) Ngawi sebagai daerah Swatantra dan Naditira pradesa, pada jaman Pemerintahan Raja Hayam Wuruk (Majapahit) tepatnya tanggal 7 Juli 1358 Masehi (tersebut dalam Prasasti Canggal yang berangka Tahun Saka 1280).
- 2) Ngawi sebagai daerah Narawita Sultan Yogyakarta dengan Palungguh Bupati Wedono Monconegoro Wetan, tepatnya tanggal 10 November 1828 Masehi (tersebut dalam surat Piagam Sultan Hamengkubuwono V tertanggal 2 Jumadil Awal 1756 AJ).
- 3) Ngawi sebagai Onder-Regentschap yang dikepalai oleh Onder Regent (Bupati Anom) Raden Ngabehi Sumodigdo, tepatnya tertanggal 31 Agustus 1830 M. Nama Van Den Bosch berkaitan dengan nama “Benteng Van Den Bosch” di Ngawi, yang dibangun pada tahun 1839-1845 untuk menghadapi kelanjutan perjuangan perlawanan dan serangan rakyat terhadap penjajah, diantaranya di Ngawi yang dipimpin oleh Wirotani, salah satu pengikut Pangeran Diponegoro. Hal ini dapat diketahui dari buku “De Java Oorlog” karangan Pj. Louw Jilid I tahun 1894 dengan sebutan (menurut sebutan dari penjajah) :

“Tentang Pemberontakan Wirotani di Ngawi”. Bersamaan dengan ketetapan Ngawi sebagai Onder Regentschap telah ditetapkan pembentukan 8 Regentschap atau Kabupaten dalam wilayah Ex. Karesidenan Madiun akan tetapi hanya 2 Regentschap saja yang mampu bertahan dan berstatus sebagai Kabupaten yaitu Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan. Adapun Ngawi yang berstatus sebagai Onder Regentschap dinaikkan menjadi Regentschap atau kabupaten, karena disamping letak geografisnya sangat menguntungkan juga memiliki potensi yang cukup memadai.

- 4) Ngawi sebagai Regentschap yang dikepalai oleh Regent atau Bupati Raden Adipati Kertonegoro pada tahun 1834 (Almanak Naam Den Gregoriaanschen Stijl, Vor Het Jaar Na De Geboorte Van Jezus Christus, 1834 Halaman 31).

Dari hasil penelitian tersebut diatas, apabila hari jadi Ngawi ditetapkan pada saat berdirinya Onder-Regentschap pada tanggal 31 Agustus 1830 berarti akan memperingati berdirinya pemerintahan penjajahan di Ngawi, dan tidak mengakui kenyataan statusnya yang sudah ada sebelum masa penjajahan. Dari penelusuran 4 (empat) status Ngawi di atas, Prasasti Canggal yang merupakan sumber data tertua, digunakan sebagai penetapan hari jadi Ngawi, yaitu pada tahun 1280 Saka atau pada tanggal 8 hari Sabtu Legi Bulan Rajab Tahun 1280 Saka, tepatnya pada tanggal 7 Juli 1358 Masehi (berdasarkan perhitungan menurut Lc. Damais) dengan status Ngawi sebagai daerah Swatantra dan Naditira Pradesa.

Sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi dalam Surat Keputusannya Nomor 188.170/34/1986 tanggal 31 Desember 1986 tentang Persetujuan Terhadap Usulan Penetapan Hari Jadi Ngawi maka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 04 Tahun 1987 tanggal 14 Januari 1987, tanggal 7 Juli 1358 Masehi ditetapkan sebagai Hari Jadi Ngawi.

c. Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km², dimana sekitar 40 persen atau sekitar 506,6 km² berupa lahan sawah. Secara administrasi wilayah ini terbagi ke dalam 17 kecamatan dan 217 desa, dimana 4 dari 217 desa tersebut adalah kelurahan. Pada tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) wilayah Kabupaten Ngawi terbagi ke dalam 19 kecamatan, namun karena prasarana administrasi di kedua kecamatan baru belum terbentuk maka masih menggunakan Perda yang lama yaitu dengan 17 Kecamatan. Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur.

Topografi wilayah ini adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. Tercatat 4 kecamatan terletak pada dataran tinggi yaitu Sine, Ngrambe, Jogorogo, dan Kendal yang terletak di kaki Gunung Lawu. Adapun batas administratif Kabupaten Ngawi (lihat gambar 2.1) adalah sebagai berikut :

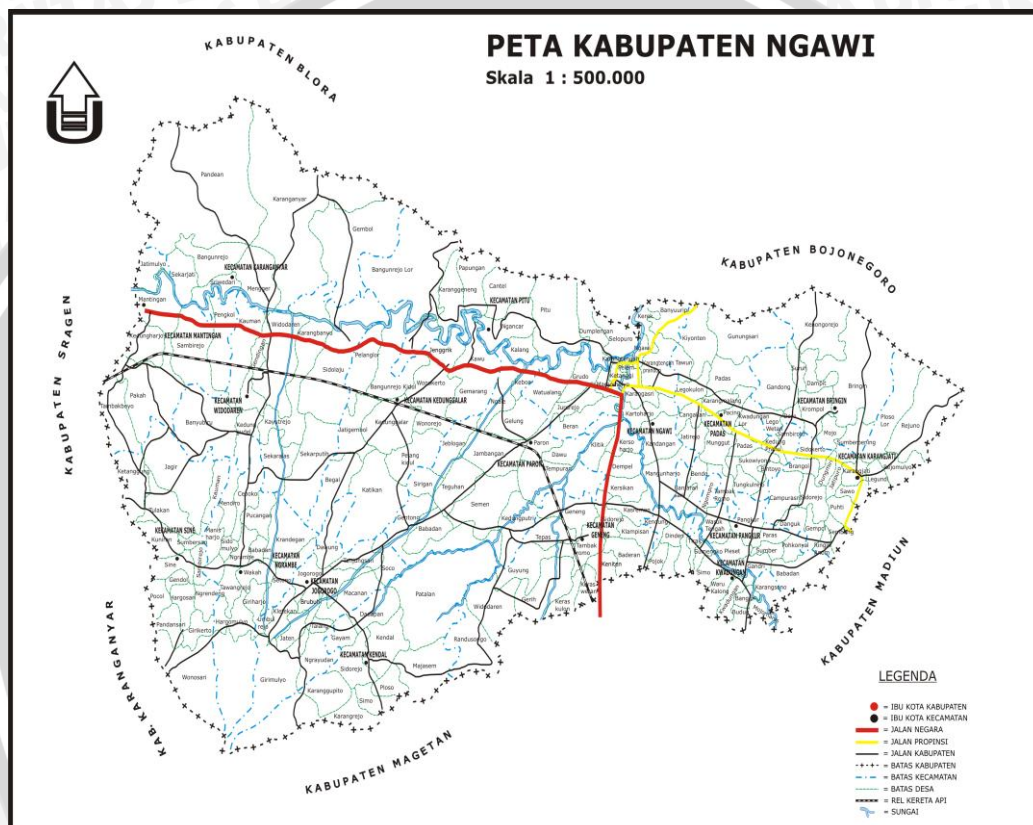
Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (Provinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro.

Sebelah Timur : Kabupaten Madiun.

Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan

Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen

(Provinsi Jawa Tengah)



Gambar 5. Peta Administrasi Kabupaten Ngawi

Melihat dari letaknya, Kabupaten Ngawi merupakan salah satu kabupaten yang menjadi pintu gerbang antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga perkembangan kabupaten ini dipengaruhi oleh kedua provinsi itu.

d. Visi dan Misi Kabupaten Ngawi

Seperti yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025, Visi Kabupaten Ngawi adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Ngawi Sejahtera dengan Bertumpu pada Potensi Pertanian, Industri dan Perdagangan yang Maju dan Berkelanjutan”

Penjabaran makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kabupaten Ngawi Sejahtera : Sejahtera dalam hal ini memiliki dimensi lahir maupun batin, dimana kondisi masyarakat Kabupaten Ngawi yang mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dengan kemandirian ekonomi secara layak dan berdaya saing. Sejahtera lahir diartikan terpenuhi segala kebutuhan lahiriah dan kehidupan ekonomi masyarakat, paling tidak terpenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan sejahtera batin diartikan terpenuhi kebutuhan rohaniah dan kehidupan keagamaan sesuai dengan keyakinan masyarakat masing-masing, seperti kekuatan iman, keleluasan ibadah dan keikhlasan dalam bertindak.

Bertumpu pada Potensi Pertanian, Industri dan Perdagangan : Bertumpu pada potensi Pertanian, Industri dan Perdagangan menunjukkan bahwa untuk mencapai masyarakat sejahtera, perlu pilihan utama pengembangan kegiatan ekonomi sesuai potensi dan keunggulan daerah, yaitu sektor Pertanian, Industri dan Perdagangan. Pertanian, Industri dan Perdagangan menjadi *core competence* dan sekaligus sebagai *activity driver* bagi Kabupaten Ngawi.

Maju dan Berkelanjutan : Maju dan Berkelanjutan dalam pengertian ini adalah tumbuh dan berkembang serta mengarah pada sistem ekonomi yang

modern tetapi tetapi peduli terhadap kontinuitas sumber daya unggulan daerah dan pelestarian lingkungan.

Untuk menunjang pencapaian visi tersebut, diperlukan suatu misi untuk lebih memperjelas rancangan kerja pemerintah daerah. Oleh sebab itu, Kabupaten Ngawi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan integrasi usaha dalam rangka optimalisasi pemberdayaan potensi pertanian, industri dan perdagangan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kemudahan mendapatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang maju dan berkualitas.
3. Mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang peduli terhadap kualitas pelayanan masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip penatausahaan pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Mengembangkan hubungan kekerabatan yang harmonis sehingga mampu menciptakan iklim kondusif bagi peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

e. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Ngawi pada tahun 2014 menurut Ngawi dalam Angka Tahun 2015 yaitu :

Tabel 3. Penduduk Akhir Tahun Kabupaten Ngawi Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2014

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Sine	22 955	22 084	45 039	103,94
Ngrambe	22 347	21 758	44 105	102,71
Jogorogo	21 394	21 199	42 593	100,92
Kendal	24 956	24 494	49 450	101,89
Geneng	26 378	26 561	52 939	99,31
Gerih	17 687	17 427	35 114	101,49
Kwadungan	13 788	13 759	27 547	100,21
Pangkur	14 038	13 962	28 000	100,54
Karangjati	23 707	23 429	47 136	101,19
Bringin	15 475	15 228	30 703	101,62
Padas	17 116	16 968	34 084	100,87
Kasreman	12 301	11 898	24 199	103,39
Ngawi	42 425	42 397	84 822	100,07
Paron	45 961	45 618	91 579	100,75
Kedunggalar	37 299	36 338	73 637	102,64
Pitu	14 821	14 443	29 264	102,62
Widodaren	38 214	37 023	75 237	103,22
Mantingan	19 710	18 747	38 457	105,14
Karanganyar	14 254	13 373	27 627	106,59
Total	444 826	436 706	881 532	101,86
Tahun 2013	449 947	465 546	915 493	96,65
Tahun 2012	448 637	464 230	912 867	96,64
Tahun 2011	448 424	463 487	911 911	96,75
Tahun 2010	439 536	455 139	894 675	96,57

Sumber : Ngawi dalam Angka 2015

Kesimpulan yang bisa diambil dari pemaparan mengenai gambaran umum kabupaten Ngawi adalah bahwasanya kabupaten Ngawi merupakan kabupaten yang berada di ujung barat dari provinsi Jawa Timur dan langsung berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Ngawi secara geografis terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi wilayah ini adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. Tercatat 4 kecamatan terletak pada dataran tinggi. Kabupaten Ngawi juga dikenal sebagai daerah pertanian karena sebagian besar wilayah Ngawi merupakan daerah pertanian.

2. Daya Tarik Wisata Kabupaten Ngawi

Kabupaten Ngawi merupakan kabupaten yang berada paling barat dari Provinsi Jawa Timur yang langsung berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Biasanya orang-orang yang mau ke Jawa Timur menyebut Ngawi sebagai pintu gerbang dari Jawa Timur. Luas wilayah kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km², dimana sekitar 40 persen atau sekitar 506,6 km² berupa lahan sawah. Kabupaten Ngawi disetiap daerahnya menyimpan banyak potensi wisata yang jika dikelola secara benar maka dapat memberikan masukan pada pendapatan daerah kabupaten Ngawi secara signifikan.

Obyek-obyek wisata yang ada di kabupaten Ngawi tersebar ke dalam 9 wilayah kecamatan yang terdiri dari wisata alam dan wisata budaya. Wisata alam di kabupaten Ngawi terdiri dari :

a. Perkebunan Teh Jamus

Obyek wisata Perkebunan Teh Jamus berada di lereng Gunung Lawu sebelah utara dengan ketinggian 1500 dpl, tepatnya di desa Girikerto Kecamatan Sine. Dengan menempuh jarak kurang lebih 40 km menggunakan berbagai jenis kendaraan kearah barat daya Kota Ngawi, di obyek wisata tersebut menyajikan pemandangan yang menawan suasana perkebunan yang tampak hijau yang berada di lereng gunung sehingga hawanya juga sejuk dan segar. Perkebunan Teh Jamus ini dikelola oleh PT. Candi Loka sebagai pengelola resmi yang memproduksi teh dan juga air mineral Jamus yang diambil dari mata air Sumber Lanang.

b. Waduk pondok

Waduk pondok merupakan pilihan yang tepat bagi para pemancing untuk menuangkan hobi dan kegemarannya. Waduk Pondok terletak kurang lebih 16 km kearah timur Kota Ngawi atau tepatnya berada di desa Dero Kecamatan Bringin. Obyek ini menawarkan keindahan panorama air dan perbukitan. Fasilitas yang ada adalah wisata air lengkap dengan perahu motor, area pemancingan dan ski air, warung apung dan jarring apung, balai wisata dan gardu pandang. Di area wisata ini setiap tahunnya masyarakat setempat mengadakan upacara tradisional yang disebut Keduk Beji.

c. Alas Ketonggo/ Pesanggrahan Srigati

Obyek wisata ini merupakan obyek wisata spiritual yang berada di desa Babadan Kecamatan Paron kurang lebih 12 km arah barat daya Kota Ngawi. Sesuai dengan apa yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, mereka mempercayai bahwa Alas Ketonggo merupakan pusat keratin lembut atau makhluk halus. Dilokasi ini terdapat petilasan Raja Brawijaya dari Kerajaan Majapahit yang disebut Pesanggrahan Srigati. Hari yang dikeramatkan adalah hari Jumat Pond an Jumat Legi pada bulan Syuro (Muharram). Pada hari-hari tersebut para peziarah melakukan tirakatan/ semedi dan sekaligus menyaksikan upacara ritual Ganti Langse atau Kelambu.

d. Wana Wisata Monumen Soerjo

Monumen Soerjo adalah sebuah tugu/ patung peringatan untuk mengenang Gubernur Jawa Timur pertama yang menjadi korban pembantaian PKI pada tahun 1948. Monumen ini berada pada kawasan hutan tepi jalan raya Ngawi-Solo Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar kurang lebih 25 km arah barat Kota Ngawi. Fasilitas yang ditawarkan yaitu hutan wisata dan tempat bermain anak-anak, ruang informasi dan tempat penjualan cinderamata serta mushola dan pasar burung.

e. Taman Rekreasi dan Pemandian Tawun

Pemandian Tawun merupakan taman rekreasi yang terkenal dengan habitat bulus dan sendang yang sumber airnya digunakan untuk menyuplai kolam renang dan mengairi sawah sekitarnya. Setiap setahun sekali diselenggarakan upacara adat yang disebut Keduk Beji. Obyek wisata ini berada di Desa Tawun Kecamatan Padas kurang lebih 7 km arah timur Kota Ngawi. Fasilitas yang ditawarkan yaitu kolam renang, sendang alam dan habitat bulus, hutan buatan dan taman-taman untuk bersantai, danau buatan dengan perahu dayang dan sarana bermain anak-anak, serta penginapan.

f. Air terjun Serambang

obyek wisata ini terletak di kereng Gunung Lawu sebelah utara, tepatnya berada di Desa Girimulyo Kecamatan Jogorogo kurang lebih 27 km kearah selatan Kota Ngawi. Air Terjun Serambang memiliki

ketinggian 40 meter dengan kondisi yang masih sangat alami. Di lokasi wisata Air Terjun Serambang juga tersedia bumi perkemahan dengan suasana alam yang indah serta lestari.

Sedangkan obyek wisata budaya yang dimiliki Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

a. Museum Trinil

Museum Trinil menyimpan koleksi fosil-fosil manusia purba yang berusia ribuan yang terkenal dengan nama *Phitecantropus Erectus*. Museum Trinil berada di Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar kurang lebih 13 km arah barat Kota Ngawi dan dapat dicapai dengan segala macam kendaraan. Fasilitas yang ada yaitu bangunan museum dan pendopo peristirahatan, tempat penjualan cinderamata, diorama fosil purbakala lengkap dengan identitas dan diskripsinya, serta mushola dan tempat bermain anak-anak.

b. Benteng Pendem Van Den Bosch

Benteng Pendem Van Den Bosch pada jaman Belanda merupakan pusat pertahanan untuk menangkal serangan musuh yang dibangun pada masa pemerintahan Van Den Bosch pada tahun 1838-1849. Benteng ini terletak di Sungai Tempuk, yaitu pertemuan antara Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun (Petunjuk Pariwisata Kabupaten Ngawi, Dinas Pariwisata Kabupaten Ngawi, 2000).

Berikut ini peta wisata yang ada di Kabupaten Ngawi :



Gambar 6. Peta Pariwisata Kabupaten Ngawi

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi, 2016

Potensi dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Ngawi berdasarkan pemaparan diatas sebenarnya memiliki potensi yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Tergantung bagaimana pihak terkait terutama pemerintah dalam mengembangkan daerah tersebut. Seperti misalnya potensi Agrowisata Perkebunan Teh Jamus yang sangat berpotensi sebagai objek wisata andalan Kabupaten Ngawi karena di dukung dengan banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung dan menduduki peringkat teratas dalam daftar jumlah pengunjung objek wisata yang ada di Ngawi. Selain itu, Jamus juga memiliki panorama alam yang sangat indah dan sejuk karena berada di lereng gunung Lawu. Sehingga kondisi ini sangat cocok untuk dikembangkan sebagai objek wisata yang berbasis alam seperti misalnya agrowisata.

3. **Gambaran Umum Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi**

a. **Dasar Hukum dan Kedudukan**

Dasar hukum pendirian Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- 2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2008.

Sedangkan kedudukan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi berada di pusat kota Ngawi tepatnya di Jl. Teuku Umar Nomor 12 Ngawi.

b. **Visi dan Misi**

1) **Visi**

“Terwujudnya Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang dapat mensejahterakan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemandirian, sportifitas, nilai-nilai agama dan budaya lokal yang berwawasan lingkungan serta berbasis pembangunan pedesaan”.

2) **Misi**

- 1) Mewujudkan pemuda yang produkti, prestatif, inovatif dan mandiri.

- 2) Mewujudkan olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat.
- 3) Mewujudkan budaya lokal yang berkualitas dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
- 4) Mewujudkan Pariwisata Daerah yang berwawasan lingkungan yang berorientasi kepada pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- 5) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengembangan bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Ngawi.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang ditindak lanjuti dengan menerapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi tugas pokok dan fungsi organisasi adalah sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2) Fungsi Organisasi

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
- c) Pembinaan dan pelayanan tugas di bidang bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
- d) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas, dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Struktur Organisasi

- 1) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata pada pasal 6 disebutkan susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang terdiri dari :
 - a) Kepala
 - b) Sekretariat
 - c) Bidang Kepemudaan
 - d) Bidang Keolahragaan
 - e) Bidang Kebudayaan
 - f) Bidang Pariwisata
 - g) Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
 - h) Kelompok Jabatan Fungsional

- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas
- 3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, f masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- 4) Adapun struktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Sekretariat :

- 6) Penyusunan perencanaan program dan pelaporan
- 7) Pengelolaan administrasi keuangan
- 8) Penelolan administrasi kepegawaian
- 9) Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan dokumen dan rumah tangga
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahkan :

- 11) Sub Bagian Perencanaan
- 12) Sub Bagian Keuangan

13) Sub Bagian Umum

b) Bidang Kepemudaan

Bidang kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di bidang kepemudaan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bidang Kepemudaan :

14) Penyusunan perencanaan dalam lingkup tugas di bidang kepemudaan

15) Penyusunan dan penyebarluasan pedoman/ petunjuk penyelenggaraan kegiatan kepemudaan

16) Pelaksanaan program kepemudaan

17) Peningkatan kerjasama dengan badan yang bergerak di bidang pembinaan kepemudaan

18) Penyusunan laporan tentang pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan di bidang kepemudaan

19) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan di bidang kepemudaan

20) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kepemudaan membawahkan :

21) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Pemuda

22) Seksi Pembinaan Prestasi

c) Bidang Keolahragaan

Bidang keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di bidang keolahragaan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bidang Keolahragaan :

23) Penyusunan perencanaan dalam lingkup tugas di bidang keolahragaan

24) Penyusunan dan penyebarluasan pedoman petunjuk penyelenggaraan kegiatan keolahragaan

25) Pelaksanaan program keolahragaan

26) Peningkatan kerjasama dengan badan yang bergerak di bidang keolahragaan

27) Pelaksanaan investasi lembaga yang bergerak di bidang keolahragaan

28) Penyusunan laporan tentang pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan di bidang keolahragaan

Bidang Keolahragaan membawahkan :

29) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga

30) Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga

d) Bidang Kebudayaan

Bidang kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bidang Kebudayaan :

31) Penyusunan perencanaan dalam lingkup tugas di bidang kebudayaan

32) Penyusunan dan penyebarluasan pedoman petunjuk penyelenggaraan kegiatan kebudayaan

33) Pelaksanaan program kebudayaan

34) Peningkatan kerjasama dengan badan yang bergerak di bidang kebudayaan

35) Pelaksanaan investasi lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan

36) Penyusunan laporan tentang pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan di bidang kebudayaan

37) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan di bidang kebudayaan

38) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kebudayaan membawahkan :

39) Seksi Pembinaan Seni dan Budaya

40) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Benda Bersejarah dan Nilai Tradisional.

e) Bidang Pariwisata

Bidang pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bidang Pariwisata :

- 41) Penyimpanan bahan dan menyusun petunjuk teknis untuk pembinaan serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan pariwisata
- 42) Penyelenggaraan fasilitas di bidang usaha sarana pariwisata, pengembangan dan promosi wisata
- 43) Pelaksanaan pembangunan pariwisata
- 44) Penyusunan laporan tentang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pariwisata
- 45) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pariwisata membawahkan :

- 46) Seksi Pembinaan Usaha Sarana Wisata dan
- 47) Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata

f) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit pelaksana teknis dina (UPTD) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

g) Kelompok Jabatan Fungsional

48) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan keahlian dan atau keterampilannya

49) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan atau keterampilannya

50) Kelomppok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

51) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan dalam keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Berikut bagan Struktur DInas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata :



Gambar 7. Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Ngawi

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi, 2016

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pariwisata yang ada di Ngawi yang ditangani oleh bidang pariwisata dalam dinas tersebut. Bidang pariwisata ini berfungsi untuk melakukan pengembangan dan menemukan potensi-potensi tersembunyi dari wisata-wisata yang ada di Ngawi yang kemudian dikembangkan dengan melakukan pemugaran dan penambahan sarana-prasarana sehingga nantinya objek wisata tersebut memiliki daya tarik lebih dan mampu menambah pendapatan daerah serta mengurangi kesenjangan ekonomi di sekitar kawasan tersebut.

4. **Gambaran Umum Situs Perkebunan Teh Jamus**

a. Sejarah Perkebunan Teh Jamus

Perkebunan Teh Jamus merupakan kebun teh peninggalan kolonial Belanda. Yang menjadi keunikan kebun teh ini adalah usia tanamannya yang berusia ratusan tahun dan masih terjaga hingga sekarang, walaupun pihak pengelola juga melakukan beberapa penyemaian tanaman baru guna menjaga produktifitas daun tehnya. Akan tetapi pihak pengelola juga masih mempertahankan pohon-pohon teh yang sudah berusia ratusan tahun tersebut karena dipercaya semakin tua umur teh maka kualitas rasa dari teh tersebut semakin baik.

Terjaganya kualitas dan khasiat kebun teh Jamus serta hijaunya daun-daun teh yang ada menyimpan sejarah yang panjang dalam perjalanannya. Berikut ini perjalanan Perkebunan Teh Jamus :

- 1) Perkebunan Jamus dahulu dari tanah negara ex. hak Erfpacht Verponding Nomor 722, 723, 787 dan 2555 seluas 478,20 Ha, yang menurut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 30 Juni 1973 tercatat atas nama NV. Cultuur My Jamus to Batavia dan hak Erfpacht tersebut telah berakhir masa berlakunya sejak tanggal 7 Februari 1950 sehingga sejak saat itu tanah perkebunan Jamus kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
- 2) Perkebunan Jamus terletak di lereng sebelah utara Gunung Lawu, semula dirintis oleh seorang pengusaha Belanda bernama Van Der Rappard yang lahir pada tahun 1826.

- 3) Tahun 1866, Perkebunan Jamus oleh Van Der Rappard mulai ditanami Teh dan pada tahun 1910 Van Der Rappard meninggal dunia.
- 4) Kemudian pengelolaan kebun Jamus diteruskan oleh anaknya yang bernama H. M. Ridder Van Rappard, dan pada akhirnya dijual kepada NV. GEOWEHRIJ pada tahun 1929. Pada tahun 1930 NV. GEOWEHRIJ membangun pabrik pengelolaan teh.
- 5) Dalam Perang Dunia II Pemerintah Jepang mengambil alih Perkebunan Jamus dan tanaman teh dibakar diganti dengan tanaman tales untuk memenuhi kebutuhan Jepang.
- 6) Tahun 1945, setelah ditinggal Jepang kebun tidak ada yang mengelola sehingga tanaman teh tumbuh kembali dan hasilnya diambil oleh rakyat. Sewaktu peristiwa Madiun tahun 1948, orang-orang PKI mulai ada yang bertempat tinggal di kebun Jamus.
- 7) Tahun 1952, Kebun Jamus dikelola oleh NV. TANI dan pada tahun 1953 diganti oleh NV. PANCA ARGA yang akhirnya mengalami kebangkrutan. Kemudian pengelolaan kebun diambil alih oleh Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI) dan pada tahun 1957 perkebunan diberi nama Jamus Baru. Kebun Jamus kondisinya menurun dan rusak sampai meletusnya G.30.S/PKI pada tahun 1965.
- 8) Tahun 1966 dikuasai oleh KODAM VIII Brawijaya yang pengelolaannya diserahkan pada KOREM-081 Madiun, dan sejak

tanggal 1 April 1973 Kebun Teh Jamus pengelolaannya diserahkan kepada PT. CANDI LOKA sampai sekarang.

- 9) Tahun 1976 PT. CANDI LOKA memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah perkebunan Jamus seluas 478,20 Ha dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. SK-66/HGU/DA/76 tanggal 8 November 1976 dan ekspirasi tanggal 31 Desember 2001.
- 10) Tahun 2001, PT. CANDI LOKA memperoleh perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) atas pengelolaan tanah Perkebunan Jamus dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 12/HGU/BPN/2001 tanggal 26 Juli 2001 dengan ekspirasi tanggal 31 Desember 2026.

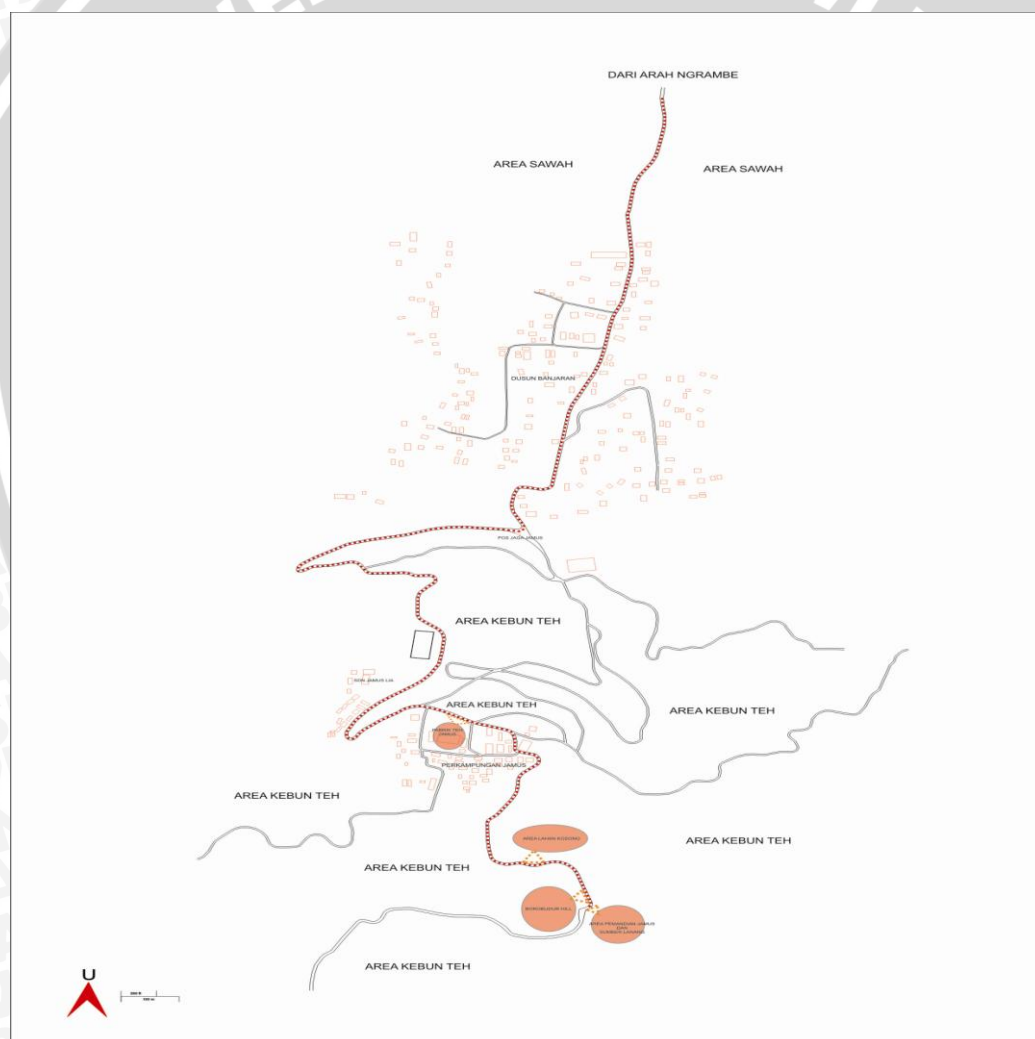
b. Lokasi Perkebunan Teh Jamus

Secara administrasi, perkebunan teh Jamus terletak di Desa Girikerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Jaraknya kira-kira 42 kilometer di sebelah barat daya Kota Ngawi. Kebun teh Jamus berada di lereng Gunung Lawu yang bisa juga disebut sebagai dinding pembatas antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lokasinya yang berada di lereng gunung menyebabkan suasana di Perkebunan Teh Jamus sangat sejuk dan memiliki pemandangan yang menakjubkan. Hamparan teh nan hijau dan luas semakin menambah keeksotisan dari Agrowisata ini.

Perkebunan teh ini merupakan peninggalan Kolonial Belanda tahun 1886, pertama kali dikembangkan oleh pengusaha negeri Kincir Angin, Van der Rappart. Kemudian mengalami pergantian pengelola beberapa kali, sampai

akhirnya mulai tahun 1973 hingga kini dikelola oleh swasta, PT Candi Loka. Manajemen Candi Loka merupakan pengelola ke-13. Kebun Teh Jamus dikelola berdasarkan SK Hak Guna Usaha (HGU) terbaru No. 12/HGU/BPN/2001 dengan luas areal 478,2 hektar.

Akses jalan menuju kawasan Jamus juga terbilang mudah dengan kondisi jalan yang sudah baik. Hal ini juga menjadikan kawasan Jamus menjadi tempat pariwisata di Kabupaten Ngawi dengan jumlah kunjungan terbanyak.



Gambar 8. Peta Akses Perkebunan Teh Jamus

Sumber : Laporan Akhir Perencanaan Pengembangan Kebun Teh Jamus Tahun Anggaran 2011 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi

c. Kondisi Objek Wisata

Kebun teh Jamus sebenarnya bukan kawasan yang dikembangkan untuk daerah wisata. Di kawasan wisata ini tidak ada *cottage*, losmen atau penginapan apalagi hotel berbintang, begitu juga dengan fasilitas pariwisata lainnya. Namun, Jamus tetaplah kawasan yang menarik dikunjungi. Keberadaan kebun teh dan panorama alam di tempat ini menjadikan Jamus nyaman untuk dikunjungi. Jamus menjanjikan nuansa alami pegunungan, sehingga cocok untuk berpetualang.

Daya tarik Jamus adalah keberadaan perkebunan teh. Perkebunan ini tepat terhampar di lereng utara Gunung Lawu. Dari kejauhan, perkebunan teh tampak hijau menyebar di beberapa bukit yang subur. Tanaman teh tumbuh di lereng bukit membentuk lingkaran-lingkaran dari bawah ke atas. Diantara bukit terdapat jalan berbatu-batu yang menghubungkan bukit satu dengan lainnya. Jalan ini digunakan para pekerja untuk mengangkut hasil kebun. Di tengah kebun berdiri pabrik teh telah ada sejak jaman kolonial Belanda. Pabrik ini tidak terlalu besar dan terkesan sudah tua. Di sekitar pabrik berdiri rumah-rumah yang dihuni para pekerja. Sedang di dekat pabrik, terdapat dataran dengan sebuah tanaman bunga kanthil cukup besar. Diameter tanaman ini mencapai 90 cm dan kehadirannya tidak hanya memberi keteduhan, tetapi juga aroma bunga kenanga yang harum dan khas. Di tempat itu biasa digunakan para pecinta alam dan pelajar untuk berkemah.

Sekitar 300 meter dari pabrik terdapat air terjun. Untuk menuju ke air terjun, pengunjung harus berjalan kaki menyusuri jalanan yang berbatu dan sedikit menanjak kemudian menuruni tebing sedalam 30 meter. Tidak jauh dari air terjun,

pengunjung bisa melakukan jogging, ataupun mandi di sungai dengan air dingin dan bersih dari air terjun. Setelah menyusuri tebing, pengunjung bisa melanjutkan perjalanan ke kolam renang “Sumber Lanang”. Kolam ini masih berada di sekitaran kaki bukit. Berjarak sekitar 300 meter dari air terjun dan dihubungkan dengan jalan tanah yang datar. Kolam renang disuplai dengan air gunung yang mengalir sepanjang tahun.

Tidak jauh dari kolam renang, terdapat bukit dengan puluhan anak tangga. Di atasnya tumbuh tanaman teh setinggi badan orang dewasa yang kabarnya berusia ratusan tahun karena sudah ada sejak pertama kali kebun teh ini dikembangkan. Meski bukan puncak yang tertinggi, pengunjung bisa melihat pemandangan secara bebas dari bukit ini. Di sebelah utara, terdapat pemandangan berupa lereng gunung. Sesekali terlihat pula puncak bukit yang berada lebih rendah dari kawasan ini. Lebih jauh lagi, pengunjung bisa menyaksikan lembah subur yang terhampar puluhan kilometer di sebelah utara Gunung Lawu. Dari atas bukit ini pula, pengunjung bisa menikmati pemandangan ke arah selatan, berupa lereng puncak Gunung Lawu yang ditumbuhi hutan pinus yang terkadang pada waktu-waktu tertentu, lereng tersebut diselimuti kabut tipis. Kawasan Jamus sendiri berada pada ketinggian antara 700-1500 meter diatas permukaan laut. Oleh karena itu, suhu udara di kawasan ini selalu sejuk. Angin segar sepoi-sepoi selalu berhembus di sana.

d. Potensi Wisata

Kawasan Objek wisata Perkebunan Teh Jamus ini menawarkan beberapa atraksi wisata yang menarik minat minat pengunjung. Atraksi-atraksi wisata yang ditawarkan Objek wisata Perkebunan Teh Jamus ini antara lain :

1) Pembibitan Tanaman Teh Dan Aneka Tanaman

Luas area pembibitan teh di kawasan obyek wisata Jamus ini adalah sekitar 1 Ha yang sudah dilengkapi dengan atap khusus (paranet). Pembibitan berbagai jenis tanaman dan bunga-bunga ini merupakan unit usaha aneka pembibitan tanaman Koperasi Karyawan Sumber Candiloka. Lahan perkebunan yang berada di ketinggian 800 hingga 1.200 mdpl (meter di atas permukaan laut) ini, tergolong jenis andosol dan regosol. Curah hujan rata-ratanya 2.500 mm/tahun dengan suhu berkisar 18-20 derajat celcius serta kelembaban 80-90 persen. Produk utama perkebunan teh Jamus adalah Teh Hijau yang berasal dari tanaman teh varietas lama (asamica dan chin, red). Produk basah mencapai 10 ton perhari.



Gambar 9. Panorama Perkebunan Teh Jamus

2) Grojokan Songo Tuk Pakel

Grojokan Songo Tuk Pakel merupakan suatu pemandangan air mengalir sepanjang hampir 25 meter lebar 3 meter mengalir deras lewat bebatuan yang tertata alami bentuk seperti tangga tidak beraturan dan berlekuk sangat bagus dan indah. Pinggiran grojokan pepohonan yang rindang asri dan tidak membosankan untuk dipandang; mata dan pikiran terasa benar-benar segar. Di sekitar grojokan daun-daun teh yang masih dan segar siap dipetik.



Gambar 10. Grojokan Songo Tuk Pakel

3) Grojokan Kedung Putri

Grojokan Kedung Putri merupakan pemandangan air mengalir lain yang menarik untuk dinikmati keindahannya selain Grojokan Songo Tuk Pakel. Airnya berasal dari Sumber Mata Air Sawahan dengan suara gemuruh air dan pesona air yang sangat bagus.



Gambar 11. Grojokan Kedung Putri

4) Bumi Perkemahan "Kantil Idaman"

Bumi Perkemahan Kantil Idaman adalah area terbuka yang meliputi luasan sebesar 0,7 Ha dengan kapasitas hingga 1000 peserta kemah. Bumi perkemahan ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti masjid, MCK dan tempat api unggun dibawah 3 pohon kantil yang telah berusia lebih dari 1 abad (tahun 1881-sekarang =135 tahun). Dari Lokasi ini dapat terlihat pucuk-pucuk pinus dan hamparan persawahan serta tanaman teh yang tertata indah bak permadani.



Gambar 12. Bumi Perkemahan "Kantil Idaman"

5) Panorama Gardupolo

Di lokasi Gardupolo ini kabarnya akan di bangun kolam renang, game area, camping ground, cafe, dan lain-lain.



Gambar 13. Panorama Gardupolo

6) Borobudur's Hill

Salah satu bukit yang tertutup pohon teh di kawasan Perkebunan Teh Jamus menjadi obyek wisata menarik, karena bentuknya yang menyerupai candi Borobudur, sehingga dikenal sebagai "Borobudur's Hill" atau Bukit Borobudur. Bukit setinggi 35,4 meter tersebut dengan luas areal 3,54 ha, ditumbuhi 35.400-an pohon teh, dilihat dari kejauhan rimbunan pohon teh berundak tersebut, memang mirip dengan Candi Borobudur. Di puncak Bukit Borobudur tersisa beberapa pohon teh tua yang sengaja tidak dipangkas, yang tingginya rata-rata dua meter. Inilah pohon teh yang berusia lebih dari 100 tahun, merupakan pohon teh generasi pertama yang ditanam Van der Rappart. Pemandangan hamparan kebun teh dan para buruh wanita paruh baya

penduduk Desa Girikerto memetik teh pagi hingga siang hari, matahari terbit maupun tenggelam, tampak menawan dilihat dari puncak Bukit Borobudur. Untuk mencapai Bukit Borobudur, pengunjung harus menapaki 117 anak tangga terbuat dari tumpukan batu kali, yang tersusun cukup rapi.



Gambar 14. Borobudur's Hill

- 7) Makam Pendiri Kebun Teh Jamus Van Der Rappart (1826-1910)
Petilasan berupa makam pendiri kebun teh Van der Rapard (Belanda) yang membuka kebun teh Jamus.



Gambar 15. Makam Pendiri Kebun Teh Jamus Van Der Rappart

8) Museum Listrik “Van de Rappart”

Museum listrik ini menyimpan benda-benda peninggalan sejarah semasa perkebunan teh Jamus masih dikelola oleh pihak Belanda. Nama Van de Rappart di ambil dari nama pendiri sekaligus pelopor berkembangkan perkebunan teh di kawasan ini. Salah satu peninggalan jaman Belanda yang masih terawatt dengan baik adalah kincir air yang digunakan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air yang sampai saat ini masih beroperasi dengan baik. Kincir air ini masih berfungsi menghasilkan energi listrik untuk penerangan jalan dan perumahan kapasitas terpasang 50 KVA, dengan diameter 150 cm berat $\pm$ 2 ton yang beroperasi tahun 1930 didatangkan dari negeri Belanda.



Gambar 16. Museum Listrik “Van der Rappart”

9) Kolam Renang Anak-Anak “Sumber Lanang”

Kolam renang untuk anak-anak, dari mata air Sumber Lanang, airnya sejuk dan menyehatkan di kelilingi pepohonan dan tanaman teh. Suhu air cukup dingin mencapai 15-22 derajat celsius.



Gambar 17. Kolam Renang Anak-Anak “Sumber Lanang”

10) Pabrik Pengolahan Teh Jamus

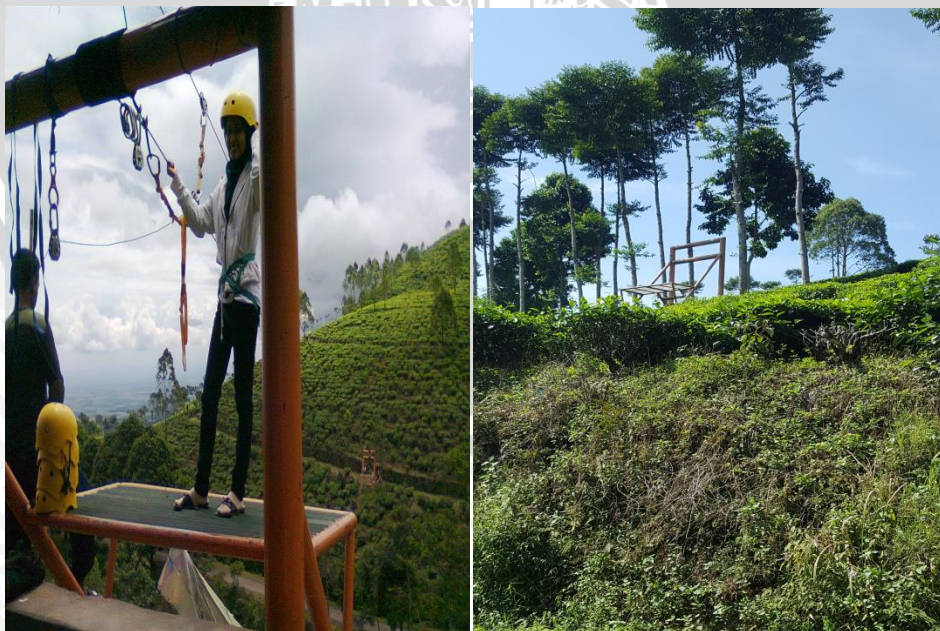
Pabrik pengolahan teh Jamus masih beroperasi sampai dengan saat ini dengan menggunakan peralatan-peralatan modern peninggalan belanda yang memang sudah ada sejak pertama kali perkebunan teh ini dikembangkan. Pkerjanya sebagian besar merupakan warga asli sekitar perkebunan. Output produksi yang dihasilkan antara lain teh hijau jamus dan teh putih. Rencananya, kelak pabrik ini akan dibuka sebagai salah satu atraksi pariwisata yang dapat dinikmati pengunjung obyek wisata sebagai wisata alternatif melihat proses pembuatan teh.



Gambar 18. Pabrik Pengolahan Teh Jamus

11) *Flying Fox*

Wahana wisata ini sebenarnya bisa menjadi andalan objek wisata Perkebunan Teh Jamus, akan tetapi wahana ini mengalami kerusakan sehingga sekarang sudah tidak beroperasi lagi.



Gambar 19. Kondisi *Flying Fox* Dulu dan Sekarang

e. Identitas Perusahaan Pengelola



PT. CANDI LOKA

PERKEBUNAN TEH JAMUS

Gambar 20. Logo PT. Candi Loka

- 1) Nama Perusahaan : PT. Candi Loka
- 2) Tanggal Pendirian : 22 Maret 1973
- 3) NPWP : 1.109.604.1-622
- 4) Bentuk Badan Hukum : Perseroan Terbatas
- 5) Status Perusahaan : Swasta Nasional
- 6) Alamat : Dusun Jamus Desa Girikerto Kec. Sine
Kab. Ngawi Jawa Timur
- 7) Telp. : 0351-7742310
- 8) Ijin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP) :

SK Direktur Jenderal Perkebunan

Nomor : 56/KB.120/SK/Dj Bun/03.98

Tanggal : 11 Maret 1998

9) Ijin Usaha Perkebunan (IUP) :

SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan

Nomor : 367/Menhutbun-VII/2000

Tanggal : 5 April 2000

10) Hak Guna Usaha (HGU) :

SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

Nomor : 12/HGU/BPN/2001

Tanggal : 26 Juli 2001

Sertifikat HGU No. 22/Girikerto

Kesimpulan yang bisa diambil adalah Agrowisata Perkebunan Teh Jamus merupakan perkebunan teh peninggalan kolonial Belanda sejak tahun 1886 yang pengelolaannya banyak mengalami pergantian. Kebun teh ini berada pada ketinggian 700-1500 meter diatas permukaan air laut (mdpl) dan berada pada lereng Gunung Lawu sehingga memiliki hawa yang sejuk dan panorama alam yang sangat indah. Agrowisata Perkebunan Teh Jamus memiliki banyak potensi-potensi wisata seperti Pembibitan Tanaman Teh Dan Aneka Tanaman, Grojokan Songo Tuk Pakel, Grojokan Kedung Putri, Bumi Perkemahan Kantil Idaman, Panorama Gardupolo, Bukit Borobudur, makam pendiri kebun teh Van der Rapard, Museum Listrik “Van de Rappart”, kolam renang anak-anak “Sumber Lanang” dan *Flying Fox*. Status pengelolaan Perkebunan Teh Jamus ini sekarang di kelola oleh PT. Candi Loka melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 12/HGU/BPN/2001 tanggal 26 Juli 2001 dengan ekspirasi tanggal 31 Desember 2026.

B. Penyajian Data

1. Hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, Pengelola Obyek Wisata Perkebunan Teh Jamus Kabupaten Ngawi dan Masyarakat Sekitar dalam Pengembangan Pariwisata selama ini ditinjau dari segi potensi wisata, bentuk hubungan dan infrastruktur

Pengembangan pariwisata dewasa ini sangat diperlukan bagi suatu daerah jika ingin membuat potensi pariwisata daerahnya lebih memiliki nilai daya tarik dan juga mampu mendatangkan nilai tambah bagi daerah. Begitu juga dengan Kabupaten Ngawi yang menyikapi perkembangan pariwisata dengan serius. Pengembangan pariwisata pada dasarnya selain untuk meningkatkan potensi yang ada juga untuk meningkatkan tingkat perekonomian terutama masyarakat sekitar.

Karena dengan pengembangan pariwisata akan memberikan dampak yang begitu besar kepada tingkat perekonomian masyarakat sekitar juga kepada daerah, maka diperlukan arah pengembangan yang memiliki visi kedepan yang jelas dan berkelanjutan. Sektor pariwisata bisa dikatakan menjadi yang mampu berkembang pesat pada dekade ini. Menilik sektor ini hanya menawarkan suatu jasa berupa pemandangan alam, atraksi-atraksi wisata maupun budaya lokal yang ada. Sehingga sektor pariwisata sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Hal ini berbeda dengan sektor migas yang mana sektor ini mempunyai keterbatasan dalam segi jumlah maupun sumber dayanya. Sehingga pada suatu titik tertentu akan tidak dapat diperbarui lagi.

Sedangkan sektor pariwisata memiliki potensi yang tidak terbatas dan mampu untuk di eksplor sedemikian rupa sesuai dengan yang diinginkan.

Semakin dikembangkan akan semakin menambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga timbul dampak negatif dari adanya pengembangan pariwisata. Seperti semakin rusaknya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat sekitar, rusaknya lingkungan sekitar, komersialisasi wisata dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, pengembangan sektor pariwisata bertujuan untuk meningkatkan potensi yang ada, meningkatkan daya tarik wisatawan, pemerataan ekonomi masyarakat sekitar, serta menambah pendapatan daerah. Untuk memperoleh tujuan tersebut, semua stakeholder yang terkait harus saling bahu membahu dalam menyikapi pengembangan pariwisata yang lebih baik. Tidak terkecuali di Kabupaten Ngawi ini dimana diharapkan semua aktor terkait juga harus mampu dan mau serta bersama-sama dalam mengembangkan potensi pariwisata demi terwujudnya pengembangan kepariwisataan daerah yang sesuai dengan harapan pemerintah daerah Kabupaten Ngawi.

Melihat pentingnya pengembangan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Ngawi khususnya pada objek wisata Perkebunan Teh Jamus, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi telah berinisiatif membuat suatu rancangan arah pengembangan potensi objek wisata ini. Rencana arah pengembangan ini yaitu dengan menjadikan kawasan Perkebunan Teh Jamus ini menjadi wisata yang berkonsep Agrowisata. Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Kawasan Agrowisata Jamus ini bertujuan untuk:

- a) Menemukanali potensi dan peluang pengembangan kepariwisataan Kawasan Agrowisata Jamus, Kabupaten Ngawi sehingga akan dapat tumbuh dan berkembang sebagai obyek tujuan wisata yang mempunyai kualitas daya tarik yang tinggi serta memiliki peran strategis dalam ikut berkontribusi bagi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Ngawi.
- b) Mengembangkan potensi kepariwisataan Kawasan Agrowisata Jamus yang bertumpu pada potensi wisata alam tirta dan alam pedesaan sehingga akan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan (khususnya wisatawan nusantara), mendorong peningkatan pendapatan daerah serta memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat lokal.
- c) Mengembangkan potensi kepariwisataan Kawasan Agrowisata Jamus melalui konsep pengembangan terpadu yang berwawasan lingkungan serta mampu berkoeksistensi dengan sektor lain, guna mengantisipasi perkembangan yang pesat pada sektor pariwisata.
- d) Mengembangkan diversifikasi produk wisata untuk meningkatkan pilihan dan keragaman obyek dan daya tarik wisata di Kawasan Agrowisata Jamus, khususnya melalui pengembangan manajemen atraksi yang lebih kreatif dan peningkatan fungsi dan fasilitas pelayanan yang berbasis pada potensi wisata budaya peninggalan sejarah dan purbakala serta wisata alam.

- e) Mendorong pelestarian dan konservasi lingkungan, khususnya konservasi-konservasi lingkungan fisik alam melalui pengelolaan dan pengembangan kegiatan yang relevan dan terkontrol.

Adanya tujuan yang jelas tersebut, tentunya memiliki sasaran dari perencanaannya. Adapun sasaran dari rencana pengembangan itu adalah :

- a) Tersusunnya dokumen teknis pengembangan dan penataan Kawasan Agrowisata Jamus, yang mencakup penataan tata ruang makro kawasan, perencanaan tata ruang mikro dan rencana arsitektural fasilitas lingkungan pendukung obyek wisata.
- b) Tersusunnya arahan/ strategi implementasi (pelaksanaan) rencana dan program pengembangan, yang akan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan Kawasan Agrowisata Jamus.

Arahan perencanaan tersebut mengharuskan adanya kemitraan antara pengelola Perkebunan Teh Jamus dalam hal ini PT. Candi Loka dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata serta dengan pelibatan masyarakat sekitar yang akan menjadi bagian dalam pengembangan pariwisata ini. Inisiatif ini disambut positif oleh pihak PT. Candi Loka seperti yang dikatakan oleh Bapak HR selaku kepala Divisi Agrowisata PT. Candi Loka :

“Kita oke saja jika dari pihak pemerintah mau mengembangkan Jamus ini sebagai kawasan objek wisata. Malah kami sangat mendukung rencana itu karena melihat disini juga banyak sekali pengunjungnya.” (wawancara pada tanggal 8 Juni 2016)

Minat yang ditunjukkan PT. Candi Loka sebenarnya juga besar, ini terlihat dari hasil wawancara diatas. Ditambah jumlah pengunjung kawasan agrowisata ini memang menduduki peringkat pertama dalam daftar kunjungan tempat pariwisata di Kabupaten Ngawi. Ini semakin menambah minat kedua belah pihak (PT. Candi Loka dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata) untuk mengembangkan kawasan agrowisata ini. Banyaknya wisatawan agrowisata ini merupakan potensi yang menggiurkan bagi kepentingan pihak terkait.

Pemerintah merasa perlu untuk mengembangkan kawasan Jamus karena melihat potensi yang ada serta kedepannya juga mampu menambah pendapatan daerah Kabupaten Ngawi seperti pendapat dari Bapak WR Kasi Promosi Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi:

“Pengembangan di Jamus ini banyak manfaatnya kedepannya mas. Seperti adanya pemerataan tingkat perekonomian masyarakat sekitar dan tentu saja juga mampu mengangkat pendapatan asli daerah. Selain itu harapannya Jamus itu juga akan menjadi ikon pariwisata Kabupaten Ngawi”. (wawamcara pada tanggal 23 Mei 2016)

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat menginginkan adanya pengembangan di Jamus ini. Terlebih kawasan Jamus juga masuk ke dalam peta pariwisata Kabupaten Ngawi. Sehingga dirasa Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola kawasan tersebut.

Pengembangan pada kawasan agrowisata Perkebunan Teh Jamus ini harus dibarengi dengan adanya suatu bentuk hubungan yang saling disepakati antara pihak terkait tanpa ada unsur keterpaksaan. Untuk mencapai itu semua memang

tidaklah mudah. Diperlukan suatu jembatan penghubung antar ketiga aktor tersebut dalam menerapkannya. Seperti yang penulis kutip dari perkataan kepala desa Girikerto (Bapak SL) :

“Kami senang sekali sebenarnya jika ada inisiatif dari pemerintah maupun pengelola kebun untuk mengembangkan kawasan Jamus ini. Tetapi menurut saya itu tidak mudah. Diperlukan suatu perantara untuk mewujudkannya. Soalnya pemerintah saja tidak bisa apalagi masyarakat desa”. (wawancara pada tanggal 26 Mei 2016)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasanya terdapat kendala jika ketiga aktor tersebut mau bermitra dalam pengembangan kawasan agrowisata Perkebunan Teh Jamus. Peran dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sangat penting untuk menunjang keberhasilan bentuk kemitraan yang diinginkan. Begitu juga halnya dengan PT. Candi Loka yang juga harus mendukung upaya pengembangan pariwisata ini. Karena pada dasarnya pengembangan kawasan ini juga akan memiliki dampak lebih terhadap PT. Candi Loka selaku pengelola Perkebunan Teh Jamus.

Sulitnya mencapai titik temu antara pemerintah dan pengelola Perkebunan Teh Jamus juga diungkapkan oleh Bapak HR Kepala Divisi Agrowisata PT. Candi Loka :

“Jika kawasan Agrowisata ini mau dikembangkan oleh pemerintah, kami mendukung langkah itu. Kami juga sudah menyiapkan lahan yang akan diminta oleh pemerintah untuk dikembangkan. Tetapi masih ada kendala yang ada sehingga belum bisa terwujud sampai sekarang. Harus ada perantara untuk mewujudkannya”. (wawancara pada tanggal 8 Juni 2016)

Perlunya perantara dalam pengembangan kawasan agrowisata ini memang menjadi hal yang *urgent* demi kelancaran arah pengembangan kawasan agrowisata ini. Kendala yang dihadapi ketiga aktor tersebut tidak hanya dalam hal

perantara saja, namun juga kendala dari segi teknisnya yaitu mengenai wewenang PT. Candi Loka terhadap kawasan Perkebunan Teh Jamus itu sendiri.

Amanat yang tertera dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 12/HGU/BPN/2001 sebenarnya kawasan Perkebunan Teh ini bukanlah untuk kawasan pariwisata, akan tetapi hanya untuk pengelolaan kawasan perkebunan teh. Seperti penjelasan Bapak Prb Kepala Tata Usaha PT. Candi Loka :

“Kami mau mengembangkan kawasan Jamus ini terbentur juga pada HGU itu. Karena dalam surat tersebut sebenarnya kawasan ini bukanlah untuk wisata, melainkan hanya sebatas perkebunan teh saja. Kami mendapat surat persetujuan dari Badan Pertanahan Nasional tersebut untuk mengelola kebun teh tersebut, bukan untuk kawasan wisata”. (wawancara pada tanggal 21 Maret 2016)

Dari keterangan pada wawancara tersebut semakin memperjelas bahwa kawasan Perkebunan Teh Jamus sebenarnya bukan sebagai kawasan wisata. Akan tetapi seiring berjalannya waktu wisatawan yang berkunjung ke area perkebunan ini semakin lama semakin banyak. Sehingga kawasan Perkebunan Teh Jamus ini dikenal sebagai tempat pariwisata di kabupaten Ngawi.

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak WR Kasi Promosi Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi :

“Jamus itu mau dikembangkan, tetapi terbentur dengan SK HGU nya. SK tersebut sejatinya bukan untuk kawasan wisata. Namun kami sudah melakukan upaya negosiasi dengan pihak PT dan pusat untuk meminta lahan yang nantinya akan dikembangkan menjadi area wisata”. (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016)

Kendala-kendala yang dihadapi kedua belah pihak adalah pada SK HGU (Hak Guna Usaha) dari kebun tersebut yang bukan sebagai kawasan pariwisata. Dan kendala yang dihadapi juga dari tidak menemui titik temu antara PT. Candi

Loka dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi yang hendak mengembangkan kawasan wisata ini dalam hal pembagian wilayah. Yang mana pihak Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi menginginkan lahan seluas 10 Ha di bagian atas kawasan Perkebunan Teh Jamus akan tetapi pihak PT. Candi Loka memberikan di lokasi bagian bawah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak WR Kasi Promosi Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi :

“Dalam pengembangan di Jamus itu kami meminta kepada PT. Candi Loka lahan seluas 10 Ha di bagian atas. Akan tetapi PT. Candi Loka tidak menyepakati usulan tersebut dan hanya mau memberikan lahan seluas 10 Ha itu di bagian bawah area Jamus. Maka dari itu sampai sekarang masih menemui jalan buntu”. (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016)

Permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan melalui perantara dan negosiasi yang lebih intens dan rumit. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi hendak mengambil inisiatif dengan mengirimkan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional dan meminta area seluas itu untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata. Dan sudah membentuk rencana pengembangan kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus ini.

Berikut rencana pengembangan kawasan dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi :



Gambar 21. Rencana Pengembangan Kawasan Perkebunan Teh Jamus I
Sumber : Laporan Akhir Perencanaan Pengembangan Kebun Teh Jamus Tahun Anggaran 2011 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi



Gambar 22. Rencana Pengembangan Kawasan Perkebunan Teh Jamus II
Sumber : Laporan Akhir Perencanaan Pengembangan Kebun Teh Jamus Tahun Anggaran 2011 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi

Rencana pengembangan itu sebenarnya sudah sangat bagus untuk mendukung pengembangan kawasan wisata Perkebunan Teh Jamus melihat minat wisatawan dari tahun ke tahun semakin banyak. Pihak PT. Candi Loka melihat banyaknya minat wisatawan yang berkunjung ke kawasan Perkebunan Teh Jamus ini menyikapinya dengan positif dan akhirnya pihak PT. Candi Loka berdasarkan instruksi dari Kepala PT. Candi Loka serta pemerintah untuk menjadikan kawasan ini menjadi kawasan Agrowisata. Dalam menyikapi konsep agrowisata ini, PT. Candi Loka benar-benar serius menggarapnya. Mulai dengan banyaknya penambahan atraksi-atraksi wisata di area Perkebunan Teh Jamus sampai dengan pembentukan divisi khusus yang menangani mengenai urusan agrowisata.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak HR Kepala Divisi Agrowisata PT. Candi Loka :

“Kawasan Jamus ini sebenarnya dulu bukan kawasan wisata, namun seiring berjalannya waktu, jumlah pengunjung yang datang kesini semakin lama semakin banyak. Dari situ mulailah terkenal kawasan Jamus ini sebagai kawasan wisata sampai sekarang.” (wawancara pada tanggal 8 Juni 2016)

Dari sini terlihat bahwa minat pengunjung kawasan Perkebunan Jamus ini memang banyak. Melihat banyaknya minat pengunjung inilah kemudian pengelola Perkebunan Teh Jamus mulai membenahi sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang potensi ini.

Melihat potensi yang ada, pemerintah daerah Kabupaten Ngawi tidak tinggal diam. Melalui inisiatifnya, pemerintah daerah Kabupaten Ngawi mulai melakukan hubungan dengan pihak pengelola Perkebunan Teh Jamus. Pemerintah

daerah pun kemudian membenahi sarana prasarana berupa akses jalan menuju kawasan wisata tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Bapak HR :

“Iya, pemerintah mempunyai andil dalam pengembangan daerah ini. Misal dengan pelebaran jalan dan pengaspalan jalan menuju kawasan wisata. Soalnya dulu jalan disini tidak seperti ini, jalan disini belum di aspal. Untuk sementara kami hanya bisa memberikan keterangan mengenai hal tersebut”. (wawancara pada tanggal 8 Juni 2016)

Ini menunjukkan kepedulian pemerintah daerah pada area Perkebunan Jamus ini. Hubungan yang seperti ini mengindikasikan bahwa kedua belah pihak memang saling membutuhkan dalam pengembangan kawasan Perkebunan Teh Jamus. Namun, kedua belah pihak belum bisa untuk mewujudkannya dalam bentuk suatu hubungan kemitraan yang mempunyai suatu payung hukum yang jelas. Hal ini dibenarkan oleh Bapak WR :

“Susah mas kalau mau bekerjasama dengan pihak sana (PT. Candi Loka). Soalnya kita terbentur SK dan juga aturan yang ada. Sehingga kita mau melegalkan dan membentuk kerjasama dengan sana itu ya susah banget. Tapi kami juga sedang berusaha untuk itu”. (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016)

Berbicara mengenai pengembangan pariwisata di daerah ini, tentu saja juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat sekitar. Pihak PT. Candi Loka sangat tergantung kepada masyarakat sekitar juga terutama dalam hal tenaga kerja dan juga bentuk kepedulian masyarakat sekitar. Seperti yang Bapak HR jelaskan berikut ini :

“Kami juga membutuhkan masyarakat setempat terutama untuk memenuhi kebutuhan kita di sektor tenaga kerja baik sebagai tenaga pemetik teh, pekerja di dalam pabrik maupun tenaga keamanan disini. Pada saat di kebun ini dulu mengalami kebakaran, warga masyarakat juga ikut berinisiatif untuk memadamkan api. Kami sangat terbantu dengan masyarakat setempat”. (wawancara pada tanggal 8 Juni 2016)

Keterangan diatas menunjukkan adanya sifat saling membutuhkan diantara kedua belah pihak antara PT. Candi Loka dan juga masyarakat setempat. Hal tersebut seharusnya bisa menjadi dasar dibentuknya suatu hubungan yang lebih baik lagi dalam pengembangan kawasan Jamus kedepannya. Sehingga kedua belah pihak akan menuai hasil yang menguntungkan dari aktifitas hubungan yang baik tersebut.

Karena pengembangan disini juga akan berdampak pada kondisi masyarakat terutama kondisi ekonominya. Dalam hal ini masyarakat terkait yang berada di kawasan wisata Perkebunan Teh Jamus adalah masyarakat Desa Girikerto. Namun kenyataan membuktikan bahwa hanya masyarakat Dusun Jamus lah yang lebih banyak menikmati hasil dari adanya kawasan wisata ini.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak SL Kepala Desa Girikerto :

“Sebenarnya kalau dikatakan mempunyai peran dalam peningkatan ekonomi masyarakat itu ya sedikit mas. Soalnya kawasan Jamus itu sebenarnya memiliki wilayah administratif sendiri. Jadi hanya masyarakat yang ada di dalam area kebun itu yang bisa merasakan dampaknya. Kalau dari luar Dusun Jamus mungkin hanya sebatas pedagang keliling yang bisa keluar masuk atas ijin perusahaan”. (wawancara pada tanggal 26 Mei 2016)

Area Perkebunan Teh Jamus pada dasarnya adalah area perkebunan yang hak kepemilikan tanahnya merupakan hak mutlak kepada PT. Candi Loka. Sehingga masyarakat sekitar tidak bisa ikut campur dalam wilayah administratif perkebunan Jamus tersebut. Ini diibaratkan seperti halnya seorang yang membeli tanah dan akan dibangun suatu rumah dan kemudian akan ditempatinya. Lalu tetangga sebelah rumah hendak masuk dan meminta sesuatu hal dari pemilik

rumah. Tentu saja si tetangga tidak akan begitu saja dengan mudahnya mengambil sesuatu yang ada di rumah orang lain tanpa seijin pemilik rumah. Oleh karena itu, perlu adanya ijin yang jelas dari pemilik rumah.

Dan hal ini tidak semudah meminta ijin seperti yang tergambar diatas. Karena ini merupakan ijin dari sebuah perusahaan yang tentu membutuhkan pengantar dari pemerintah daerah bahkan pusat untuk mempermudah terkabulkannya kehendak yang diinginkan. Jelas ini bukanlah perkara yang mudah bagi Desa Girikerto yang keberadaannya disini sebagai desa penyangga adanya kawasan Perkebunan Teh Jamus dan bukan sebagai pihak yang ikut campur dalam urusan pengembangan kawasan tersebut.

Apabila masyarakat Desa Girikerto ingin melibatkan diri dalam pengembangan Jamus maka diperlukan pihak yang bisa menggandengnya dalam pengembangan wilayah tersebut. Dalam hal ini pemerintahlah yang harus tegas dan mau memfasilitasi hubungan tersebut sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam urusan tata kelola daerahnya. Walaupun terkendala pada situasi tersebut, namun Desa Girikerto tetap memberikan perhatian pada kawasan Perkebunan Teh Jamus tersebut. Karena menurut penuturan Kepala Desa Girikerto, bahwasanya dulu yang membuat dan berinisiatif membuat tempat penarikan retribusi masuk ke Perkebunan Teh Jamus adalah dari Masyarakat Desa Girikerto. Kemudian pihak pengelola kebun mengambil alihnya karena merupakan pemilik sah kawasan wisata tersebut.

Masyarakat sebenarnya juga memiliki ketergantungan terhadap adanya kawasan Jamus ini. Seperti misalnya bisa menyerap tenaga kerja dan juga bisa

mendirikan suatu usaha di sekitar kawasan Jamus ini. Seperti yang penulis kutip dari perkataan Bapak SL Kepala Desa Girikerto :

“Kalau dikatakan tergantung itu ya kami juga ada tetapi tidak seluruhnya. Iya seperti dari tenaga kerja, masyarakat juga ada yang bekerja di kebun tersebut. Selain itu pedagang-pedagang juga bisa berjualan keluar masuk area kebun tetapi juga atas seijin satpam”. (wawancara pada tanggal 26 Mei 2016)

Melihat perkataan dari kepala desa Girikerto tersebut menunjukkan bahwa masyarakat juga memiliki ketergantungan pada adanya kawasan Jamus itu, akan tetapi belum mempunyai inisiatif untuk menjalin suatu kemitraan seperti misalnya dengan membentuk suatu kelompok-kelompok tani atau yang lainnya untuk menjalin kemitraan dengan pihak PT. Candi Loka.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan diatas adalah hubungan yang terjadi selama ini, memang banyak sekali permasalahan yang terjadi sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pengembangan yang ada. Jika dapat diklasifikasikan, hubungan dalam pengembangan pariwisata tersebut dapat memilik dampak pada sektor yang lain. Seperti misalnya pada lingkungan fisik kawasan wisata, sosial dan budaya lingkungan sekitar, dan juga pada perekonomian masyarakat. Hubungan yang terjadi dalam pengembangan pariwisata di kawasan Jamus ini masih belum bisa terealisasi karena mendapatkan banyak hambatan.

2. Dampak dari Hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, Pengelola Objek Wisata Perkebunan Teh Jamus Kabupaten Ngawi dan Masyarakat Sekitar dalam Pengembangan Pariwisata selama ini.

a. Hubungan yang Berdampak pada Kondisi Fisik

Dalam upaya pengembangan kawasan pariwisata tentu saja sedikit banyak menimbulkan dampak. Pada dasarnya, kehendak dari aktor yang ingin mengembangkan adalah dapat lebih meningkatkan potensi yang ada di kawasan pariwisata tersebut. Namun pada prosesnya, terkadang juga menimbulkan dampak yang justru merugikan dan merusak kawasan tersebut. Dampak pada kondisi fisik ini adalah melihat dampak yang terjadi pada lingkungan fisik akibat adanya pengembangan pariwisata. Dampak ini bisa dilihat dari dampak positif maupun negatif.

1) Dampak Positif

Adanya pengembangan kawasan wisata menyebabkan begitu banyak dampak yang terjadi. Dampak yang memiliki nilai pengembangan yang baik adalah disebut dampak positif. Dampak-dampak tersebut menyebabkan kawasan wisata akan semakin baik dan semakin menambah minat pengunjung untuk mengunjunginya. Seperti perkataan Bapak WR Kasi Promosi Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi :

“Pengembangan pariwisata di Jamus ya untuk kebaikan Jamus itu sendiri, tidak ada rencana untuk merusak kawasan Agrowisata tersebut. Malah kami justru ingin mengembangkannya supaya lebih baik lagi. Dan menjaga lingkungan alamnya agar tetap asri dan sejuk”. (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016)

Dari kutipan wawancara diatas menjelaskan bahwa pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi berencana untuk mengembangkan kawasan Jamus ini kearah yang lebih baik tanpa mengurangi nilai eksotisme hamparan kebun teh di area kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus.

Memang sebaiknya dalam pengembangan pariwisata juga harus mempertahankan nilai-nilai historis dari kawasan tersebut sehingga lingkungan alamnya akan tetap terjaga seperti sedia kala. Namun jika dirasa penting untuk mengubah kawasan maka sebaiknya perubahan tersebut haruslah mengandung nilai positif pada kawasan pengembangan. Bukan justru sebaliknya, merusak dan menghilangkan nilai-nilai yang menjadi potensi kawasan wisata tersebut sebelumnya. Sehingga kawasan wisata yang dikembangkan nantinya bisa memiliki daya saing dengan objek wisata lain.

Pengembangan kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus ini memang lebih mengedepankan nilai-nilai alam dan religiusitas, sehingga pohon-pohon teh yang usianya ratusan tahun tetap dipertahankan hingga sekarang. Seperti yang disampaikan Bapak Prb Kepala Tata Usaha PT. Candi Loka :

“Kami tetap menjaga lingkungan disini seperti adanya, misal dengan mempertahankan pohon teh yang memiliki usia ratusan tahun. Kemarin kami juga melakukan kegiatan penanaman satu juta pohon di kawasan Jamus. Tetapi kami juga melakukan penambahan pohon teh dengan melakukan penanaman pohon baru guna menjaga jumlah produktifitas dari hasil perkebunan.” (wawancara pada tanggal 21 Maret 2016)

Hasil wawancara menunjukkan pihak PT. Candi Loka juga melakukan penghijauan terhadap kawasan Perkebunan Teh Jamus. Hal ini diperkuat dengan diperolehnya penghargaan tingkat nasional nominasi kalpataru tahun 2004

kategori Pembina Lingkungan Hidup pada peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia pada tanggal 5 Juni 2004 di Istana Negara Jakarta. Ini membuktikan bahwa PT. Candi Loka juga melakukan perubahan yang positif terhadap kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus.

Pihak PT. Candi Loka juga memberikan fasilitas berupa tong sampah di area Kebun Teh Jamus guna mengurangi tingkat sampah yang ada di kawasan kebun teh. Hal ini mendapat respon positif dari pengunjung objek wisata Perkebunan Teh Jamus yaitu saudara HZ :

“Kalau mengenai kebersihan disini lumayan bagus mas. Lingkungannya terlihat bersih, walaupun ada sedikit sampah tapi tergolong bersih. Terutama dengan adanya tong sampah disekitar kebun teh sehingga mempermudah pengunjung jika ingin membuang sampah”. (wawancara pada tanggal 26 Mei 2016)

Ini berarti langkah yang diambil PT. Candi Loka sudah benar dengan memberikan tong sampah disekitar area kebun teh. Salah satu pengunjung juga berpendapat sama mengenai adanya tong sampah di area kebun teh. Seperti pendapat dari Saudara AR :

“Tong sampah ini sangat bermanfaat mas untuk mengurangi sampah yang berserakan di area kebun. Tapi menurut saya tong sampahnya kurang banyak, jadi perlu penambahan lagi dan ditempatkan disetiap sudut area kebun. Jadi pengunjung tidak kesulitan mau membuang sampah jika sedang berada di tengah kebun”. (wawancara pada tanggal 26 Mei 2016)

Masukan-masukan ini pada dasarnya untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di kawasan Perkebunan Teh Jamus ini dan tentu saja memberikan kesan positif terhadap pengunjung yang datang. Sehingga kawasan Jamus ini akan semakin banyak mendapat minat pengunjung untuk mengunjunginya.

Kondisi alam disekitar kawasan Perkebunan Teh Jamus juga masih asri dan terjaga. Potensi-potensi wisata yang ada juga masih terjaga walaupun perlu sedikit pemugaran. Misalnya pada sumber air yang berada di kawasan wisata Jamus perlu adanya perawatan yang lebih baik

Upaya positif juga datang dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi melalui upayanya dengan memperbaiki jalan yang rusak dan melakukan pengaspalan jalan demi kelancaran akses menuju kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus. Berikut penuturan Bapak WR Kasi Promosi Pariwisata :

“Untuk pengembangan kawasan Jamus kami sudah melakukan pelebaran jalan dan pengaspalan jalan menuju kawasan wisata. Sehingga mempermudah pengunjung untuk menuju kawasan wisata. Langkah ini dilakukan karena dulu untuk kendaraan roda empat jika berseberangan dengan pengendara lain masih sulit karena sempitnya jalan.” (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016)

Langkah positif yang diambil Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi ini memperlihatkan kepedulian terhadap pengembangan kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus. Karena perubahan ini untuk mempermudah akses jalan menuju kawasan wisata, jadi bukan untuk merusak kawasan wisata.

2) Dampak Negatif

Pada pengembangan kawasan wisata tentu saja juga menimbulkan kerugian ataupun dampak buruk terhadap kawasan wisata. Dampak-dampak ini terjadi karena adanya pengembangan kawasan wisata yang tidak mengedepankan unsur lingkungan hidup di sekitar kawasan wisata. Karena dengan semakin

berkembangnya kawasan wisata maka tidak menutup kemungkinan pasti juga menimbulkan dampak negatif dari kegiatan pariwisata.

Dampak yang dirasa merupakan dampak positif yang ditimbulkan dari aktifitas pengembangan pariwisata bisa juga sebenarnya merupakan dampak negatif yang akan merusak kondisi fisik lingkungan sekitar. Akan tetapi dengan dalih demi pengembangan kawasan maka hal tersebut bisa menjadi sah. Seperti misal dengan pembukaan lahan untuk area parkir yang ada di kawasan Perkebunan Teh Jamus. Pembukaan lahan tersebut tentunya merusak habitat alam yang ada di area tersebut.

Contoh lain dari pengembangan kawasan wisata Jamus ini adalah adanya lubang bekas pengerukan yang lebar, dan belum diketahui fungsi dari lubang itu mau digunakan untuk hal apa. Namun jika dilihat sekilas sepertinya mau digunakan untuk kolam. Namun sampai sekarang lubang itu tidak diurus dan terbengkalai. Selain itu juga ada lahan yang mengalami kelongsoran yang ditimbulkan oleh aliran air yang deras. Hal seperti ini juga akan menjadikan kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus semakin rusak karena tidak ada kejelasan fungsi dari lubang tersebut.

Kerusakan yang terjadi di kawasan Agrowisata ini juga diungkapkan oleh Bapak SL Kepala Desa Girikerto :

“Banyak perubahan yang terjadi di Jamus. Jamus yang dulu banyak pohon-pohonnya, sehingga kelihatan bagus. Tetapi sekarang banyak tanaman tehnya. Walaupun ditengah kebun juga ada tanaman yang terlihat tinggi. Tapi ini jelas berbeda dengan yang dulu, terutama dengan banyaknya pemukiman juga merusak kawasan Jamus”. (wawancara pada tanggal 26 Mei 2016)

Perubahan ini, menurut Kepala Desa Girikerto merupakan suatu bentuk kerusakan alam yang ada di Jamus. Ini berarti apa yang dikatakan oleh pihak pengelola Kebun Teh Jamus tidak sejalan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Perubahan ini juga dirasakan oleh warga desa yang lain :

“Iya mas di Jamus dulu memang banyak pohon-pohon jadi kelihatan rindang begitu. Alamnya juga masih sangat segar, jadi nuansanya itu enak dan adem. Tapi sekarang kalau adem itu masih tapi sedikit berkurang. Kalau menurut saya perubahan disini banyak mas kalau dari segi lingkungannya.” (wawancara pada tanggal 26 Mei 2016)

Ini menunjukkan pengembangan di kawasan Jamus juga tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Banyaknya pemukiman penduduk semakin menjadikan kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus menjadi rusak. Ini disebabkan karena pembukaan lahan yang akan dibangun rumah-rumah penduduk, warung atau toko maupun kios-kios, serta untuk penambahan wahana wisata lain.

Penambahan wahana wisata pada hakekatnya bertujuan untuk menjadikan kawasan Jamus semakin memiliki banyak atraksi wisata. Hal ini memang akan menambah minat pengunjung untuk datang ke lokasi tersebut. Namun di lain hal, penambahan ini juga akan menimbulkan kerusakan pada alam apalagi jika tidak dibarengi dengan konsep penataan wilayah yang bagus dan mengedepankan lingkungan. Kurang terurusnya wahana wisata yang ada juga menyebabkan potensi tersebut terbengkalai dan cenderung rusak di makan oleh waktu.

Contoh wahana wisata yang rusak adalah *Flying Fox*, yang mana keberadaannya kini terbengkalai karena tali yang menjadi penghubung wahana itu

mengalami kerusakan dan kemudian tidak ada upaya dari pengelola untuk memperbaikinya. Sehingga terkesan dibiarkan dan tidak di urus lagi.

Berbicara mengenai penyebab kerusakan area Perkebunan Jamus juga disebabkan oleh adanya kebakaran hutan di sekitar perkebunan yang kemudian merembet ke area kebun. Kebakaran ini mengakibatkan lingkungan di kawasan Jamus menjadi rusak. Banyaknya kendaraan yang memasuki kawasan Jamus juga merupakan penyebab terjadinya polusi di sekitar area Perkebunan Teh Jamus. Hal ini tidak bisa di pungkiri karena dengan semakin dikenalnya kawasan Agrowisata Jamus ini kemudian banyak masyarakat yang berkunjung dengan menggunakan kendaraan sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Belum lagi ditambah dengan kendaraan-kendaraan dari pengelola Perkebunan Teh Jamus yang juga lalu lalang di area kebun teh. Selain itu juga polusi yang ditimbulkan dari aktifitas PT. Candi Loka dalam melakukan pengolahan teh.

b. Hubungan yang Berdampak pada Sosial-Budaya

Adanya pengembangan kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus ini menyebabkan banyak efek maupun dampak. Selain dampak yang akan diterima oleh lingkungan fisiknya, dampak lain dari aktifitas pengembangan itu juga ada, seperti dampak yang timbul dari segi Sosial maupun Budaya. Dengan adanya pengembangan kawasan pariwisata memang sudah pasti menimbulkan efek yang multi (*multi effect*) yang akan mempengaruhi kondisi masyarakat sekitar. Seperti dampak dari segi Sosial maupun Budaya ini merupakan dampak yang diterima kawasan tersebut setelah adanya pengembangan.

Sebenarnya antara dampak sosial dan budaya terdapat perbedaan masing-masing, akan tetapi banyak dari kalangan peneliti menjadikan dampak ini dalam satu pengertian menjadi dampak sosial-budaya. Dan untuk menjelaskan skripsi ini, peneliti juga menggunakan istilah tersebut dengan melakukan penggabungan dua istilah tersebut. Dampak Sosial maupun Budaya ini menimbulkan dampak yang bersifat positif maupun negatif. Berikut penjelasan dari dampak yang ditimbulkan pada Sosial dan Budaya dari pengembangan kawasan Jamus baik positif maupun negatif :

1) Dampak Positif

Pengembangan kawasan pariwisata memang tidak bisa dipungkiri akan menimbulkan dampak yang beragam. Salah satu dampak yang terjadi yaitu dari segi sosial dan budaya. Dampak dari aktifitas pengembangan kawasan wisata dari segi dampak positifnya terutama dalam pengembangan kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus begitu beragam. Keadaan sosial-budaya di sekitar area wisata mengalami perubahan yang signifikan dari aktifitas pengembangan pariwisata di Jamus ini.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak WR Kasi Promosi Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi :

“Perubahan dari segi sosial budaya banyak. Dan pada intinya perubahan tersebut menuju kearah yang lebih baik. Jadi bukan untuk keburukan masyarakat sekitar ataupun tempat wisata tersebut. Karena kami menginginkan perubahan disana itu ya menuju perubahan yang baik dan tentunya masyarakat setempat supaya merasa senang”. (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016)

Apa yang dijelaskan oleh Bapak WR mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi di kawasan Jamus memang menuju kearah yang lebih baik, bukan

sebaliknya. Jadi memang pada dasarnya kehendak dari pemerintah menginginkan perubahan yang ada akan semakin meningkatkan kualitas objek wisata dan tentunya berdampak yang baik pula pada lingkungan sekitar.

Perubahan-perubahan dari segi sosial-budaya juga bisa dilihat dari perilaku warga masyarakat sekitar. Adanya tempat pariwisata menyebabkan arus mobilisasi pengunjung yang datang dari berbagai macam daerah dan dengan cara ataupun tingkah laku mereka sedikit banyak membawa pengaruh pada masyarakat sekitar. Seperti perilaku ramah tamah pengunjung kepada masyarakat di sekitar Jamus menyebabkan penduduk merasa dihargai dan kemudian mereka juga membalasnya dengan sikap yang sama.

Masyarakat desa Girikerto pada umumnya memiliki perilaku yang ramah pada setiap pengunjung yang datang. Seperti perkataan Bapak HR berikut :

“Penduduk disini ramah-ramah kok mas. Kalau ada pengunjung yang bertanya mereka selalu menjawab dengan ramah dan benar. Tidak ada yang dengan sengaja membuat pengunjung malah kebingungan. Mereka terbuka kepada semua orang”. (wawancara pada tanggal 8 Juni 2016)

Ini berarti masyarakat desa Girikerto masih mempertahankan sifat keramah-tamahan penduduk walaupun ada pengaruh budaya dari luar daerah yang dibawa para pengunjung maupun penduduk lain yang pindah dan menetap di kawasan tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Desa Girikerto :

“Kalau masyarakat disini ramah semua pada semua orang ataupun pengunjung yang datang. Kami ikut senang karena daerah kami menjadi tujuan wisata, maka dari itu kami selalu menjaga perilaku kami supaya pengunjung itu merasa nyaman dan enak.” (wawancara pada tanggal 26 Mei 2016)

Masyarakat tetap mempertahankan perilaku mereka yang memang merupakan ciri khas dari perilaku masyarakat Jawa yang juga terkenal ramah

tamah. Kondisi ini menjadikan asumsi pengunjung terhadap tempat wisata Perkebunan Teh Jamus menjadi baik. Masyarakat juga mendukung pengembangan kawasan wisata ini demi menunjang dan mempertahankan potensi wisata yang ada di Jamus.

Perkembangan sosial-budaya di sekitar kawasan Jamus juga bisa dilihat dari tetap dipertahankannya adat istiadat yang ada. Seperti contohnya masyarakat desa Girikerto masih mempertahankan upacara adat “Bersih Desa” atau “Nyadran” yang diadakan setiap setahun sekali. Ini berarti adat budaya masyarakat tidak luntur walaupun dengan datangnya pengaruh budaya dari luar ataupun datangnya kawasan wisata Perkebunan Teh Jamus. Walaupun tidak semua adat mampu dipertahankan.

Berikut penuturan Bapak SL selaku Kepala Desa Girikerto :

“Adat istiadat disini masih kami pertahankan dan kami rutin melakukannya. Misalnya ada upacara adat Nyadran yang kami lakukan setiap setahun sekali. Karena menurut kami ini merupakan warisan dari nenek moyang kami dahulu yang harus kami jaga dan pertahankan terus. Sehingga keseimbangan budaya itu akan tetap ada.”

Adat istiadat yang ada masih dipertahankan oleh masyarakat desa Girikerto untuk menjaga nilai-nilai budaya yang ada di Girikerto. Masyarakat masih menjunjung tinggi nilai budaya dari nenek moyang mereka karena dirasa itu merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan dan dijaga.

Begitu juga dengan tingkat religiusitas masyarakat desa Girikerto juga bisa terbilang baik. Ini dibuktikan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama dalam pengembangan pariwisata dengan menyetujui konsep agrowisata Perkebunan Teh Jamus yang mana menghendaki kawasan tersebut untuk supaya

tidak dijadikan kawasan yang mengandung unsur negatif karena banyaknya pengunjung yang datang. Seperti contoh dengan adanya tempat-tempat penginapan. Tidak seperti tempat pariwisata yang lain yang dengan mudah menemukan tempat-tempat penginapan, hotel, vila, losmen dan sebagainya. Di kawasan Jamus sangat jarang dijumpai tempat-tempat penginapan karena dikhawatirkan akan di manfaatkan untuk hal-hal yang bersifat negatif.

Seperti perkataan Bapak SL berikut ini :

“Disini jarang ada penginapan. Ya ada tapi cuma satu dua saja. Karena untuk menjaga suasana lingkungan yang tetap nyaman. Selain itu karena dengan adanya tempat-tempat penginapan yang banyak nanti dikhawatirkan tempat ini malah dijadikan tempat untuk berbuat yang tidak-tidak dan menjadikan tempat ini sebagai rujukan untuk orang-orang yang mau berbuat senonoh”. (wawancara pada tanggal 26 Mei 2016)

Masyarakat juga mendukung toleransi antar umat beragama. Ini terbukti dengan adanya tempat peribadahan yang saling bersebelahan antara masjid untuk umat Islam dan Gereja untuk umat Kristen. Toleransi antar umat beragama memang sangat penting terutama di jaman sekarang yang mudah sekali untuk menerima isu dari dunia luar dan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Masyarakat juga menjaga tempat-tempat yang menurut mereka dianggap keramat, seperti sendang atau sumber air. Tempat ini biasanya digunakan oleh masyarakat desa Girikerto untuk upacara adat Nyadran. Selain itu area Perkebunan Teh Jamus juga terdapat makam pendiri Jamus yang berasal dari Belanda dan sampai sekarang masih dijaga. Terpeliharanya pohon Kantil yang memiliki usia ratusan tahun di kawasan kebun teh.

2) Dampak Negatif

Dampak dari segi sosial-budaya tidak hanya dampak yang bersifat positif, tetapi ada juga dampak dari perkembangan wisata terhadap sosial budaya ini yang sifatnya negatif dan cenderung merusak tatanan sosial dan budaya yang ada. Seperti halnya pada pengembangan kawasan di Agrowisata Perkebunan Teh Jamus ini. Seperti yang penulis kutip dari perkataan Bapak SL :

“Sejak di kelola pihak PT ini, Jamus mengalami banyak perubahan dari segi masyarakatnya, budayanya, maupun lingkungan sosialnya. Jamus sekarang berbeda dengan yang dulu. Sekarang masyarakat disana seperti tertutup, namun kami tetap menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat disekitar wisata”. (wawancara pada tanggal 26 Mei 2016)

Pengembangan yang terjadi di Jamus ternyata juga membuat masyarakat di sekitar kawasan wisata menerima dampaknya. Kawasan Jamus merupakan bagian dari wilayah desa Girikerto, namun wilayah tersebut mempunyai wilayah administratif tersendiri. Pemilihan ketua RT ataupun RW dilakukan atas seijin dari PT. Candi Loka, jadi bukan berdasar dari ijin desa Girikerto. Namun jika ada pemilihan kepala desa, masyarakat Jamus juga ikut berpartisipasi. Itulah sebabnya masyarakat Jamus terkesan tertutup terhadap masyarakat lain di desa Girikerto.

Karena sejatinya kawasan Jamus sebenarnya dulu bukan kawasan pemukiman, melainkan hanya kawasan perkebunan. Hadirnya pemukiman penduduk di Jamus bersamaan dengan datangnya perusahaan pengelola perkebunan tersebut. Dan kebanyakan dari penduduk disitu adalah buruh-buruh pabrik dan keluarga dari pekerja-pekerja di PT. Candi Loka. Sehingga status tempat tinggal merekapun ada yang tidak permanen, karena area tersebut merupakan kawasan perkebunan milik PT. Candi Loka.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak HR Kepala Divisi Agrowisata PT. Candi

Loka :

“Jamus itu merupakan dusun *emplacement* yang artinya dusun yang berada di tanah perusahaan. Jadi dusun ini mempunyai wilayah administratif sendiri, namun tetap bagian dari Desa Girikerto sebagai desa penyangga adanya perkebunan ini”. (wawancara pada tanggal 8 Juni 2016)

Hal ini menyebabkan perilaku hidup masyarakat Jamus berbeda dari masyarakat di dusun lain di desa Girikerto. Mereka sedikit mendapat pengaruh dari adanya perusahaan pengelola kebun teh tersebut. Walaupun kesan ramah tamah juga masih melekat pada warga Jamus tapi unsur perbedaan itu juga ada. Masyarakat Jamus memiliki tingkat religiusitas yang berbeda dengan masyarakat di desa Girikerto.

Berikut petikan wawancara dari Bapak SL Kepala Desa Girikerto mengenai hal itu :

“Agama mereka sama mas yaitu Islam, akan tetapi mereka lebih kental dalam menerapkannya dan alirannya beda. Sehingga apa saja yang tidak sesuai dengan syariat agama ya mereka hilangkan. Seperti upacara-upacara adat misalnya”. (wawancara pada tanggal 26 Mei 2016)

Kebanyakan masyarakat di Jamus memang memeluk agama Islam, namun alirannya berbeda. Walaupun perubahan yang ada di Jamus mengenai upacara-upacara adat dihilangkan karena menurut mereka lebih mengarah ke syirik itu adalah dibenarkan dalam hal agama, namun jika menurut dampak pengembangan pariwisata dari segi sosial budaya bisa disebut sebagai dampak negatif karena menghilangkan adat istiadat dan kebudayaan yang ada.

Dahulu menurut penuturan Bapak SL, upacara Nyadran juga dilakukan di sumber air yang ada di kawasan Jamus tepatnya di sumber air “Sumber Lanang”,

namun sekarang upacara tersebut sudah tidak lagi dilakukan. Ini berarti keanekaragaman adat yang ada di Jamus telah hilang terutama semenjak di kelola oleh perusahaan tersebut. Pengaruh pengembangan pariwisata di Jamus membawa dampak yang buruk bagi kebudayaan yang ada di Jamus itu sendiri.

Dampak yang lain juga bisa dilihat dari terbengkalainya bangunan-bangunan bersejarah seperti adanya Goa Belanda yang keberadaannya tidak banyak diketahui oleh pengunjung. Keadaan Goa ini kurang terawat dan mengindikasikan kurang pedulinya pengelola Perkebunan Teh Jamus pada bangunan-bangunan peninggalan sejarah. Padahal jika dikelola dengan baik, tentu saja goa ini akan menjadi wahana wisata yang mampu menarik minat pengunjung.

Semakin banyaknya pengunjung yang datang juga menyebabkan perilaku berpakaian masyarakat mengalami perubahan. Seperti gaya berpakaian pengunjung yang datang dari kawasan perkotaan dengan gaya berpakaian yang lebih modern menyebabkan penduduk di sekitar kawasan Perkebunan Teh Jamus kemudian melihat dan mengikuti gaya berpakaian itu. Hal ini akan menyebabkan lunturnya nilai-nilai budaya berpakaian yang ada.

c. Hubungan yang Berdampak pada Ekonomi

Pada dasarnya, suatu pengembangan pariwisata memang diprioritaskan pada pengembangan perekonomian masyarakat sekitar kawasan wisata. Pengembangan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan warga sekitar kawasan pariwisata menjadi salah satu tujuan yang harus di capai oleh aktor-aktor yang berkepentingan. Oleh karena itu, pengembangan kepariwisataan seyogyanya tidak hanya mengedepankan keuntungan saja, melainkan harus dibarengi dengan

pemerataan kesejahteraan dilingkungan sekitar kawasan tersebut serta pengembangan tersebut juga harus berbasis pada pengembangan yang berkelanjutan. Intinya disini adalah pengembangan yang diharapkan tidak hanya mempunyai dampak dalam jangka waktu yang pendek saja melainkan juga harus mempunyai efek jangka panjang dan tidak lupa harus memprioritaskan keseimbangan alam sekitar.

Konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan menjadi tren di era sekarang karena dirasa konsep itulah yang cocok diterapkan untuk meningkatkan potensi yang ada di sektor pariwisata. Dampak yang ditimbulkan dari pengembangan pariwisata terutama pada kawasan Agrowisata Perkebunan teh Jamus dari segi ekonomi memang sedikit banyak mempunyai pengaruh bagi perekonomian masyarakat sekitar. Dampak dari hubungan antaraktor dalam pengembangan pariwisata dari segi ekonomi ini dapat dibedakan menjadi dampak positif dan dampak negatif. Berikut uraian mengenai kedua dampak tersebut :

1) Dampak Positif

Pengembangan pariwisata diharapkan mempunyai dampak yang bersifat positif. Hal ini menjadi keharusan karena dampak tersebutlah yang mempunyai keuntungan terhadap aktifitas pengembangan pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata di Agrowisata Perkebunan Teh Jamus selama ini, dampak yang ditimbulkan tidak sedikit. Jika dilihat dari kurun waktu dimulainya aktifitas pengolahan teh di Jamus ini sejak pertama kali PT. Candi Loka mengelola, masyarakat sekitar juga mendapatkan hasil dari aktifitas pengelolaan teh.

Perkembangan perekonomian di sekitar kawasan Jamus mengalami peningkatan sejak adanya pengelolaan Perkebunan Teh Jamus. Berikut penjelasan

Bapak SL Kepala Desa Girikerto mengenai hal itu :

“Jika dilihat dari dulu, memang perkembangan perekonomian masyarakat sekitar Jamus mengalami peningkatan. Perekonomian masyarakat mulai terangkat sejak ada kawasan Jamus ini”. (wawancara pada tanggal 26 Mei 2016)

Melihat kutipan diatas, ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat di sekitar Jamus memang mengalami perubahan jika dilihat dari adanya kawasan Jamus ini. Peningkatan perekonomian masyarakat sekitar kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus juga disetujui oleh Bapak HR Kepala Divisi Agrowisata PT. Candi Loka :

“Iya jelas masyarakat mengalami peningkatan dari segi perekonomian. Tingkat perekonomian masyarakat sekitar kawasan Jamus cukup positif. Mereka memanfaatkan area Agrowisata Jamus ini terutama untuk kegiatan berdagang, baik yang menetap disini maupun tidak menetap”. (wawancara pada tanggal 8 Juni 2016)

Perkembangan yang ada di Jamus menunjukkan arah perkembangan yang positif jika dilihat dari pendapat Bapak HR. Menurut beliau, memang pengelolaan di Jamus juga untuk mengangkat perekonomian masyarakat sekitar terlebih kawasan Jamus merupakan daerah yang jauh dari pusat keramaian maupun perkotaan. Karena kawasan ini berada di lereng Gunung Lawu. Namun dengan adanya kawasan Jamus ini masyarakat mulai memanfaatkannya dengan membuka usaha.

Masyarakat sekitar Perkebunan Teh Jamus banyak yang mendirikan lapak-lapak, kios, warung untuk berjualan di area wisata dengan seijin PT. Candi Loka dan juga diluar area wisata. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mempunyai

tempat usaha yang bisa menghasilkan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Pedagang yang tidak menetap biasanya menggunakan kendaraan untuk keliling di area wisata dan tentu saja juga atas seijin pengelola Jamus.

Aktifitas ini membuat tingkat perekonomian masyarakat sekitar mulai terangkat sedikit demi sedikit. Sebagian besar pekerjaan masyarakat di sekitar kawasan Jamus adalah petani dan berkebun serta berjualan. Hal ini memang cocok untuk masyarakat di sekitar lereng gunung yang memang terdiri dari hamparan lahan dengan air yang berlimpah. Masyarakat di desa Girikerto tidak pernah mengalami kekeringan karena air terus mengalir dari sumber-sumber air yang ada di daerah tersebut. Bahkan masyarakat disana jarang yang memakai mesin pompa air untuk kepentingan sehari-hari maupun untuk mengairi sawah dan lading mereka.

Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Kepala desa Girikerto Bapak SL :

“Masyarakat disini tidak ada yang menggunakan mesin pompa air mas, semua dari sumber di gunung. Air dari itu saja sudah berlimpah, jadi tidak perlu pakai mesin air. Kami memasang pipa-pipa untuk mengairi sawah maupun untuk sampai di rumah-rumah penduduk. Bahkan sumur saja disini jarang mas”. (wawancara pada tanggal 26 Mei 2016)

Kawasan Jamus memang kaya sekali akan air karena banyak sekali sumber-sumber air di sekitar desa Girikerto dan terlebih memang berada di lereng gunung yang pada umumnya memang memiliki kandungan air yang lebih. Ini menjadi keuntungan tersendiri untuk masyarakat desa Girikerto karena bisa berhemat dari biaya, tidak seperti di daerah lain atau perkotaan yang pasti mengeluarkan biaya listrik untuk memompa air menggunakan mesin.

Adanya pengembangan di Jamus ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar Jamus untuk bekerja. Selain itu masyarakat di sekitar Jamus dahulu diperkenankan untuk mengolah lahan di sekitar Jamus supaya dimanfaatkan untuk bercocok tanam dan bisa menambah penghasilan warga sekitar. Adanya pengelolaan oleh PT. Candi Loka ini membuka lapangan pekerjaan terutama bagi masyarakat di sekitar Jamus untuk bekerja di perusahaan tersebut. Masyarakat di sekitar Agrowisata Jamus banyak yang bekerja sebagai tenaga pemetik teh, maupun sebagai karyawan di dalam pabrik dan juga sebagai tenaga keamanan.

Berikut penjelasan dari Bapak Prb Kepala Tata Usaha PT. Candi Loka :

“Semenjak kami megelola Jamus ini, masyarakat banyak yang bekerja disini. Baik sebagai tenaga pemetik teh, maupun karyawan di dalam pabrik dan juga sebagai tenaga keamanan. Sehingga kami juga berperan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat disekitar sini maupun yang dari luar Girikerto”. (wawancara pada tanggal 21 Maret 2016)

Dampak positif dari adanya pengelolaan kebun teh di Jamus ini memang memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat Girikerto. Terutama semenjak kawasan Agrowisata ini mulai dikenal luas oleh masyarakat luar, dari pihak pemerintah juga melakukan perbaikan-perbaikan terutama dari akses jalan sepanjang kawasan Agrowisata Jamus. Sehingga hal ini memudahkan masyarakat sekitar dalam mengakses daerah luar dan untuk menunjang lancarnya arus perekonomian di desa Girikerto. Dan dengan akses jalan yang mudah, maka juga bisa menghemat pengeluaran biaya yang tinggi.

Pemerintah juga memberikan wewenang kepada masyarakat Girikerto untuk mengelola penginapan atau *home stay* sebagai sarana bagi pengunjung untuk menginap. Namun dari penelusuran peneliti hanya terdapat satu *home stay*.

Pemungutan biaya masuk dan parkir juga merupakan pendapatan yang sangat besar bagi perusahaan dari aktifitas pengembangan pariwisata ini. Selain itu juga dari tiket masuk ke wahana yang ada, seperti kolam bermain anak “Sumber Lanang”. Pihak pengelola melalui koperasi karyawan PT. Candi Loka juga berinisiatif membuat produk teh asli Jamus yang dikemas dengan bungkus yang menarik dan menjajakannya di kios-kios yang ada di kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus.

2) Dampak Negatif

Seperti halnya dampak-dampak yang lain di bidang pengembangan pariwisata seperti dari segi lingkungan fisik dan sosial-budaya, dampak dari hubungan pengembangan pariwisata dari segi ekonomi ini juga ada yang bersifat negatif. Dampak ini banyak dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus yang dalam hal ini masyarakat desa Girikerto. Dahulu sebelum di kelola oleh PT. Candi Loka, masyarakat masih diperbolehkan untuk memanfaatkan lahan yang di sekitar rumah mereka untuk di kelola sendiri dan menikmati hasilnya. Namun, lama-kelamaan pihak perusahaan melarang aktifitas tersebut dan sehingga masyarakat tidak bisa lagi merasakan hasil dari pengelolaan kebun teh yang di sekitar kawasan mereka.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak SL Kepala Desa Girikerto :

“Mohon maaf mas, dulu lahan-lahan di sekitar rumah penduduk itu boleh dikelola oleh warga untuk dimanfaatkan dan hasilnya pun di ambil oleh warga. Namun sekarang sudah tidak boleh, karena wilayah Jamus sudah dimiliki oleh swasta. Jadi kami dulu juga ikut merasakan hasil dari Jamus namun sekarang sudah tidak bisa”. (wawancara pada tanggal 26 Mei 2016)

Penuturan Bapak SL di atas menunjukkan sisi negatif dari pihak swasta, namun di lain hal, tanah tersebut memang sekarang menjadi milik perusahaan secara sah sehingga masyarakat dilarang mengambil atau memanfaatkan lagi area yang menjadi milik perusahaan. Akan tetapi, hal ini menjadi dampak negatif dari adanya kepemilikan kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus yang di kelola oleh pihak swasta.

Selain itu, untuk perekrutan tenaga kerja di perkebunan Jamus menurut Bapak SL sebagian besar terdiri dari masyarakat di luar desa Girikerto atau kadang hanya diambil dari masyarakat yang berada di dusun Jamus saja. Berikut penuturan beliau :

“Kalau dikatakan menyerap tenaga kerja itu tidak terlalu banyak mas. Malah sebagian besar itu pekerja di Jamus bukan dari warga di desa ini (Girikerto). Mungkin sekitar 75 sampai 90 persen berasal dari luar Girikerto. Bahkan ada yang dari Jawa Tengah juga. Mungkin kalau masyarakat di kampung Jamus itu baru banyak mas. Untuk diluar itu yang dari desa Girikerto jumlahnya sedikit. Kebanyakan dari pemegang jabatan di sana seperti mandor dan kepala-kepala yang lain bukan masyarakat pribumi, jadi masyarakat seperti tergeser”. (wawancara pada tanggal 26 Mei 2016)

Memang menjadi suatu hal yang tidak adil bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Jamus tetapi tidak bisa merasakan hasil dari adanya kawasan Jamus tersebut. Masyarakat lain di luar dusun Jamus seperti terpinggirkan, padahal Jamus juga berada di Desa Girikerto. Sisi negatif juga dirasakan oleh warga yang ingin berjualan di area Jamus yang berasal dari luar Dusun Jamus. Mereka tidak bisa berjualan menetap di area kawasan Agrowisata Jamus. Yang bisa berjualan di area tersebut hanyalah warga yang berada di dusun Jamus dan biasanya yang sudah memiliki hubungan khusus dengan pihak petinggi di PT. Candi Loka.

Sehingga masyarakat dari luar dusun Jamus hanya bisa berjualan keliling di area Agrowisata Perkebunan Teh Jamus.

Pernyataan diatas penulis dapat dari perkataan Bapak SL sebagai Kepala Desa Girikerto :

“Warga yang dari luar Jamus itu susah kalau mau berjualan di kawasan Jamus, bahkan bisa dikatakan tidak bisa. Kecuali jika jualannya itu tidak menetap, seperti pedagang keliling itu bebas keluar masuk area wisata, namun juga harus ijin dulu. Itupun mereka (pedagang keliling) yang biasanya yang sudah punya kenalan dengan orang sana. Yang berjualan disana yang punya toko, warung atau kios itu ya yang dari kerabat perusahaan kebanyakan dan yang tinggal di dusun Jamus”. (wawancara pada tanggal 26 Mei 2016)

Penjelasan Bapak SL juga mengindikasikan bahwa pendapatan dari kawasan Jamus itu lebih menjadi milik perusahaan, masyarakat desa Girikerto yang statusnya hanya sebagai desa penyangga adanya kawasan Jamus itu hanyalah mendapat pengaruh sedikit. Situasi ini mengharuskan pihak pemerintah sebagai katalisator harus mempunyai inisiatif untuk mengatasi kondisi ini dengan memberikan aturan ataupun menjembatani antara kedua belah pihak supaya terjalin hubungan kemitraan yang baik.

Selain itu, dampak negatif dari adanya pengembangan pariwisata dari segi ekonomi adalah mahal nya harga tanah di sekitar kawasan wisata. Hal ini juga terjadi di kawasan Jamus. Jika masyarakat ataupun pemerintah mau membeli tanah di area kawasan wisata Perkebunan Teh Jamus, mereka harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit jumlahnya dan bahkan bisa di atas rata-rata. Mahalnya harga tanah ini juga dikatakan oleh Bapak WR Kasi Promosi Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi :

“Kami mau mengembangkan area di sana itu selain terbentur masalah perijinan juga terbentur masalah harga tanah yang cukup tinggi. Sehingga sampai sekarang belum ada kesepakatan atau titik temu untuk menyelesaikannya. Mungkin beberapa waktu ke depan kemitraan itu akan terlaksana. Karena ini tinggal menunggu deal nya dari pusat”. (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016)

Peningkatan harga tanah di area wisata tersebut memang wajar seperti pada kawasan-kawasan wisata lainnya di daerah lain. Hal ini terjadi karena semakin berkembangnya kawasan tersebut sehingga mengakibatkan adanya asumsi bahwa kawasan wisata tersebut mempunyai potensi yang besar untuk digunakan. Oleh karena itu, pemilik tanah menjualnya dengan harga yang tinggi karena memiliki prospek yang menjanjikan untuk kedepannya. Kenaikan ini juga dibarengi dengan kenaikan harga-harga makanan yang ada di sekitar kawasan Perkebunan Teh Jamus yang tidak seperti di daerah lain di Kabupaten Ngawi. Harga makanan di kawasan Jamus juga cukup tinggi jika dibanding harga pasaran yang ada. Peningkatan harga juga terjadi pada biaya masuk maupun biaya parkir di Agrowisata Jamus terlebih pada hari-hari libur tertentu seperti tahun baru dan hari raya Idul Fitri

Itulah pemaparan mengenai dampak pengembangan pariwisata jika dilihat dari segi ekonomi yang bersifat negatif. Dalam upaya pengembangan pariwisata di suatu daerah, tentu saja terdapat faktor-faktor yang berpengaruh akan kelancaran aktifitas tersebut. Faktor tersebut bisa merupakan faktor pendorong ataupun justru menjadi faktor penghambat yang akan memperlambat laju pengembangan pariwisata. Faktor tersebut perlu dilakukan analisis untuk mengurangi resiko yang ada.

Berikut tabel hasil temuan peneliti mengenai dampak pengembangan pariwisata di Perkebunan Teh Jamus Kabupaten Ngawi :

Tabel 4. Temuan Dampak Pengembangan Pariwisata Model Mill

No	Dampak	Dampak Positif	Dampak Negatif
1	Kondisi Fisik	a. Terpeliharanya kondisi alam sekitar b. Terpeliharanya benda-benda ataupun bangunan bersejarah c. Terciptanya kondisi alam yang bersih d. Terciptanya wahana-wahana wisata baru di jamus	a. Adanya pembukaan lahan untuk area parkir, perumahan, penambahan wahana wisata, dan tempat berjualan. b. Adanya pengerukan tanah di kawasan Jamus c. Adanya kelongsoran yang ditimbulkan akibat aliran air d. Adanya polusi udara disebabkan banyaknya kendaraan yang keluar masuk Jamus dan pabrik teh
2	Sosial-Budaya	a. Terjaganya perilaku ramah tamah warga sekitar b. Terjaganya adat istiadat yang ada di masyarakat c. Adanya toleransi agama dan tingkat religiusitas yang tinggi d. Terjaganya tempat-tempat bersejarah e. Adanya unsur modernitas	a. Tertutupnya masyarakat sekitar kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus b. Hilangnya adat istiadat di masyarakat c. Adanya bangunan bersejarah yang mengalami kerusakan d. Hilangnya identitas masyarakat setempat baik dari cara berperilaku dan berpakaian
3	Ekonomi	a. Terangkatnya perekonomian masyarakat sekitar dan juga pengelola wisata b. Terbukanya kesempatan bagi masyarakat ataupun pengelola untuk mendirikan usaha seperti: warung, toko, kios-kios, rumah makan, home stay atau penginapan	a. Adanya pembatasan dari pengelola untuk masyarakat dalam mengolah lahan sekitar Jamus b. Keegoisan pihak pengelola dalam hal perekrutan tenaga kerja c. Adanya pemanfaatan keuntungan secara mutlak oleh pihak pengelola d. Mahalnya harga-harga

	c. Menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat d. Adanya perbaikan sarana dan prasarana seperti: jalan, lampu penerangan, listrik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain e. Meningkatkan peran dari masing-masing aktor yang berkepentingan	tertentu di sekitar kawasan wisata seperti : tanah, bahan-bahan baku, makanan, dan lain-lain e. Adanya ketidakstabilan pendapatan dari masyarakat maupun pengelola wisata terutama pada saat momen-momen tertentu.
--	---	--

Sumber : Olahan Penulis

Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa dalam pengembangan pariwisata di kawasan Jamus ini memiliki dampak baik positif maupun negatif. Beberapa penuturan dari narasumber terkait, juga membenarkan adanya dampak-dampak yang sangat berpengaruh terhadap kawasan Jamus maupun terhadap kondisi masyarakat sekitar. Dampak-dampak tersebut berdasarkan penyajian data yang peneliti lakukan bisa dilihat dari dampak dalam hal kondisi fisik, sosial-budaya dan dampak ekonomi. Dampak tersebut seperti penulis rangkum dalam tabel diatas. Dan pada dasarnya, pengembangan pariwisata memang dilakukan untuk membuat potensi yang ada di kawasan tersebut agar memiliki nilai lebih sehingga bisa menimbulkan kebermanfaatan baik bagi pemerintah, pengelola wisata maupun juga untuk masyarakat. Selain itu pengunjung juga merasakan wahana wisata yang berkualitas dan menjadikan tempat tersebut sebagai tujuan wisata masyarakat.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Hubungan Mutualistik Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, Pengelola Obyek Wisata Perkebunan Teh Jamus dan Masyarakat Sekitar Perkebunan Teh Jamus di Desa Girikerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi

Suatu hubungan kemitraan tidak akan berjalan jika tidak ada faktor yang mempengaruhinya. Sebuah hubungan tersebut mampu terus berjalan karena mendapat pengaruh-pengaruh baik yang sifatnya membangun dan tidak jarang juga ditemui pengaruh yang sifatnya justru merusak adanya hubungan tersebut. Faktor-faktor yang berpengaruh tersebut bisa berasal dari dalam (internal) dan juga dari luar (eksternal) hubungan tetapi mempunyai dampak terhadap jalannya kemitraan, terutama kemitraan yang terjalin antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Hal ini juga terjadi pada hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata Perkebunan Teh Jamus di Kabupaten Ngawi. Langkah-langkah untuk mewujudkan suatu hubungan yang baik (mutualistik) antara ketiga aktor tersebut dalam pengembangan pariwisata di Jamus banyak mendapat pengaruh positif maupun negatif. Berikut penjabaran dari faktor yang menjadi pendukung dan penghambat jalannya hubungan yang baik antara ketiga aktor tersebut dalam pengembangan pariwisata:

a. Faktor Pendukung

Setiap suatu hubungan pasti ada faktor yang mempengaruhi yang menyebabkan hubungan tersebut bisa berjalan dengan baik. Faktor pendukung

pengembangan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus ini bisa dilihat dari penjelasan berikut.

Kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang ada di Kabupaten Ngawi. Hal ini bisa dilihat pada peta wisata Kabupaten Ngawi di atas. Ini seharusnya menjadi alasan perlu terjalinnya hubungan yang mutualistik antara aktor-aktor terkait untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut. Sehingga harapan kedepannya, kawasan ini mampu memberikan pemasukan bagi pengelola perkebunan Jamus dan pemerintah. Disamping itu masyarakat juga akan menerima dampak dari aktifitas pariwisata yang ada sehingga akan terjadi pemerataan ekonomi pada masyarakat sekitar yang menjadi tujuan utama pemerintah dalam pengembangan pariwisata.

Suatu hubungan yang baik tidak akan terjalin jika tidak ada dukungan untuk melaksanakan itu. Dukungan itu harus diwujudkan dalam bentuk kemitraan antara ketiganya. Kemitraan itulah yang nantinya akan menjadi wadah bagi para aktor terkait untuk bersama-sama dalam mengembangkan daerah Jamus sebagai destinasi pariwisata di Kabupaten Ngawi. Dari hasil wawancara diketahui bahwa semua aktor terkait sangat mendukung jika Jamus di kembangkan sebagai kawasan Agrowisata. Berikut ungkapan Bapak WR Kasi Promosi Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi :

“Kami sangat mendukung kalau wilayah Jamus itu dikembangkan menjadi daerah wisata. Bahkan kami memang sudah merencanakan hal tersebut. Kami sudah membuat rancangan pengembangan untuk kawasan tersebut. Rancangan tersebut sudah selesai sampai penganggaran pun juga sudah selesai”. (wawancara pada tanggal 23 Mei 2016)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Desa Girikerto :

“Kalau kami sebagai masyarakat ya setuju saja jika kami ikut di gandeng dalam pengembangan di Jamus. Kami sangat senang jika itu bisa terjadi. Dengan adanya hal seperti itu makamasyarakat itu juga bisa ikut menjaga dan sekaligus merasakan hasil dari Jamus tersebut”.

Begitu juga dengan pihak PT. Candi Loka sbenarnya juga sangat mendukung jika kawasan Jamus akan dikembangkan sebagai tempat wisata. Namun mereka masih belum bisa berbuat apa-apa karena pimpinan tertinggi PT. Candi Loka yang ad di Jakarta sebenarnya belum menghendaki rencana tersebut. Namun kemungkinan itu bisa saja terjadi jika ada pembicaraan yang lebih intim dari pemerintah dan perusahaan.

Permasalahan yang perlu penanganan dengan serius untuk terjalinnya hubungan yang baik dalam pengembangan pariwisata di Jamus salah satunya adalah perlu adanya lembaga yang mempunyai wewenang yang lebih tinggi dan bisa menjadi penengah dan sekaligus pemrakarsa terjalinnya kemitraan tersebut. Hal tersebut menjadi suatu keharusan melihat kondisi yang ada sekarang dimana belum adanya titik temu atau kesepakatan antara pihak pemerintah dan pengelola perkebunan teh Jamus untuk menjalin kemitraan dalam pengembangan pariwisata.

Selain itu pihak yang mempunyai wewenang tersebut juga diharapkan bisa mempermudah urusan administratif mengenai status dari pengelolaan kawasan Jamus yang dulunya hanya sebagai perkebunan diubah menjadi kawasan Agrowisata.

Kemitraan ini tidak akan terjadi tanpa di bumbui dengan sifat yang saling membutuhkan antara ketiga aktor. Mereka harus menanamkan sifat bahwasanya pengembangan potensi wisata yang ada di Jamus ini tidak akan berjalan lancar

apabila mereka tidak saling memiliki rasa saling membutuhkan satu sama lain. Karena pada dasarnya, saling membutuhkan antar ketiga aktor memang pasti menjadi suatu keharusan pada hubungan antar ketiganya. Seperti contohnya pihak pengelola (swasta) membutuhkan pekerja ataupun karyawan sebagai tenaga perusahaan dan tenaga lainnya untuk menunjang kelancaran pengembangan industri pariwisata. Sedangkan pemerintah juga berperan dalam pembentukan regulasi yang nantinya akan mengatur hubungan antar ketiganya, selain itu pemerintah juga sebagai perantara terjalinnya kemitraan dan juga sebagai penyedia fasilitas-fasilitas umum seperti akses jalan, penerangan, air bersih, kebersihan, dan lain-lain. Di lain hal, masyarakat juga harus berperan dalam mengawasi serta hubungan tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan awal melalui terbentuknya lembaga-lembaga masyarakat, paguyuban, ataupun kelompok-kelompok kepentingan lainnya.

Dilihat dari potensi yang ada di kawasan Jamus ini, Jamus memiliki potensi yang sangat menarik untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Jamus yang terletak di lereng Gunung Lawu merupakan daerah yang sangat cocok dikembangkan sebagai daerah agrowisata. Kondisi alam yang ada dengan pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung, selain itu dengan hamparan kebun teh yang hijau dan asri semakin menambah keasrian daerah tersebut. Didukung oleh jumlah pengunjung yang jumlahnya terbilang fantastis jika dibandingkan dengan daerah tujuan wisata lain di Kabupaten Ngawi.

Potensi ini diakui oleh Bapak HR Kepala Divisi Agrowisata PT. Candi

Loka :

“Jamus memang memiliki pemandangan alam yang sangat eksotik dan memiliki daya tarik yang luar biasa menurut saya. Hamparan teh nan luas dan hijau membuat mata jadi segar. Hawanya yang sejuk, jadi memang sangat cocok jika kawasan ini dikembangkan sebagai kawasan agrowisata jika melihat potensi yang ada”. (wawancara pada tanggal 8 Juni 2016)

Jika dilihat dari kacamata pariwisata, Perkebunan Teh Jamus merupakan daerah tujuan wisata yang paling memiliki daya tarik paling tinggi di Kabupaten Ngawi. Hanya perlu pengembangan yang tepat pada kawasan tersebut.

b. **Faktor Penghambat**

Status kepemilikan lahan yang menjadi milik swasta secara penuh memang menjadi kendala dalam upaya pengembangan daerah Jamus. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak SL Kepala Desa Girikerto :

“Menurut saya, daerah Jamus itu susah untuk dikembangkan yak arena di kelola oleh swasta. Pihak swasta membatasi pengelolaan yang ada di Jamus dan mengambil semua hasilnya. Pihak pemerintah saja susah untuk menggandeng Perusahaan itu, apalagi kami yang hanya masyarakat. Harapannya itu Jamus dikelola oleh Pemda”. (wawancara pada tanggal 26 Mei 2016)

Sulitnya mencapai kata sepakat yang dialami oleh pemerintah adalah salah satu bukti bahwa pihak pengelola tidak ingin membagi daerah tersebut untuk kepentingan umum, melainkan hanya ingin dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan saja. Kendala ini bisa saja diatasi jika dari pihak Jamus menyetujui rencana pemerintah untuk mengembangkan daerah tersebut. Masyarakat menghendaki kepemilikan wilayah Jamus untuk segera di ambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi. Karena menurut mereka jika kawasan

tersebut di kelola oleh pemerintah, maka masyarakat itu juga merasa memiliki kawasan tersebut.

Namun melihat kontrak kepemilikan wilayah tersebut yang masih berakhir pada tahun 2026, harapan dari masyarakat belum bisa terlaksana dengan mudahnya. Yang diperlukan sekarang hanyalah upaya untuk mengajak perusahaan pengelola untuk bersama-sama mengembangkan daerah tersebut sebagai daerah tujuan wisata.

Kendala utama yang menjadi alasan PT. Candi Loka untuk pengembangan kawasan Jamus sebagai daerah wisata adalah amanat dari surat keterangan kepemilikan perkebunan Jamus. Dimana dalam surat keputusan tersebut menjelaskan bahwasanya perusahaan pengelola hanya boleh memanfaatkan area tersebut sebagai daerah perkebunan. Itulah yang penulis sering kali dengar dari ucapan pihak PT. Candi Loka, seperti perkataan Bapak HR dibawah ini :

“Kami mau mengembangkan itu susah mas, karena kami terbentur ijin dari pengelolaan kawasan perkebunan ini. Kan sebenarnya daerah ini hanya untuk perkebunan, bukan sebagai tempat wisata. Tetapi karena pengunjung yang datang kesini sangat banyak, maka kami juga melayani dengan senang hati”. (wawancara pada tanggal 8 Juni 2016)

Hal tersebut menjadi topik utama kendala yang dihadapi baik oleh pihak pengelola maupun oleh pemerintah. Akan tetapi daerah Perkebunan Teh Jamus ini juga masuk menjadi destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ngawi, hal ini juga nampak jelas dalam peta pariwisata Kabupaten Ngawi. Pihak perusahaan ketika di tanya mengenai mengapa daerah Jamus yang seyogyanya bukan kawasan untuk wisata tetapi mereka membuka wahana-wahana wisata di kawasan tersebut juga menunjukkan raut kebingungan. Mereka biasanya menjawabnya

hanya untuk melayani pengunjung yang datang kesini. Jika hanya melayani pengunjung yang datang, kenapa mereka menarik retribusi seperti biaya masuk dan biaya parkir serta biaya untuk masuk ke wahana yang ada. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan ingin memanfaatkan kondisi yang ada karena kawasan Jamus memiliki pengunjung yang banyak.

Perencanaan pengembangan kawasan Jamus menjadi agenda utama yang ingin dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Rencana tersebut sudah dimulai dengan pembuatan *Detail Engineering Design* (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun antara kedua belah pihak belum menemui titik temu untuk mencapai kata sepakat. Menurut rencana yang hendak dilakukan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi untuk mengembangkan area Jamus, pihaknya meminta lahan seluas 10 Ha di bagian atas yang nantinya akan dimanfaatkan untuk area wisata. Rencana ini berlainan dengan apa yang dikehendaki oleh PT. Candi Loka yang hanya mau memberikan lahan tersebut di bagian bawah area perkebunan. Mereka berasalan bahwa jika nanti di bagian atas dikembangkan untuk pariwisata, takutnya akan merusak area kebun dan mengganggu pengolahan teh.

Selain permasalahan letak area yang ingin dijadikan tempat wisata diatas, pihak pemerintah juga terkendala dengan harga yang diberikan oleh PT. Candi Loka. Harga yang diberikan oleh PT. Candi Loka lumayan tinggi untuk tanah seluas 10 Ha, pihak perusahaan memberikan harga tinggi karena sangat berpotensi wilayah tersebut dan banyak peminat dari pihak lain untuk

membelinya. Mahalnya harga tanah di Jamus juga tidak lepas dari banyaknya jumlah kunjungan ke area tersebut sehingga banyak peminat yang ingin membeli lahan di wilayah Jamus baik untuk dimanfaatkan sebagai perumahan, pendirian toko, maupun pengembangan usaha lainnya. Banyaknya minat orang untuk membeli lahan di Jamus seperti yang diungkapkan Oleh Bapak HR :

“Daerah sini sangat berpotensi sebenarnya jika digunakan untuk mendirikan usaha. Banyak yang menginginkan lahan di daerah ini, baik dari kalangan pengusaha, orang pribadi maupun pemerintah. Mereka juga mempunyai banyak tujuan dengan menyewa lahan disini. Ada yang ingin digunakan untuk usaha maupun mendirikan rumah tempat tinggal. Karena kan hawanya sejuk jauh dari kebisingan, maka cocok untuk menenangkan pikiran”. (wawancara pada tanggal 8 Juni 2016)

Hal inilah yang menjadi penyebab mahalnya harga lahan di kawasan Jamus. Sehingga pemerintah juga harus mempertimbangkan hal ini dengan baik. Pengelolaan kawasan di Jamus untuk sektor pariwisata harus dimulai dari pengurusan ijin status kawasan Jamus. Karena Surat Keputusan dari Badan Pertanahan Nasional mengenai status Jamus adalah diperuntukkan untuk perkebunan pengelolaan teh, bukan untuk kawasan pariwisata. Pemerintah melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi sudah menyiapkan proposal untuk dikirimkan ke pusat dan meminta ijin untuk pengelolaan daerah Jamus sebagai daerah wisata. Namun menurut keterangan dari Bapak WR, pengajuan tersebut susah dilakukan. Karena pengurusan permintaan lahan untuk dikelola sebagai tempat wisata ini menurutnya harus dilakukan sewaktu kontrak pertama pengelolaan PT. Candi Loka di Perkebunan Teh Jamus berakhir pada tahun 2000. Sehingga menyebabkan sampai sekarang juga masih belum tuntas mengenai surat ijin tersebut.

Seperti yang penulis jelaskan di atas mengenai faktor pendukung jalannya kemitraan antara ketiga aktor ini adalah harus adanya sifat saling membutuhkan. Sifat tersebut harus dimiliki oleh setiap aktor yang terlibat terutama pihak pengelola dan pemerintah. Dalam hal ini, pihak PT. Candi Loka seakan-akan ingin memetik hasil pengelolaan Jamus untuk kepentingan sendiri. Hal ini terlihat seperti pengelolaan biaya masuk Perkebunan Teh Jamus yang dahulunya di kelola oleh masyarakat setempat, sekarang dikelola sepenuhnya oleh pihak perusahaan. Selain itu lahan-lahan yang ada di sekitar kawasan pemukiman penduduk dahulu boleh dimanfaatkan oleh penduduk untuk diambil hasilnya, namun sekarang sudah tidak lagi. Dan bentuk keegoisan ini juga diperlihatkan dari perekrutan tenaga kerja di Jamus yang kebanyakan bukan berasal dari wilayah sekitar desa Girikerto, melainkan hanya dari dusun Jamus yang penduduknya memang banyak yang dari kerabat dekat perusahaan serta banyak yang dari luar Desa Girikerto. Hal inilah yang menyebabkan seakan-akan yang menerima dampak dari aktifitas pengembangan pariwisata di Jamus hanyalah warga yang berada di Dusun Jamus dan bahkan orang yang berasal dari luar Girikerto. Jadi masyarakat sekitar merasa bahwa mereka kurang mendapatkan kesempatan dan menikmati hasil dari aktifitas pengembangan wisata yang ada di Jamus tersebut.

Berikut rangkuman temuan peneliti dalam bentuk tabel mengenai faktor pendukung dan penghambat hubungan pengembangan pariwisata di Perkebunan Teh Jamus :

Tabel 5. Temuan Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Pariwisata

No	Faktor	Temuan Peneliti
1	Pendukung	a. Agrowisata Perkebunan Teh Jamus Masuk dalam Peta Wisata Kabupaten Ngawi b. Adanya Dukungan dari Aktor terkait (Pemerintah, PT. Candi Loka, dan Masyarakat Desa Girikerto) c. Adanya Pihak Penengah Kemitraan d. Adanya Sifat Saling Membutuhkan antar Ketiga Aktor (Pemerintah, PT. Candi Loka, dan Masyarakat) e. Potensi dan Daya Tarik wisata yang ada di Perkebunan Teh Jamus
2	Penghambat	a. Lahan masih Menjadi Milik Pribadi (Swasta) b. Status Pengelolaan Perkebunan Teh Jamus c. Belum adanya Titik Temu dalam Perencanaan Pengembangan d. Mahalnya Harga Tanah di Kawasan Jamus e. Sulitnya Mendapatkan Ijin untuk Pengelolaan Kawasan Jamus f. Adanya Sifat Egoisme dari Pihak Swasta (PT. Candi Loka)

Sumber : Olahan Penulis

Kesimpulan yang bisa diambil adalah dalam hubungan pengembangan di kawasan Jamus terdapat berbagai macam kendala yang muncul. Kendala-kendala tersebut ada yang bersifat memperlancar jalannya hubungan pengembangan dan ada juga yang bersifat memperlambat atau menghambat proses pengembangan yang hendak dilakukan. Faktor-faktor tersebut menjadi bumbu dalam proses pengembangan yang hendak dilakukan oleh pemerintah dan pihak pengelola Jamus saat ini. Faktor-faktor pendukung dan penghambat jalannya hubungan antar aktor tersebut seperti yang penulis rangkum dalam tabel diatas.

C. Pembahasan

1. Hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, Pengelola Obyek Wisata Perkebunan Teh Jamus Kabupaten Ngawi dan Masyarakat Sekitar dalam Pengembangan Pariwisata selama ini ditinjau dari segi potensi wisata, bentuk hubungan dan infrastruktur

Pergeseran paradigma ilmu administrasi yang dahulunya sebagai ilmu politik sekarang telah berubah menjadi administrasi yang mengedepankan pelayanan dan juga mengadopsi unsur-unsur dari bisnis sebagai perwujudan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Pemerintah melalui inovasinya juga melakukan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya agar dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri. Pemerintah banyak melakukan inovasi-inovasi dalam pembangunan daerahnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea 4 (empat). Berikut petikan dari bunyi alinea 4 (empat) : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Amanat yang ada dalam dasar negara Indonesia merupakan suatu keharusan yang harus diwujudkan oleh pemerintah sebagai bagian dari pembangunan bangsa.

Pembangunan di Indonesia seyogyanya harus diperuntukkan bagi masyarakatnya. Karena negara ini terbentuk pada dasarnya adalah dari

kesepakatan para penduduk yang mempunyai cita-cita yang sama dan memberikan amanahnya kepada pemerintah untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sehingga masyarakat berhak meminta kepada pemerintah janji yang telah ditetapkan bersama tersebut terutama yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pembangunan yang ada bukan justru menjadi milik dari pemerintah. Seperti yang ada sekarang, banyak oknum-oknum pemerintah yang memanfaatkan uang negara yang sejatinya juga berasal dari penduduk dengan dalih untuk pembangunan di suatu daerah, namun yang terjadi adalah anggaran tersebut di pakai sendiri untuk keperluan pribadinya.

Masyarakat hanya bisa menuntut jika kasus tersebut diketahui dan ramai diberitakan oleh media massa, namun bagaimana dengan uang-uang yang dimanfaatkan oleh oknum tersebut jika tidak diketahui oleh masyarakat. Tentu saja masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Masyarakat hanya seperti sumber daya yang terus dimanfaatkan oleh oknum pemerintah untuk memperkaya dan memenuhi kebutuhan pribadinya tetapi pengambilan sumber daya itu tanpa diketahui oleh pemilik sumber daya tersebut. Sungguh suatu hal yang miris yang terjadi di negara ini.

Pemerintah harus mempunyai strategi yang jitu untuk penanganan kasus pemanfaatan aset negara oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemanfaatan aset negara ini bisa juga dikatakan sebagai korupsi. Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi tindak kejahatan ini juga tidak sedikit. Pemerintah dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 juga

memerintahkan untuk memperkuat semangat anti korupsi. Seperti yang dikatakan oleh Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki berikut :

“Untuk memperkuat semangat anti-korupsi tersebut, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”. (Prabowo, 2015)

Semua ini tidak lain hanyalah untuk menjaga aset negara yang keberadaannya diperuntukkan bagi masyarakat. Semangat yang di instruksikan presiden tersebut haru ditanamkan dalam diri setiap warga negara terutama para aktor pemerintah agar mereka menyadari bahwa uang negara bukan merupakan uangnya sendiri melainkan uang milik masyarakat yang hanya dititipkan dan untuk dipergunakan bagi kepentingan bangsa.

Berbicara mengenai aset negara, pemerintah daerah juga mempunyai suatu aset yang juga harus di jaga dan diberdayakan. Aset tersebut bisa berupa uang, benda-benda bersejarah, dokumen-dokumen, tempat-tempat wisata dan lain sebagainya. Termasuk kabupaten Ngawi yang juga memiliki banyak aset-aset daerah yang harus mendapatkan perhatian serius. Salah satu aset tersebut adalah Agrowisata Perkebunan Teh Jamus yang keberadaannya sangat sulit bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi untuk mengembangkan dan memberdayakan daerah wisata tersebut.

Perkebunan Teh Jamus merupakan suatu potensi pariwisata yang besar yang ada di Kabupaten Ngawi. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung di kawasan Agrowisata tersebut. Akan tetapi, pengembangan di kawasan Jamus mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kendala itu datang dari pihak pengelola perkebunan teh Jamus, pemerintah daerah, maupun

masyarakat setempat. Hubungan yang terjadi antar ketiganya bisa dikatakan baik, namun baik disini bukan dalam arti hubungan untuk mengembangkan kawasan Jamus. Melainkan hanya hubungan secara pribadi saja. Jika dalam pengembangan kawasan Agrowisata Jamus, ketiga aktor masih banyak mengalami hambatan.

Padahal, dengan terjalinnya suatu bentuk kemitraan yang baik maka akan didapatkan arah pengembangan yang bagus untuk lebih meningkatkan potensi yang ada di Jamus. Karena menurut Munasef (1995: 1), pengembangan pariwisata adalah segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana dan prasarana, barang dan jasa fasilitas yang diperlukan, guna melayani kebutuhan wisatawan. Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan pariwisata adalah suatu kegiatan yang sudah terpola dan terkoordinasi dengan baik dengan tujuan untuk menambah nilai daripada lokasi wisata demi menarik minat wisatawan dengan cara penyediaan segala bentuk fasilitas, sarana dan prasarana baik yang berbentuk jasa maupun non jasa.

Kawasan Perkebunan Teh Jamus merupakan kawasan potensial yang perlu pengembangan yang tepat. Pengembangan tersebut perlu dilakukan dengan adanya kemitraan antar aktor-aktor terkait, baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Peran antar ketiganya menjadi suatu hal yang *urgent* sebagai dasar pengembangan pariwisata di Agrowisata Perkebunan Teh Jamus. Untuk mengawali rencana pengembangan tersebut, maka diperlukan suatu hubungan yang baik antar ketiganya. Kemitraan yang dikembangkan adalah kemitraan yang setara antara para pelaku sesuai dengan kemampuan kontribusinya. Kemitraan

yang setara memerlukan pula pemahaman yang kuat terhadap hak dan tanggung jawab serta peranan masing-masing pelaku (Kartasasmita, 1996: 2).

Kemitraan tersebut harus menggambarkan tujuan yang hendak dicapai dalam pengembangan pariwisata di Jamus. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses kemitraan tersebut haruslah mampu berjalan beriringan dan serasi. Seperti yang dikatakan Pamudji (1985: 12) bahwa kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi itu pada posisi yang seimbang, serasi, dan selaras. Penyatuan ketiga *mindset* menjadi agenda utama dalam diterapkannya kemitraan tersebut. Sehingga aktor-aktor tersebut harapannya mampu bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sudah ditetapkan demi mewujudkan pengembangan pariwisata yang telah direncanakan.

Kemitraan tersebut pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan bagi para pihak terkait. Jadi bukan hanya satu pihak saja yang akan mendapatkan keuntungan dari adanya kemitraan tersebut, tetapi semua pihak akan merasakan dampak dari aktifitas kemitraan tersebut dan sama-sama saling mendapatkan keuntungan. Dalam kaitannya dengan kemitraan, terdapat beberapa model kemitraan yang sesuai dengan apa yang ada di Agrowisata Perkebunan Teh Jamus menurut Sulistiyani (2004 : 130) :

Pertama, *Pseudo Partnership* (kemitraan semu). Kemitraan jenis ini merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta

disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

Kedua, *Mutualism Partnership* (Kemitraan Mutualistik) adalah persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal. Kemitraan semacam ini menjadi dambaan setiap pihak yang melakukan kerjasama. Terutama karena kedua belah pihak akan sama-sama mendapatkan keuntungan maupun tujuan yang diinginkan. Kemitraan seperti ini juga diadopsi dari perilaku hewan dalam simbiosis mutualisme seperti perilaku kerbau dan juga burung.

Yang ketiga adalah *Konjugation Partnership* (Kemitraan Konjugasi). Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogi dari kehidupan “*paramecium*”. Dua *paramecium* melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok, atau perorangan yang memiliki kelemahan didalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Menurut keterangan model-model dari kemitraan diatas mengindikasikan bahwa konsep kemitraan yang terjadi di Perkebunan Teh Jamus antara pengelola

Perkebunan Teh Jamus, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dan masyarakat Desa Girikerto adalah sesuai dengan model “**Kemitraan Semu**” (*Pseudo Partnership*). Hal ini didasari karena bentuk hubungan yang terjadi antara ketiga aktor tersebut masih bersifat sama-samar. Pihak pemerintah merasa perlu untuk mengembangkan daerah tersebut dimulai dengan melakukan perbaikan sarana dan prasarana seperti akses jalan, lampu penerangan, penyediaan fasilitas pendidikan, fasilitas listrik, fasilitas kesehatan dan lain-lain dan dengan pengembangan itu diharapkan dapat menambah pendapatan pemerintah (PAD) serta terwujudnya pemerataan perekonomian masyarakat sekitar. Namun pemerintah belum melakukan kemitraan terhadap pengembangan kawasan Jamus tersebut. Di lain hal, pemerintah juga mengakui keberadaan Jamus sebagai kawasan wisata di Kabupaten Ngawi terbukti dengan masuknya daerah tersebut dalam rencana pengembangan kepariwisataan dan peta wisata Kabupaten Ngawi.

Pihak pengelola Jamus juga sama halnya dengan pihak pemerintah. Mereka merasa memiliki ketergantungan dengan pemerintah dari segi penyediaan sarana penunjang kawasan Agrowisata Jamus. Seperti perijinan, sarana akses jalan, sarana listrik, promosi kepariwisataan, peraturan-peraturan mengenai pengelolaan Perkebunan Teh Jamus dan lain sebagainya. Dengan sederet keperluan tersebut seharusnya pihak pengelola melakukan kemitraan yang terpola dengan pihak pemerintah dan masyarakat. Ketergantungan pihak pengelola juga kepada masyarakat. Seperti dengan penyerapan tenaga-tenaga kerja perkebunan yang berasal warga masyarakat.

Dari segi masyarakat, mereka juga mempunyai ketergantungan kepada perusahaan pengelola dan pemerintah. Masyarakat mempunyai ketergantungan dari segi penyerapan tenaga kerja yang mampu meningkatkan tingkat perekonomiannya, sebagai kawasan untuk mendirikan tempat-tempat usaha seperti warung, pertokoan, kios-kios, penginapan dan lain sebagainya. Selain itu masyarakat juga diuntungkan dari terkenalnya daerah kawasan Jamus tersebut sehingga menyebabkan daerah tersebut dikunjungi oleh orang banyak yang menyebabkan daerah tersebut menjadi maju dari segi perekonomian, gaya hidup, kesehatan, pendidikan dan bangunan-bangunan.

Melihat banyaknya tingkat ketergantungan yang dibutuhkan oleh masyarakat menunjukkan masyarakat juga mempunyai peran dalam pengembangan kawasan tersebut yang perlu di legalkan dalam bentuk kemitraan yang jelas. Namun hal tersebut belum bisa terealisasi karena dibutuhkan peran pemerintah untuk menggandeng masyarakat dalam pengembangan kawasan tersebut serta dengan persetujuan dari pihak pengelola Perkebunan Teh Jamus. Hanya dengan upaya tersebutlah maka masyarakat dapat dilibatkan dalam pengembangan pariwisata di Jamus ini.

Peran dari masing-masing aktor menjadi prioritas utama dalam pengembangan pariwisata. Masing-masing pihak memiliki peran dan manfaat sendiri-sendiri :

- d. Dalam hubungan kemitraan pemerintah dan swasta maka pemerintah berperan menyusun kebijakan dan aturan main serta menyediakan pelayanan perizinan, dan pengembangan kerjasama antara daerah dimana memungkinkan pelaku bisnis di daerah masing-masing bisa saling mengembangkan investasi. Sedangkan dari pihak swasta, kemitraan akan mendorong peran swasta untuk memberikan

lingkungan kondusif daerah sebagai daerah tujuan investasi, pelatihan departemen terkait (industri, tenaga kerja, dan sebagainya), serta kebutuhan untuk transparansi dalam hubungan perizinan dan nilai tambah yang dapat diperoleh dari kegiatan ekonomi lokal.

- e. Dalam hubungan kemitraan pemerintah dan komunitas (masyarakat) maka pemerintah berperan menyusun kebijakan yang memihak kepada kepentingan masyarakat, serta melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Sedangkan bagi masyarakat sendiri kemitraan menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan usaha, dan memperoleh ruang untuk melakukan negosiasi kepada pemerintah dalam memperoleh keadilan dan kesetaraan (Rohmad, 2009: 4-5).

Dari penjelasan diatas menjadikan suatu keharusan bahwa perlunya kemitraan dalam pengembangan pariwisata terutama dalam pengembangan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di Kabupaten Ngawi. Namun hubungan yang ada selama ini belum menunjukkan keseriusan dari masing-masing pihak untuk mau bermitra dan menjalin kesepakatan untuk pengembangan Jamus. Jika dilihat dari kondisi pengembangan yang ada selama ini, pengembangan yang ada bersifat fluktuatif atau bahkan sekarang bisa dikatakan mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan beberapa tahun belakangan.

Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa konsep kemitraan yang terjadi di Perkebunan Teh Jamus antara pengelola Perkebunan Teh Jamus, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dan masyarakat Desa Girikerto adalah sesuai dengan model "**Kemitraan Semu**" (*Pseudo Partnership*). Hal ini didasari karena bentuk hubungan yang terjadi antara ketiga aktor tersebut masih bersifat sama-samar dan belum memiliki keterikatan dalam bentuk kemitraan yang memiliki dasar hukum yang jelas. Sehingga perlu adanya upaya untuk

mewujudkan bentuk kemitraan yang mampu mengembangkan kawasan Jamus dan juga mengangkat taraf hidup masyarakat sekitar Jamus.

2. Dampak dari Hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, Pengelola Objek Wisata Perkebunan Teh Jamus Kabupaten Ngawi dan Masyarakat Sekitar dalam Pengembangan Pariwisata selama ini.

Pengembangan pariwisata pada dasarnya pasti akan menimbulkan dampak dari aktifitas hubungan pengembangan pariwisata yang dilakukan antar aktor terkait. Dampak yang terjadi tersebut sangat berpengaruh pada aspek-aspek kehidupan yang ada seperti dampak dari pengembangan pariwisata yang dijelaskan oleh Mill dalam Widana (2015) membedakan dampak pariwisata sebagai berikut :

4. Dampak kondisi fisik

Dampak ini lebih melihat kondisi lingkungan fisik akibat adanya pengembangan pariwisata. Dampak yang ditimbulkan dari pengembangan pariwisata terhadap kondisi fisik, yaitu sebagai berikut:

c. Dampak positif

Secara teori, dampak pariwisata terhadap kondisi fisik adalah terpeliharanya kebersihan alam lingkungan untuk menarik datangnya wisatawan dan terjaganya keistimewaan lingkungan, seperti hutan-hutan, pantai serta pemandangan alam.

d. Dampak negatif

Adapun dampak negatif pariwisata terhadap kondisi fisik adalah lingkungan yang rusak, seperti meningkatnya kadar polusi baik air, udara, suara dan kemacetan lalu lintas, pembukaan hutan untuk ladang luas, lokasi perumahan, jalan, parkir, dan hilangnya suasana alam karena hilangnya area hutan, kehidupan satwa liar, dan kesejukan udara.

5. Dampak sosial budaya

Dampak ini seringkali disoroti sebagai dampak negatif dari perkembangan pariwisata, padahal sebenarnya pariwisata juga membawa dampak positif dalam segi sosial dan budaya. Adapun dampak positif dan negatif, yaitu sebagai berikut:

c. Dampak positif

Dampak positif pariwisata terhadap sosial budaya adalah terpeliharanya bangunan-bangunan yang menyimpan nilai-nilai budaya dan tempat-tempat yang bersejarah, terpeliharanya kebudayaan tradisional, seni, tarian, adat-istiadat dan cara berpakaian.

d. Dampak negatif

Adapun dampak negatif pariwisata terhadap sosial budaya adalah rusaknya kebudayaan dan tempat-tempat bersejarah karena ulah manusia, komersialisasi budaya, meningkatnya kriminalitas, konsumerisme masyarakat lokal, dan prostitusi, terkikisnya nilai-

nilai budaya dan norma-norma masyarakat karena interaksi dengan masyarakat asing.

6. Dampak ekonomi

Secara ringkas, kegiatan pariwisata dapat memberikan dampak di bidang ekonomi khususnya mengenai seperti di bawah ini:

c. Dampak positif

Dampak positif pariwisata terhadap ekonomi seperti terbukanya lapangan pekerjaan baru, meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat, meningkatkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing, membantu menanggung beban pembangunan sarana dan prasarana setempat, dan meningkatkan kemampuan manajerial dan keterampilan masyarakat yang memacu kegiatan ekonomi lainnya.

d. Dampak negatif

Selain dampak positif, dampak negatif pariwisata terhadap ekonomi seperti meningkatkan biaya pembangunan sarana dan prasarana, meningkatkan harga barang-barang lokal dan bahan pokok, peningkatan yang sangat tinggi tetapi hanya musiman, sehingga pendapatan masyarakat naik dan turun, dan mengalirnya uang keluar negeri karena konsumen menuntut barang-barang impor untuk bahan konsumsi tertentu.

Berikut penjelasan dari dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya aktifitas pengembangan pariwisata di Agrowisata Perkebunan Teh Jamus :

a. Hubungan yang Berdampak pada Kondisi Fisik

1) Dampak Positif

Dampak yang terjadi pada kondisi lingkungan Jamus maupun lingkungan disekitar kawasan Jamus jika dilihat dari sisi positif keberadaan Jamus bisa dibilang bagus. Merujuk dari penyajian data diatas dan berdasar dampak positif yang disebutkan Mill, dampak hubungan dalam pengembangan Jamus dari segi positif adalah seperti terpeliharanya tumbuhan-tumbuhan teh yang memiliki usia ratusan tahun dan menjadi ciri khas teh yang ada di Jamus. Menurut penuturan Bapak HR bahwa semakin tua umur teh tersebut maka kualitas khasiat dari teh tersebut akan semakin bagus. Pihak pengelola Perkebunan Teh Jamus juga mempertahankan keberadaan teh-teh yang memiliki umur ratusan tahun tersebut untuk menjaga kualitas teh yang di hasilkan.

Disamping itu, pihak pengelola juga melakukan penanaman bibit-bibit teh baru sebagai upaya dari perusahaan untuk menjaga tingkat produksi perkebunan teh. Karena semakin tua umur teh tidak hanya mendatangkan keuntungan karena khasiatnya, akan tetapi juga mendatangkan kerugian bagi perusahaan karena produksinya mengalami penurunan karena faktor umur yang sudah tua. Sehingga pihak PT. Candi Loka perlu melakukan penanaman bibit teh baru sebagai antisipasi jangka panjang dari segi kuantitas produksi teh di Jamus.

Pihak pengelola Perkebunan Teh Jamus juga masih menjaga pohon-pohon yang memiliki historis yang tinggi seperti keberadaan pohon Kantil yang juga sudah berusia ratusan tahun yang berada di depan Pabrik pengolahan teh. Pohon tersebut juga menjadi ikon dari Jamus yang sering dibicarakan oleh orang-orang

pada umumnya. Terjaganya benda-benda yang memiliki historis ini mengindikasikan bahwa perusahaan pengelola juga berupaya menjaga kondisi alam yang ada seperti adanya. Kondisi lingkungan sejatinya memang menjadi prioritas utama dalam pengembangan kawasan pariwisata supaya tidak menimbulkan dampak yang bersifat negatif.

Pihak pengelola juga melakukan penghijauan terhadap kawasan Jamus. Hal ini dibuktikan dengan melakukan gerakan penghijauan dengan melakukan penanaman sejuta pohon yang mendapat penghargaan Kalpataru. Pihak pengelola juga melakukan penambahan-penambahan wahana wisata yang semakin membuat pengunjung tertarik untuk datang ke Jamus. Seperti pemetikan dan pembibitan aneka bunga dan teh, wahana bermain anak, bumi perkemahan, dan kolam renang Sumber Lanang.

Kondisi kebersihan yang ada di Agrowisata Perkebunan Teh Jamus juga terbilang bersih. Hal ini juga tidak lepas dari adanya tong sampah yang ada di kawasan Jamus. Di sisi lain pemerintah juga melakukan berbagai pembenahan-pembenahan untuk meningkatkan potensi yang ada di kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus seperti dengan perbaikan jalan menuju daerah wisata, penyediaan sarana penunjang lain seperti pendidikan, kesehatan, listrik juga menambah majunya daerah disekitar kawasan Agrowisata Jamus.

Dampak positif dari segi kondisi fisik mempunyai efek yang sangat bagus untuk perkembangan kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus karena akan semakin membuat kawasan wisata ini menjadi maju dan memiliki daya saing

dengan wisata lain di Kabupaten Ngawi. Jika di perinci, dampak positif dari segi kondisi fisik ini adalah :

- e. Terpeliharanya kondisi alam sekitar
- f. Terpeliharanya benda-benda ataupun bangunan bersejarah
- g. Terciptanya kondisi alam yang bersih
- h. Terciptanya wahana-wahana wisata baru di jamus

2) Dampak Negatif

Pengembangan pariwisata di Jamus tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi lingkungan sekitar, namun juga menimbulkan dampak negatif dari aktifitas pengembangan tersebut. Seperti menurut pendapat Kepala Desa Girikerto bahwa keadaan alam di Jamus dahulu lebih banyak pohonnya dan sangat sejuk. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan Mill mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari kondisi fisik. Menurut penuturan beliau, banyak sekali perubahan yang terjadi di Jamus jika dibandingkan dulu. Kerusakan yang terjadi pada lingkungan ini pasti akan terjadi dalam aktifitas pengembangan pariwisata yang memang diperlukan pembenahan-pembenahan yang pasti akan merubah kondisi yang ada.

Namun perubahan itu bisa diminimalisir dengan perencanaan pengembangan yang bagus dan memprioritaskan dampaknya terhadap lingkungan. Seperti pembukaan lahan untuk area parkir dimaksudkan untuk menampung wisatawan yang berkunjung, akan tetapi hal ini juga pasti merusak wilayah tersebut yang dirubah fungsinya menjadi lahan parkir. Di area Jamus juga terdapat lubang pengerukan yang tidak diketahui fungsinya untuk apa. Selain itu

di bagian bawah Borobudur's Hill juga mengalami kelongsoran akibat dari aliran air yang tidak terkondisikan.

Pembukaan lahan juga diperuntukkan bagi area pemukiman penduduk, pembangunan lapak-lapak untuk berjualan serta penambahan wahana wisata lain. Menurut penuturan Bapak Prb bahwa masyarakat di Jamus itu ada bersamaan dengan pihak perusahaan itu melakukan pengelolaan terhadap Jamus. Hal ini berarti terjadi arus mobilisasi penduduk dan banyak membuka lahan untuk pemukiman penduduk yang menyebabkan wilayah Jamus mengalami perubahan yang banyak berdasar penuturan Kepala Desa Girikerto.

Kondisi wahana yang ada di Jamus juga banyak yang mengalami kerusakan karena buruknya manajemen pengelolaan terhadap wahana wisata tersebut. Kerusakan kawasan wisata perkebunan teh juga terjadi akibat adanya kebakaran hutan di pinggir kawasan Jamus yang merembet ke area wisata sehingga menyebabkan area kebun teh ikut terbakar. Dan salah satu hal yang tidak bisa dihindari adalah adanya polusi udara yang menyebabkan hawa di Jamus tidak sesejuk dulu. Polusi ini timbul akibat banyaknya pengunjung yang datang ke kawasan Jamus menggunakan kendaraan pribadi mereka. Selain itu polusi udara juga disebabkan dari aktifitas pengolahan teh di PT. Candi Loka.

Dampak negatif kondisi fisik memang menjadi masalah yang perlu diperhitungkan. Karena dampak ini sangat berpengaruh dalam keadaan lingkungan sekitar yang kemudian membuat lingkungan sekitar menjadi rusak. Berikut rincian dampak negatif pengembangan yang terjadi di Jamus terhadap kondisi fisik :

- e. Adanya pembukaan lahan untuk area parkir, perumahan, penambahan wahana wisata, dan tempat penjualan.
- f. Adanya pengerukan tanah di kawasan Jamus
- g. Adanya kelongsoran yang ditimbulkan akibat aliran air
- h. Adanya polusi udara disebabkan banyaknya kendaraan yang keluar masuk Jamus dan pabrik teh.

b. Hubungan yang Berdampak pada Sosial-Budaya

1) Dampak Positif

Aktifitas yang dilakukan dalam hubungan pengembangan pariwisata antara pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, PT. Candi Loka selaku pengelola Perkebunan Teh Jamus dan Masyarakat di kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus sedikit banyak menimbulkan dampak yang positif pada kondisi sosial dan budaya baik di area kawasan Jamus maupun bagi lingkungan sekitar area tersebut. Dampak ini menimbulkan banyak perubahan baik terhadap perilaku, adat istiadat dan lain sebagainya. Dampak sosial menurut Cooper dalam Karlengie (2015: 12) muncul karena industri pariwisata melibatkan tiga hal, yaitu wisatawan, masyarakat setempat, dan hubungan wisatawan dan masyarakat. Dampak sosial budaya muncul apabila terjadi interaksi antara wisatawan dan masyarakat ketika :

- d) Wisatawan membutuhkan produk dan membelinya dari masyarakat disertai tuntutan-tuntutan sesuai dengan keinginannya.
- e) Pariwisata membawa hubungan yang informal dan pengusaha pariwisata mengubah sikap spontanitas masyarakat menjadi transaksi komersial

- f) Wisatawan dan masyarakat bertatap muka dan bertukar informasi atau ide, menyebabkan munculnya ide-ide baru.

Jika melihat dari uraian di penyajian data diatas bahwasanya perilaku warga sekitar Jamus tetap mempertahankan sikap keramahannya, perilaku masyarakat sekitar area wisata Jamus sangat menjunjung tinggi sikap sopan santun kepada setiap pengunjung yang datang.

Sikap keramahan yang sudah ada sejak jaman dahulu ini merupakan warisan nenek moyang warga sekitar. Dan memang pada dasarnya sikap ini memang menjadi ciri khas sikap masyarakat Jawa yang terkenal mempunyai tata karma atau dalam bahasa Jawa di sebut “Unggah-Ungguh”. Kesopanan pada perilaku masyarakat Jawa merupakan ciri yang menunjukkan bahwa orang tersebut menghargai orang lain terutama kepada orang yang lebih tua. Sikap ini dipertahankan oleh masyarakat sekitar Perkebunan Teh Jamus. Hal ini tetap dipertahankan dengan tujuan supaya pengunjung yang datang merasa nyaman terhadap perilaku warga sekitar kawasan wisata seperti yang dikatakan oleh Bapak SL.

Sesuatu yang perlu dipertahankan dari dampak aktifitas pengembangan pariwisata pada sosial budaya adalah adat istiadat masyarakat setempat. Mempertahankan adat istiadat merupakan hal yang sangat sulit mengingat laju perkembangan jaman yang sangat cepat. Banyak sekali pengaruh-pengaruh budaya yang datang dari luar daerah bahkan luar negeri yang mengancam budaya lokal di suatu daerah di Indonesia termasuk juga di kawasan Jamus. Namun masyarakat tetap mempertahankan adat istiadat yang ada walaupun juga ada yang

sudah mulai hilang. Akan tetapi, usaha masyarakat untuk menjaga adat istiadat di Girikerto patut mendapat apresiasi. Mereka rutin melakukan upacara adat setiap tahun yang menurut Kepala Desa Girikerto sebagai upaya untuk mempertahankan ciri khas desa.

Masyarakat Desa Girikerto setiap tahun menyelenggarakan upacara adat “Nyadran” atau bersih desa yang merupakan warisan nenek moyang mereka yang harus dijaga dan dilestarikan. Selain itu, toleransi antar umat beragama di sekitar kawasan Agrowisata Jamus juga tinggi. Ini dibuktikan dengan adanya tempat peribadahan agama yang berbeda yang saling berdekatan. Ini mengindikasikan bahwa toleransi yang dijaga antar umat beragama sangat tinggi. Dan selama ini juga tidak ada konflik-konflik yang terjadi antar umat beragama di kawasan Jamus.

Masyarakat sekitar dan juga pengelola Jamus mempunyai nilai religiusitas yang tinggi untuk pengembangan pariwisata. Mereka sepakat untuk tidak mendirikan tempat-tempat penginapan karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif di kawasan Jamus. Karena konsep yang diinginkan oleh pengelola Agrowisata Perkebunan Teh Jamus adalah mengedepankan wisata alam dan ingin menjaga keseimbangan budaya. Keseimbangan budaya yang ada di Jamus juga dilakukan dengan memelihara tempat-tempat yang dianggap memiliki nilai historis bagi kawasan Jamus seperti makam pendiri pertama Jamus “Van Der Rappard”.

Perilaku berpakaian warga sekitar juga dibilang sudah mengikuti perkembangan jaman. Hal ini bisa dikatakan sebagai dampak positif maupun

negatif. Dampak positif karena mereka sudah tidak tertinggal dengan perkembangan jaman yang sangat pesat sehingga tidak menyebabkan mereka dianggap ketinggalan jaman.

Berdasar teori yang ada dan dengan keadaan di lokasi penelitian menunjukkan kemiripan dampak yang ditimbulkan dari segi sosial-budaya.

Berikut rincian dari dampak positif dari segi sosial budaya :

- a) Terjaganya perilaku ramah tamah warga sekitar
- b) Terjaganya adat istiadat yang ada di masyarakat
- c) Adanya toleransi agama dan tingkat religiusitas yang tinggi
- d) Terjaganya tempat-tempat bersejarah
- e) Adanya unsur modernitas

2) Dampak Negatif

Pengembangan pariwisata yang terjadi di Jamus jugamenimbulkan dampak yang negatif dari segi sosial budaya. Dampak tersebut menjadi penyebab terjadinya perubahan nilai-nilai kehidupan yang ada di desa Girikerto. Nilai-nilai sosial masyarakat harus dipertahankan jika tidak ingin tergerus oleh laju perkembangan jaman dari aktifitas pengembangan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus. Begitu juga dengan nilai budaya yang sejatinya menjadi ciri khas dari suatu daerah yang harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak seperti pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah, masyarakat dan swasta harus bersama-sama membangun dan mempertahankan keanekaragaman budaya disuatu daerah termasuk dalam upaya pengembangan suatu daerah yang akan digunakan untuk tujuan pariwisata.

Hubungan pengembangan pariwisata di Jamus, dampak negatif yang ditimbulkan muncul dari perilaku masyarakat di kawasan wisata tepatnya di dusun Jamus itu sendiri. Masyarakat disana terkesan menutup diri dari dunia luar, hal ini dirasakan oleh Kepala Desa Girikerto. Mereka terkesan tertutup perilakunya dan lebih banyak berinteraksi dengan sesama warga yang ada di dusun Jamus. Hal ini mungkin disebabkan karena masyarakat yang ada di dusun Jamus sebagian besar merupakan masyarakat pendatang yang datang dari luar Desa Girikerto. Inilah yang kemudian mengakibatkan perilaku masyarakat di dusun Jamus terkesan tertutup. Namun masyarakat disana masih memiliki sikap ramah tamah terhadap pengunjung yang datang.

Perubahan juga terjadi pada tingkat religiusitas masyarakat yang berbeda terutama dalam menganggap suatu adat istiadat yang ada di daerah Jamus. Karena pada jaman dahulu, masyarakat di Jamus mempunyai adat istiadat yang sama dengan masyarakat lain di desa Girikerto seperti halnya dengan upacara adat bersih desa. Namun seiring berjalannya waktu, pihak perusahaan pengelola Jamus sudah tidak melakukan upacara adat tersebut karena dirasa akan mengarah pada hal syirik, keterangan ini penulis dapat dari Kepala Desa Girikerto dan juga dari pihak PT. Candi Loka.

Dampak pariwisata dari segi sosial budaya juga timbul dari terpeliharanya bangunan-bangunan bersejarah di kawasan tersebut. Namun di wilayah Jamus, banyak tempat-tempat bersejarah yang mulai lapuk dan rusak karena kurangnya perawatan dari pihak PT. Candi Loka. Bahkan keberadaannya pun tidak banyak yang mengetahuinya. Banyak narasumber mengatakan bahwa mereka tidak tahu

jika di area wisata Jamus itu terdapat Goa Belanda, makam pendiri Jamus, ataupun museum listrik. Ini berarti pihak pengelola maupun pemerintah kurang mempromosikan tempat-tempat seperti itu yang sebenarnya cukup berpotensi untuk mendatangkan minat pengunjung wisata.

Perubahan juga terjadi pada cara berpakaian warga masyarakat terutama pada kalangan anak muda. Seperti yang dijelaskan di dampak positif diatas, bahwa dampak ini juga bisa menjadi dampak negatif maupun positif. Dampak negatif karena masyarakat mulai melupakan adat berpakaian mereka. Selain itu budaya tata karma juga mulai luntur terutama juga dikalangan anak-anak muda di kawasan sekitar Jamus. Ini membuktikan bahwa laju perkembangan pariwisata yang pesat juga membawa dampak terhadap cara berperilaku masyarakat.

Aktifitas pengembangan pariwisata mempunyai dampak negatif dari segi sosial-budaya yang akan berdampak pada masyarakat sekitar. Kesimpulan yang dapat diambil dari segi dampak negatif sosial-budaya adalah sebagai berikut :

- a) Tertutupnya masyarakat sekitar kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus
- b) Hilangnya adat istiadat di masyarakat
- c) Adanya bangunan bersejarah yang mengalami kerusakan
- d) Hilangnya identitas masyarakat setempat baik dari cara berperilaku dan berpakaian

c. Hubungan yang Berdampak pada Ekonomi

Menurut Robert Cristie Mill dalam Karlengie (2015: 14-15), kegiatan pariwisata dapat memberikan dampak positif ataupun negatif di bidang ekonomi.

Dampak positif :

- 52) Terbukanya lapangan pekerjaan baru
- 53) Meningkatnya taraf hidup dan pendapatan masyarakat
- 54) Meningkatnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing
- 55) Membantu menanggung beban pembangunan sarana dan prasarana setempat
- 56) Meningkatkan kemampuan manajerial dan keterampilan masyarakat yang memacu kegiatan ekonomi lainnya

Dampak Negatif :

- 57) Meningkatkan biaya pembangunan sarana dan prasarana
- 58) Meningkatkan harga barang-barang lokal dan bahan-bahan pokok
- 59) Peningkatan yang sangat tinggi tetapi hanya musiman, sehingga pendapatan masyarakat naik turun
- 60) Mengalirnya uang keluar negeri karena konsumen menuntut barang-barang impor untuk bahan konsumsi tertentu

Dari perkembangan hubungan di Agrowisata Perkebunan Teh Jamus, banyak terdapat dampak yang ditimbulkan dari ekonomi baik positif maupun negatif. Dampak ekonomi menjadi prioritas utama dalam perkembangan pariwisata dewasa ini. Karena dampak ini dirasa memiliki efek untuk

meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Dari dampak yang dijelaskan oleh Robert Cristie Mill diatas menggambarkan bahwa dampak ekonomi berpotensi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan ekonomi dari aktifitas pariwisata. Dampak-dampak hubungan antara pemerintah daerah, pengelola obyek wisata dan masyarakat sekitar di Agrowisata Perkebunan Teh Jamus adalah sebagai berikut :

1) Dampak Positif

Dampak perkembangan pariwisata di jamus dalam hal ekonomi banyak dirasakan oleh masyarakat maupun pengelola Jamus. Dampak tersebut seperti terangkat perekonomian masyarakat sekitar Agrowisata disebabkan karena aktifitas pariwisata. Banyaknya pengunjung yang datang di area wisata Jamus mendorong kreatifitas masyarakat untuk mulai membuka usaha di kawasan Jamus. Masyarakat banyak yang membuka kios, pertokoan, warung maupun rumah makan untuk memnuhi kebutuhan para pengunjung yang datang. Hal ini menyebabkan pendapatan masyarakat sekitar mulai mengalami peningkatan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga berasal dari aktifitas yang dilakukan oleh pengelola Perkebunan Teh Jamus yang melakukan pengolahan teh di pabrik. Sehingga menyebabkan terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat untuk bekerja di PT. Candi Loka. Masyarakat banyak yang bekerja di sebagai tenaga pemetik teh, maupun sebagai karyawan pengolahan teh di dalam pabrik. Selain itu masyarakat juga ada yang menjadi tenaga keamanan.

Melihat potensi yang ada di Jamus, pemerintah kemudian mulai memperbaiki akses jalan menuju kawasan Jamus dengan melakukan pelebaran

jalan dan pengaspalan jalan, memperbaiki akses listrik, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah juga memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengelola *home stay* yang ada yang diperuntukkan untuk pengunjung yang hendak menginap. Namun keberadaan *home stay* ini tidak banyak karena masyarakat dan pengelola tidak menginginkan adanya penginapan di area Jamus. Akan tetapi ini menjadi keuntungan bagi masyarakat untuk menambah pendapatan mereka.

Aktifitas pariwisata juga mendatangkan keuntungan bagi pihak pengelola kebun teh Jamus. Mereka mendapatkan keuntungan dari penarikan retribusi masuk area wisata, parkir maupun retribusi masuk ke wahana wisata yang ada di Jamsus. Selain itu pihak PT. Candi Loka melalui koperasi karyawannya juga menjual teh hasil olahan pabrik yang dibungkus dengan kemasan menarik sehingga pengunjung tertarik untuk membelinya. Namun sayangnya, produksi teh tersebut hanya sedikit dan hanya dijual di area wisata saja, pihak pengelola belum mempunyai inisiatif untuk memasarkan hasil produksi itu secara besar. Karena pada dasarnya, pabrik yang dikelola PT. Candi Loka ini hanya memproduksi teh kering yang nantinya akan dijual ke pabrik pengolahan teh yang lebih besar.

Dampak positif yang ditimbulkan dari segi ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar maupun pihak pengelola dan pemerintah. Jika dibuat poin-poin, maka dampak positif dari segi ekonomi tersebut adalah :

- a) Terangkatnya perekonomian masyarakat sekitar dan juga pengelola wisata

- b) Terbukanya kesempatan bagi masyarakat ataupun pengelola untuk mendirikan usaha seperti : warung, toko, kios-kios, rumah makan, *home stay* atau penginapan
- c) Menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat
- d) Adanya perbaikan sarana dan prasarana seperti : jalan, lampu penerangan, listrik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain
- e) Meningkatkan peran dari masing-masing aktor yang berkepentingan

2) Dampak Negatif

Banyaknya dampak positif yang diterima masyarakat maupun pihak pengelola dalam aktifitas pengembangan pariwisata di Jamus, ternyata aktifitas tersebut juga menimbulkan dampak yang bersifat negatif. Dampak negatif dari adanya aktifitas pengembangan kawasan Agrowisata Jamus ini seperti yang diutarakan oleh Kepala Desa Girikerto bahwa dahulu masyarakat boleh mengelola lahan yang berada di sekitar rumah mereka dan diambil manfaatnya. Namun dengan lama-kelamaan dengan hadirnya PT. Candi Loka, aktifitas warga itu dihentikan dan dilarang karena lahan Jamus menjadi milik PT. Candi Loka. hal ini menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang.

Selain itu, perekrutan tenaga kerja perkebunan menurut Bapak SL juga sebagian besar berasal dari luar Girikerto atau juga banyak yang hanya dari dusun Jamus yang memang berada di kawasan Agrowisata tersebut. Masyarakat tidak begitu banyak merasakan hasil dari aktifitas pengelolaan Perkebunan Teh Jamus. Seharusnya, aktifitas pengelolaan pariwisata harus menjadi kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk memperbaiki tingkat perekonomian mereka dengan

mendirikan tempat-tempat untuk berjualan, maupun bekerja di tempat pariwisata tersebut. Namun yang terjadi di Agrowisata Jamus justru sebaliknya, banyak masyarakat yang tidak merasakan hasilnya. Disini peran pemerintah sangat menentukan sekali untuk membantu masyarakat sekitar supaya bisa menikmati hasil pengelolaan Jamus karena mereka juga berada di sekitar area tersebut.

Keuntungan yang diperoleh dari aktifitas pariwisata di jamus seperti menjadi hak mutlak yang harus dimiliki oleh pihak pengelola. Masyarakat desa Girikerto yang kedudukannya hanya sebagai desa penyangga harus berbesar hati menerima aturan yang diterapkan oleh pihak pengelola. Mereka hanya seperti tempat dimana wisata tersebut berada tanpa bisa merasakan dampak dari aktifitas tersebut. Padahal masyarakat juga merupakan unsur utama dalam pengembangan pariwisata di Jamus.

Dampak lain yang ditimbulkan dari segi ekonomi yang bersifat negatif adalah mahalnya harga tanah disekitar kawasan Jamus karena dirasa kawasan Jamus mempunyai kedepan yang sangat potensial sehingga menyebabkan harga lahan disana menjadi tinggi. Bahkan pihak pemerintah yang ingin mengembangkan area tersebut juga mengalami kendala dalam harga. Kenaikan-kenaikan harga bahan baku termasuk maskanan juga diraskan oleh para pengunjung maupun masyarakat setempat. Harga-harga makanan yang ada di kawasan Jamus terbilang cukup mahal jika dibandingkan dengan harga di daerah lain di Kabupaten Ngawi. Hal tersebut juga tidak terlepas dari semakin dikenalnya wilayah tersebut dan semakin ramainya pengunjung yang datang. Peningkatan

harga biaya masuk maupun parkir juga sering terjadi terutama pada saat momen-momen tertentu seperti tahun baru dan Hari Raya Idul Fitri.

Berikut kesimpulan dari dampak negatif aktifitas hubungan pengembangan pariwisata dari segi ekonomi di Perkebunan Teh Jamus:

- a) Adanya pembatasan dari pengelola untuk masyarakat dalam mengolah lahan sekitar Jamus
- b) Keegoisan pihak pengelola dalam hal perekrutan tenaga kerja
- c) Adanya pemanfaatan keuntungan secara mutlak oleh pihak pengelola
- d) Mahalnya harga-harga tertentu di sekitar kawasan wisata seperti : tanah, bahan-bahan baku, makanan, dan lain-lain
- e) Adanya ketidakstabilan pendapatan dari masyarakat maupun pengelola wisata terutama pada saat momen-momen tertentu.

Jika diberikan kesimpulan dari dampak dalam aktifitas pengembangan wisata di kawasan Jamus adalah bahwasanya dari aktifitas tersebut menimbulkan berbagai macam dampak. Dampak tersebut bersifat positif dan negatif yang bisa dilihat dari segi kondisi fisik yaitu lingkungan alam, dampak dari segi sosial-budaya yang biasanya memiliki pengaruh terhadap lingkungan sekitar seperti misalnya masyarakat di desa Girikerto, dan juga dampak dari segi ekonomi. Masing-masing dampak memiliki peranan terhadap pengembangan yang terjadi di Jamus yang pada dasarnya untuk menjadikan Jamus menjadi kawasan wisata yang mempunyai daya saing dan juga untuk mengangkat taraf hidup masyarakat sekitar melalui *multi effect* yang ditimbulkan dari aktifitas pariwisata yang ada.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Hubungan Mutualistik Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, Pengelola Obyek Wisata Perkebunan Teh Jamus dan Masyarakat Sekitar Perkebunan Teh Jamus di Desa Girikerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi

Suatu hubungan pengembangan pariwisata seyogyanya bertujuan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat. Dari situlah sudah seharusnya pengembangan tersebut lebih memprioritaskan kepada kepentingan masyarakat. Karena masyarakatlah yang pada akhirnya akan banyak menerima dampak dari aktifitas tersebut. Masyarakat menjadi subjek yang sangat penting dalam pengembangan kepariwisataan dewasa ini disamping unsur lingkungan hidup dan ekonomi. Akan tetapi banyak pengembangan pariwisata yang hanya mengedepankan faktor ekonomi semata sehingga menyebabkan masyarakat sekitar kurang menerima manfaat dari aktifitas dalam pengembangan pariwisata tersebut.

Pengembangan pariwisata merupakan suatu upaya terencana yang dilakukan oleh aktor terkait demi terpeliharanya potensi wisata yang ada disamping untuk tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat sekitar. Jalnnya suatu perencanaan dalam pengembangan pariwisata tidak terlepas dari adanya hubungan yang terpola dan hubungan yang baik antar aktor yang berkepentingan sehingga harapannya aktor tersebut mampu berjalan beriringan dalam bekerja mewujudkan pembangunan pariwisata yang sesuai dengan tujuan bersama. Dalam mewujudkan pengembangan pariwisata pasti terdapat suatu faktor yang berpengaruh dalam hubungan antar aktor terkait. Faktor tersebut ada yang bersifat

mendukung dan ada yang bersifat menghambat jalannya hubungan yang baik antar aktor tersebut. Termasuk juga hubungan yang terjadi dalam pengembangan pariwisata di Agrowisata Perkebunan Teh Jamus Kabupaten Ngawi.

Berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh tersebut menyebabkan hubungan yang terjadi pada pengembangan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus banyak menerima dampaknya. Hubungan mutualistik yang diharapkan dalam pengembangan tersebut sulit untuk dicapai dikarenakan adanya faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan hubungan tersebut. Di lain hal, aktor terlibat harus memperhatikan faktor-faktor pendukung dari hubungan tersebut supaya hubungan yang diharapkan segera terealisasi. Berikut penjelasan faktor pendukung dan penghambat hubungan mutualistik dalam pengembangan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus di Kabupaten Ngawi :

a. Faktor Pendukung

Faktor yang menjadi pendorong dilakukannya hubungan yang baik tersebut antara lain adalah :

- 1) Agrowisata Perkebunan Teh Jamus Masuk dalam Peta Wisata Kabupaten Ngawi

Berdasarkan peta pariwisata yang ada di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi, kawasan Perkebunan Teh Jamus merupakan bagian dari daerah tujuan wisata yang di Ngawi. Ini mengindikasikan bahwa kawasan tersebut merupakan daerah wisata yang ada di Kabupaten Ngawi. Pemerintah daerah berupaya keras untuk menjadikan daerah Jamus menjadi kawasan wisata yang maju

dan berharap Jamus nantinya akan menjadi ikon pariwisata Kabupaten Ngawi. Pemerintah sudah menyiapkan agenda rancangan ke depan untuk mengembangkan kawasan tersebut. Hal ini seharusnya menjadi pelecut semangat untuk semua aktor terkait agar mendukung rencana tersebut dan mencapai cita-cita yang sejatinya menjadi harapan setiap warga Kabupaten Ngawi.

2) Adanya Dukungan dari Aktor terkait (Pemerintah, PT. Candi Loka, dan Masyarakat Desa Girikerto)

Aktor-aktor yang berkepentingan dalam mewujudkan pengembangan Perkebunan Teh Jamus harus menjadi inisiator terciptanya suatu hubungan yang baik dalam pengembangan pariwisata di Jamus yang harapannya mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat sekitar, mengembangkan potensi yang ada di Jamus dan mempertahankan nilai-nilai sejarah dan budaya lokal serta tetap berpedoman pada unsur lingkungan hidup. Dukungan yang diberikan oleh masing-masing pihak berupa tercapainya kesepakatan hubungan yang baik dalam bentuk kemitraan dalam pengembangan pariwisata di Jamus.

3) Adanya Pihak Penengah Kemitraan

Untuk mencapai kesepakatan untuk melaksanakan kemitraan dalam pengembangan pariwisata di Jamus, perlu adanya suatu lembaga yang mempunyai kedudukan sebagai penengah adanya kontrak kesepakatan antara aktor terkait. Dan pihak penengah itu bisa berasal

dari pusat di Jakarta seperti Badan Pertanahan Nasional atau melalui kementerian yang mengurus kepariwisataan di Indonesia agar kesepakatan tersebut segera terlaksana.

- 4) Adanya Sifat Saling Membutuhkan antar Ketiga Aktor (Pemerintah, PT. Candi Loka, dan Masyarakat)

Semua bentuk hubungan kemitraan tidak akan berjalan harmonis jika tidak ada rasa saling membutuhkan antar pihak terkait. Sifat tersebut harus menjadi dasar terlaksananya suatu bentuk hubungan kemitraan yang baik yang bersifat mutualistik yaitu bentuk hubungan yang saling menguntungkan. Sifat ini harus mulai ditanam di masing-masing aktor sebelum mencapai kesepakatan tersebut. Agar kedepannya mampu mencapai tujuan pengembangan pariwisata di Jamus dengan maksimal dan juga mampu bekerja secara beriringan.

- 5) Potensi dan Daya Tarik wisata yang ada di Perkebunan Teh Jamus.

Potensi dan daya tarik wisata yang ada di Jamus pada dasarnya sangat besar jika dikelola dengan benar. Jamus memiliki banyak keunggulan jika dibanding tempat pariwisata lain yang ada di Ngawi. Potensi kondisi alamnya dan daya tarik wahana wisata yang ada akan sangat menarik minat pengunjung. Alasan ini seharusnya menjadi dasar bagi aktor terkait untuk sama-sama berinisiatif mengembangkan kawasan Jamus demi menjadikan Jamus sebagai Agrowisata yang menjadi ikon Kabupaten Ngawi. Karena arah perencanaan dari Kabupaten Ngawi ingin menjadikan Jamus sebagai ikon pariwisata Kabupaten Ngawi.

b. Faktor Penghambat

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan hubungan yang baik antara aktor tersebut adalah :

1) Lahan masih Menjadi Milik Pribadi (Swasta)

Kondisi lahan yang menjadi milik mutlak swasta (PT. Candi Loka) menjadi salah satu penyebab pemerintah sulit untuk mengembangkan kawasan tersebut. Apalagi kontrak tersebut masih akan berakhir pada tahun 2026 menambah bingungnya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi yang ingin mengembangkan kawasan tersebut. Hal ini sebenarnya bisa dilakukan asal terdapatnya hubungan negosiasi yang lebih intens dari pihak pemerintah.

2) Status Pengelolaan Perkebunan Teh Jamus bukan untuk Kawasan Wisata

Alasan yang paling sering diungkapkan oleh pihak PT. Candi Loka dan juga pemerintah adalah status dari kawasan Perkebunan Teh Jamus yang bukan merupakan lahan untuk dikelola menjadi tempat wisata. Namun Jamus sudah bertahun-tahun menjadi tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Ngawi dan cukup banyak dikenal oleh masyarakat luas. Kawasan Jamus sesungguhnya bisa dioperasikan sebagai Agrowisata jika mendapatkan persetujuan kepala PT. CandiLoka yang berada di Jakarta. Akan tetapi, kepala perusahaan tersebut belum mempunyai niat untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi

tempat pariwisata. Namun pihak PT. Candi Loka setuju jika Jamus di jadikan wisata yang berkonsep agro. Dan sampai sekarang wisata Jamus bisa berdiri dengan konsep tersebut.

3) Belum adanya Titik Temu dalam Perencanaan Pengembangan

Perencanaan yang diharapkan oleh pemerintah dan PT. Candi Loka mempunyai hal yang tidak sama. Pemerintah menghendaki adanya pengembangan pariwisata di Jamus di wilayah bagian atas, hal ini berbeda dengan pihak PT. Candi Loka yang menginginkan pengembangan itu di area bawah kawasan Jamus. Kedua pendapat yang tidak sama itulah menjadi penyebab belum terealisasinya upaya perencanaan pengembangan di Jamus. Selain itu, alasan lain yaitu masih belum selesainya pengurusan ijin pengelolaan pariwisata di Jamus.

4) Mahalnya Harga Tanah di Kawasan Jamus

Hal yang menjadi penyebab belum terjalinnya hubungan pengembangan pariwisata di Agrowisata Perkebunan Teh Jamus ini adalah karena harga tanah yang juga sedikit lebih mahal. Mahalnya harga tanah dikarenakan kawasan Jamus dianggap merupakan kawasan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan kearah pariwisata yang baik. Inilah yang menyebabkan daerah ini memiliki harga tanah yang mahal.

5) Sulitnya Mendapatkan Ijin untuk Pengelolaan Kawasan Jamus

Pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi mengalami kesulitan untuk pengurusan ijin penggunaan lahan di Jamus yang akan diperuntukkan untuk kawasan wisata. Hal ini diakui oleh pihak pemerintah dan juga pihak PT. Candi Loka. Pemerintah sudah menyiapkan rencana pengembangan dan juga proposal yang akan diajukan ke pusat untuk pengurusan surat ijin tersebut.

6) Adanya Sifat Egoisme dari Pihak Swasta (PT. Candi Loka)

Sifat egois ditunjukkan oleh PT. Candi Loka yang hendak memanfaatkan kawasan Jamus untuk kepentingan pribadi perusahaannya. Potensi yang ada di Jamus sangat menguntungkan bagi perusahaan karena selain pengelolaan teh juga datang dari pengelolaan Agrowisata yang banyak diminati oleh wisatawan. Terbukti kawasan Jamus menjadi daerah tujuan wisata dengan jumlah pengunjung terbanyak di Kabupaten Ngawi. Kemungkinan hal inilah yang ingin dimanfaatkan sendiri oleh perusahaan. Selain itu, hubungan dengan masyarakat sekitar pun juga terkesan enggan.

Kesimpulan yang bisa diambil adalah aktifitas hubungan pengembangan pariwisata di Jamus terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat jalannya hubungan mutualistik antar aktor terkait. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor pendukung yang terdiri dari : agrowisata Perkebunan Teh Jamus masuk dalam peta wisata Kabupaten Ngawi, adanya dukungan dari

aktor terkait (Pemerintah, PT. Candi Loka, dan Masyarakat Desa Girikerto), adanya pihak penengah kemitraan, adanya sifat saling membutuhkan antar ketiga aktor (Pemerintah, PT. Candi Loka, dan Masyarakat), serta potensi dan daya tarik wisata yang ada di Perkebunan Teh Jamus. Dan faktor penghambat terdiri dari : lahan masih menjadi milik pribadi (Swasta), status pengelolaan Perkebunan Teh Jamus bukan untuk kawasan wisata, belum adanya titik temu dalam perencanaan pengembangan, mahalnya harga tanah di kawasan Jamus, sulitnya mendapatkan izin untuk pengelolaan kawasan Jamus dan adanya sifat egoisme dari pihak swasta (PT. Candi Loka).

Berdasar penjelasan mengenai faktor pendukung dan penghambat hubungan mutualistik antara pemerintah daerah, pengelola Agrowisata Perkebunan Teh Jamus dan masyarakat sekitar di Desa Girikerto di atas maka harapannya dapat memberikan masukan kepada aktor terkait agar sama-sama memikirkan hal tersebut dan mencari jalan terbaik yang harus dilakukan demi terciptanya hubungan yang mampu mendatangkan kebermanfaatan bagi semua pihak. Sehingga tidak adanya pihak yang merasa paling untung sendiri diatas pihak-pihak yang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV serta merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Hubungan yang terjadi dalam pengembangan pariwisata pada Agrowisata Perkebunan Teh Jamus antara pemerintah daerah, pengelola objek wisata (PT. Candi Loka) dan masyarakat sekitar selama ini ditinjau dari segi potensi wisata, bentuk hubungan dan infrastruktur adalah hubungan yang bersifat semu (*Pseudo Partnership*). Ini ditunjukkan dengan sifat saling ketergantungan antara masing-masing pihak namun belum ada kemitraan yang mempunyai payung hukum yang jelas. Ketergantungan itu contohnya pihak PT. Candi Loka membutuhkan masyarakat sekitar untuk bekerja di perkebunan teh, masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan, serta pemerintah bisa meningkatkan PAD nya dan terwujudnya pemerataan ekonomi pada masyarakat sekitar.
2. Dampak dari hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, pengelola obyek wisata Perkebunan Teh Jamus Kabupaten Ngawi dan masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata selama ini antara lain bisa dilihat dari :
 - a. Hubungan yang berdampak pada kondisi fisik. Dampak positif dari segi kondisi fisik adalah terpeliharanya kondisi alam sekitar, terpeliharanya

benda-benda ataupun bangunan bersejarah, terciptanya kondisi alam yang bersih dan terciptanya wahana-wahana wisata baru di Jamus. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya pembukaan lahan untuk area parkir, perumahan, penambahan wahana wisata, dan tempat berjualan, adanya pengerukan tanah di kawasan Jamus, adanya kelongsoran yang ditimbulkan akibat aliran air dan adanya polusi udara disebabkan banyaknya kendaraan yang keluar masuk Jamus dan pabrik teh,

- b. Hubungan yang berdampak pada Sosial-Budaya. Dampak positif yang berdampak pada sosial-budaya seperti terjaganya perilaku ramah tamah warga sekitar, terjaganya adat istiadat yang ada di masyarakat, adanya toleransi agama dan tingkat religiusitas yang tinggi, terjaganya tempat-tempat bersejarah dan adanya unsur modernitas. Dan dampak negatifnya adalah tertutupnya masyarakat sekitar kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus, hilangnya adat istiadat di masyarakat, adanya bangunan bersejarah yang mengalami kerusakan dan hilangnya identitas masyarakat setempat baik dari cara berperilaku dan berpakaian, dan
- c. Hubungan yang berdampak pada ekonomi. Dampak positifnya seperti terangkatnya perekonomian masyarakat sekitar dan juga pengelola wisata, terbukanya kesempatan bagi masyarakat ataupun pengelola untuk mendirikan usaha seperti : warung, toko, kios-kios, rumah makan, *home stay* atau penginapan, menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat, adanya perbaikan sarana dan prasarana seperti : jalan, lampu penerangan, listrik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain dan meningkatkan peran dari

masing-masing aktor yang berkepentingan. Dampak negatifnya berupa adanya pembatasan dari pengelola untuk masyarakat dalam mengolah lahan sekitar Jamus, keegoisan pihak pengelola dalam hal perekrutan tenaga kerja, adanya pemanfaatan keuntungan secara mutlak oleh pihak pengelola, mahalnnya harga-harga tertentu di sekitar kawasan wisata seperti: tanah, bahan-bahan baku, makanan, dan lain-lain dan adanya ketidakstabilan pendapatan dari masyarakat maupun pengelola wisata terutama pada saat momen-momen tertentu.

3. Faktor pendukung dan penghambat hubungan mutualistik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, pengelola obyek wisata Perkebunan Teh Jamus dan masyarakat sekitar Perkebunan Teh Jamus di Desa Girikerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi terdiri dari :
 - a. Faktor pendukung terdiri dari : agrowisata Perkebunan Teh Jamus masuk dalam peta wisata Kabupaten Ngawi, adanya dukungan dari aktor terkait (Pemerintah, PT. Candi Loka, dan Masyarakat Desa Girikerto), adanya pihak penengah kemitraan, adanya sifat saling membutuhkan antar ketiga aktor (Pemerintah, PT. Candi Loka, dan Masyarakat), serta potensi dan daya tarik wisata yang ada di Perkebunan Teh Jamus.
 - b. Faktor penghambat terdiri dari : lahan masih menjadi milik pribadi (Swasta), status pengelolaan Perkebunan Teh Jamus bukan untuk kawasan wisata, belum adanya titik temu dalam perencanaan pengembangan, mahalnnya harga tanah di kawasan Jamus, sulitnya mendapatkan ijin untuk

pengelolaan kawasan Jamus dan adanya sifat egoisme dari pihak swasta (PT. Candi Loka).

4. Hubungan mutualistik antara Pemerintah Daerah, pengelola obyek wisata dan masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata di Perkebunan Teh Jamus Kabupaten Ngawi belum dapat diwujudkan sehingga pengembangan yang terjadi di obyek wisata tersebut tidak mempunyai arah perkembangan yang seharusnya memiliki konsep untuk kemaslahatan aktor-aktor terkait terutama masyarakat sekitar.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya pembentukan suatu hubungan dalam pengembangan pariwisata di Perkebunan Teh Jamus yang bersifat saling menguntungkan untuk semua pihak (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat). Hubungan kemitraan tersebut harus bersifat *Mutualism Partnership*. Hubungan mutualistik antara Pemerintah Daerah, PT. Candi Loka dan Masyarakat Desa Girikerto akan tercapai apabila menerapkan konsep *Linear Collaborative of Partnership*. Dimana dalam konsep tersebut, antar pihak terkait memiliki fungsi yang seimbang dan berada pada satu garis lurus. Sehingga tidak terdapat pihak yang memiliki kuasa penuh. Yang menjadi tekanan utama adalah visi dan misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Melihat permasalahan yang ada untuk mewujudkan hubungan yang baik tersebut, maka diperlukan :

1. Perlunya inisiatif dari pihak pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan PT. Candi Loka untuk melakukan penyewaan lahan di area Agrowisata Perkebunan Teh Jamus untuk pengembangan pariwisata.
2. Perlunya upaya dari pemerintah untuk segera membentuk borang dan surat keterangan pemindahan hak guna usaha di area Perkebunan Teh Jamus kepada Badan Pertanahan Nasional guna pengembangan kawasan di Jamus sebagai tempat pariwisata.
3. Perlunya upaya negosiasi yang lebih intens dari pihak pemerintah kepada PT. Candi Loka mengenai rencana pengembangan untuk kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus dan segera dibentuk unit khusus yang menangani Agrowisata Perkebunan Teh Jamus.
4. Perlunya upaya dari pemerintah untuk menggandeng pihak lain dalam upaya penanganan pengembangan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus untuk meminimalisir biaya pengembangan yang tinggi.
5. Perlunya lembaga penengah yang bersifat netral dari pemerintah pusat untuk menengahi kesepakatan bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Ngawi dan pihak PT. Candi Loka dalam mewujudkan rencana pengembangan kawasan Agrowisata Perkebunan Teh Jamus.
6. Perlunya dari masing-masing aktor terkait dalam pengembangan Agrowisata Perkebunan Teh untuk sama-sama membuka diri dan melihat akan pentingnya kemitraan yang bersifat mutualistik yang akan saling menguntungkan semua pihak dengan cara sosialisasi, kunjungan-kunjungan kerja, dan pertemuan-

pertemuan khusus yang tujuannya untuk lebih mempererat hubungan yang terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

- Admin. 2011. *Kebun Teh Jamus*. Diakses pada tanggal 11 Mei 2016 dari <http://www.ngawikab.go.id/home/2011/08/kebun-teh-jamus/>
- Ali. 2015. *Pengertian Masyarakat Serta Ciri-Ciri Masyarakat*. Diakses pada tanggal 24 Februari 2016 dari www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-masyarakat-serta-ciri.html#_
- Anonim. 2014. *Simbiosis*. Diakses pada tanggal 31 Maret 2016 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Simbiosis>
- Arikunto, Suharini. 2000. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arisworo, Djoko, Yusa dan Nana Sutrisna. 2006. *Ilmu Pengetahuan Alam*. Grafindo Mediatama
- Badri, Sofwan. 1988. *Konsep-Konsep Dasar Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan, Cetakan Kedua (Revisi)*. Jakarta: Bina Aksara
- Basuki, Ananto dan Shofwan. 2006. *Penguatan Pemerintah Desa Berbasis Good Governance*. Malang: SPOD
- Hadinoto, Kusudianto. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: UI Press
- Hafsah, Mohammad Jafar, Dr. Ir. 2000. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Sinergi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Hetifah, SJ Sumarto. 2003. *Inovasi, Parisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan, Cetakan Pertama*. Bandung: Humaniora
- Inpres Nomor 9 tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Kepariwisata Nasional
- Ismawati, Septian Catur. 2012. *Kemitraan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Meningkatkan Potensi Wisata di Kota Batu*. Skripsi Jurusan Administrasi Publik FIA UB Malang

- Karlengie, Purba Karenka. 2015. *Dampak Pariwisata terhadap Aspek Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Kawasan Pantai Kuta Lombok Tengah*. Skripsi Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Kemitraan Dalam Pembangunan Nasional dengan Tinjauan Khusus dalam Pembangunan Perkotaan pada Seminar Nasional Urban and Regional Development Institute (URDI)*. Jakarta
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. 2014. Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2014
- Laporan Akhir Perencanaan Pengembangan Kebun Teh Jamus Tahun Anggaran 2011 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi
- Leba, Alkana Goro. 2014. *Lima Paradigma Administrasi Negara "Nicholas Henry, "Paradigms of Public Administration"*. Diakses pada tanggal 30 Maret 2016 dari <http://elkanagoro.blogspot.co.id/2014/09/lima-paradigma-administrasi-negara.html>
- Miles, Mathew B., A. Michael Huberman and Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE Publication Inc. Diakses pada tanggal 30 Maret 2016 dari http://www.sagepub.com/update55585_Chapter_1_Sample_Miles_Qualitative_Data_Analysis_3e_2.pdf
- Moesa, Ali Muchsan. 2007. *Nasionalisme kyai*. Yogyakarta: Lkis
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Munasef. 1995. *Pariwisata dan Pengembangannya*. Jakarta: Gunung Agung
- Nazir, Muhammad. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal landas, Cetakan Kedua*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ngawi dalam Angka 2012-2015. Diakses pada tanggal 12 Mei 2016 dari <http://ngawikab.bps.go.id/>
- Pamudji. 1985. *Kerjasama antar Daerah dalam Rangka Pembinaan Wilayah: Suatu Tinjauan dari Segi Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Bina Aksara
- Pendit, Nyoman S. 1994. *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: Toko Agung

_____. 2002. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Pitana, I, G, dan Gayatri, P, G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: CV Andi Offset

Pitana, I Gede dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi

Prabowo, Panca Hari. 2015. *Presiden Jokowi : Penanganan Korupsi Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi*. Diakses pada Tanggal 19 Juni 2016 dari <http://www.antaraneews.com/berita/502446/presiden-jokowi-penanganan-korupsi-pengaruhi-pertumbuhan-ekonomi>

Yahya, Dr. Ir. Arief, M.S.c. 2015. Sambutan Menteri Pariwisata R.I. Pada Peringatan *World Tourism Day* dan Hari Kepariwisata Nasional. Diakses pada Tanggal 11 Mei 2016 dari <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=125&id=2975>

Ritonga, Abdurrahman. 2001. *Kependudukan dan Lingkungan Hidup*. Lembaga Penerbit: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Rohmad, Zaini., et al. 2009. *Kebijakan Kemitraan Publik, Privat dan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata (Studi Tentang Kebijakan Kemitraan dalam Pengembangan Pariwisata di Malang Raya)*. Artikel Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Saktiyono. 2006. *Ipa Biologi 1*. Jakarta: Esis

Saptina, Ari, dkk. 2009. *Siap Menghadapi UN SMA*. Grafindo

Sastrayuda, Gumelar S. 2010. *Konsep Pengembangan Kawasan Agrowisata. Hand out Mata Kuliah Concept Resort and Leisure, Strategi Pengembangan dan Konsep Resort and Leisure*

Savas, Emanuel S. 2000. *Privatization and Public Private Partnership*. New York: Seven Bridges Press

Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua*. Bandung: CV. Mandar Maju

Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suansri, P. 2003. *Community Based Tourism Handbook*. Bangkok, Thailand : Responsible Ecological Social Tours Project (REST)

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

_____. 2014. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sukma, Devani. 2013. *"Tata Kelola yang Baik (Good Governance)"*. Diakses pada tanggal 24 Februari 2016 dari keuanganlsm.com/tata-kelola-yang-baik-good-governance/

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: IKAPI

Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan, Cetakan Ketujuhbelas*. Jakarta: LP3ES

_____. 2006. *Good Governance*. Jakarta: UI-Press

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Utama, I Gusti Bagus Rai. 2013. *Jurnal Pengembangan Wisata Kota Sebagai Pariwisata Masa Depan Indonesia*. Bali: Universitas Dhyana Pura.

Utomo, Sutrisno. 2012. *Pariwisata Berbasis Komunitas*. Diakses pada tanggal 30 Maret 2016 dari <https://sutrisnoutomo.wordpress.com/2012/03/05/pariwisata-berbasis-komunitas/>

Wibisono, B. Kunto. 2010. *Sektor Pariwisata Jadi Andalan Devisa Terbesar Negara*. Diakses pada tanggal 23 Maret 2016 dari <http://www.antaranews.com/berita/212959/sektor-pariwisata-jadi-andalan-devisa-terbesar-negara>

Widana, I Putu Krisna Arta. 2015. *Perubahan Pengelola Daya Tarik Wisata Tanah Lot dan Dampaknya terhadap Masyarakat Desa Pakraman Beraban Kabupaten Tabanan*. Tesis Program Studi Kajian Pariwisata Universitas Udayana, Denpasar

Yoeti, A, Oka. 1997. *Perencanaan & Pembangunan Pariwisata*. Jakarta: Penerbit PT Pradnya Paramita

_____. 2006. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Penerbit Angkasa

_____. 2008. *Ekonomi Pariwisata (instruksi, informasi dan implementasi)*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara